



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



# LAPORAN TAHUNAN BPPK 2021

Pandemi, Pembelajaran Digital,  
dan *Learning Organization*

#BelajarTanpaBatas



# Daftar Isi

---

## Sambutan Kepala BPPK

### Kilas Kinerja 2021

01

01.1	Arah Kebijakan dan Strategi 2020-2024.....	3
01.1.1	Rencana Strategis BPPK 2020-2024.....	4
01.1.2	Program IS RBTK.....	7
01.2	Pengelolaan Kinerja Organisasi.....	10
01.3	Ringkasan Laporan Keuangan.....	12
01.3.1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....	13
01.3.2	Neraca.....	15
01.3.3	Laporan Operasional (LO).....	17
01.3.4	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).....	18
01.3.5	Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).....	18
01.4	BPPK Dalam Angka.....	19
01.5	Penghargaan BPPK.....	20
01.6	Peristiwa Penting.....	31

02

### Profil BPPK

02.1	Visi, Misi dan Tata Nilai.....	34
02.1.1	Visi.....	34
02.1.2	Misi.....	35
02.1.3	Tata Nilai.....	35
02.2	Sejarah BPPK.....	36
02.2.1	Pendidikan Jangka Panjang dan Pendek pada Masa Sebelum BPLK.....	36
02.2.2	Lahirnya Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan (BPLK).....	36
02.2.3	Terbentuknya Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).....	36
02.3	Struktur Organisasi.....	35
02.4	Profil Pejabat.....	39

# 03

## Sumber Daya Manusia

03.1	Profil Sumber Daya Manusia.....	45
03.2	Pengelolaan Sumber Daya Manusia.....	48
03.2.1	Perencanaan SDM.....	48
03.2.2	Manajemen Talenta.....	49
03.2.3	Mutasi dan Promosi.....	49
03.2.4	Persiapan Purnabhakti.....	50
03.2.5	Pengelolaan Jabatan Fungsional.....	50
03.3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.....	53
03.3.1	Capaian Pembelajaran Pegawai BPPK.....	53
03.3.2	Strategi Pengembangan Pegawai BPPK.....	54
03.4	Pengawasan dan Penegakan Disiplin.....	55

# 04

## Analisis Kerja

04.1	Perumusan Kebijakan Pembelajaran.....	57
04.2	Pengelolaan Pembelajaran Keuangan Negara.....	59
04.2.1	Pembelajaran di Bidang Pengelolaan Anggaran dan Perbendaharaan.....	61
04.2.2	Pembelajaran di Bidang Pengelolaan Pajak.....	71
04.2.3	Pembelajaran di Bidang Kepabeanan dan Cukai.....	77
04.2.4	Pembelajaran di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan.....	81
04.2.5	Pembelajaran di Bidang Kepemimpinan dan Manajerial.....	94
04.2.6	Pembelajaran di Bidang Keuangan Negara Lainnya.....	97
04.3	Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....	104
04.4	Pengelolaan Akreditasi.....	105
04.5	Pengelolaan Beasiswa Kementerian Keuangan.....	106
04.5.1	Persiapan Beasiswa.....	106
04.5.2	Pemantauan Karyasiswa.....	107
04.5.3	Seminar Alumni Beasiswa.....	107
04.5.4	BroSis (Obrolan Beasiswa).....	108
04.6	Pendidikan Vokasi Politeknik Keuangan Negara STAN.....	109
04.7	<i>Learning Organization dan Knowledge Management</i> .....	115
04.7.1	<i>Learning Organization</i> .....	115
04.7.2	<i>Knowledge Management</i> .....	121
04.8	Survei Kepuasan Pengguna Layanan 2021.....	123

# 05

## Tata Kelola Pemerintah

05.1	Sistem Pengendalian Internal.....	124
05.2	Manajemen Risiko.....	125
05.3	<i>Whistle Blowing System</i> .....	127
05.4	Keterbukaan Informasi Publik.....	128
05.4.1	Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik.....	128
05.4.2	Struktur Perangkat PPID Tingkat I BPPK.....	128
05.4.3	Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	129
05.4.4	Statistik Layanan Informasi Publik BPPK Tahun 2021.....	130
05.5	ZI WBK di Lingkungan BPPK.....	131

# 06

## Kerja Sama Internasional

06.1	Webinar Series: <i>Global Development Learning Network (GDLN) Education and HRD in the Era of a New Normal</i> .....	133
06.2	<i>E-Learning Financial Programming and Policies, PART 1 (FPP 1x)</i> .....	135
06.3	<i>E-Learning Financial Programming and Policies, PART 2 (FPP 2x)</i> .....	135
06.4	<i>Executive Workshop: The Future of Money</i> .....	136

# Sambutan Kepala BPPK

Assalamualaikum Wr. Wb.

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan YME, atas berkat, rahmat dan karunia-Nya Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan mampu menjalankan berbagai program dan kegiatan pengembangan kompetensi di bidang Keuangan Negara di tengah tantangan pandemi *COVID-19* pada tahun 2021.

Laporan tahunan ini disusun dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dengan menyajikan peristiwa penting, tugas, peran, capaian kinerja, prestasi, strategi, dan kebijakan BPPK sepanjang tahun 2021. Selain itu, laporan tahunan ini juga disusun untuk menyediakan informasi yang relevan bagi *stakeholder* sebagai pengguna layanan BPPK.

Pada tahun 2021, Indonesia masih menghadapi pandemi *COVID-19* yang membawa tantangan bagi pengelolaan keuangan negara. BPPK selaku unit pengelola pembelajaran di bidang keuangan negara dituntut adaptif dengan melakukan berbagai perubahan dalam rangka mendukung SDM pengelola keuangan negara supaya dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Berbagai strategi dan kebijakan pengelolaan pembelajaran telah dijalankan selama tahun 2021 sebagai respon tantangan pandemi *COVID-19*. Dalam kondisi darurat pandemi *COVID-19*, BPPK mengintegrasikan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan setiap layanan yang diberikan serta melakukan inovasi dengan mengoptimalkan penggunaan *platform digital* dalam pembelajaran. Selama tahun 2021, 99,43% program pembelajaran BPPK dilaksanakan secara digital dalam bentuk *e-learning*, *micro-learning*, *open access learning*, dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Selain itu, terdapat serangkaian program pembelajaran kreatif lainnya yang juga diselenggarakan dalam bentuk *Kemenkeu CorpU Talk (KCT)*, *Kemenkeu CorpU Open Class (KCOC)*, *Learning Organization Knowledge Room (LOKeR)*, *Kemenkeu CorpU FunQuest (KC FunQuest)*, *Learning Week*, Webinar, dan sebagainya.

Dalam rangka mengantisipasi perubahan yang semakin cepat, disrupsi dan ketidakpastian di tingkat nasional dan global, Kementerian Keuangan menetapkan salah satu tujuan dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024 yaitu birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.





Salah satu sasaran strategis dalam tujuan tersebut adalah Organisasi dan SDM yang Optimal. Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis dimaksud, pada tahun 2021, Kementerian Keuangan menetapkan salah satu indikator kinerja utama yaitu Tingkat Implementasi *Learning Organization*. *Learning Organization* (organisasi pembelajar) merupakan organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri, baik secara kolektif maupun individual, dalam upaya mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya. Untuk mendukung pencapaian IKU Tingkat Implementasi LO dimaksud, BPPK sebagai motor penggerak *Kemenkeu Corporate University* menginisiasi diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 283/KMK.011/2021 tentang Implementasi Organisasi Pembelajar (*Learning Organization*) di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/KM.11/2021 tentang Pedoman Teknis Implementasi Organisasi Pembelajar (*Learning Organization*) di Lingkungan Kementerian Keuangan. Berbagai kegiatan dalam rangka internalisasi *Learning Organization* telah dilakukan diantaranya, sosialisasi yang melibatkan seluruh Unit Eselon I dan LNSW di lingkungan Kementerian Keuangan, *Kemenkeu Learning Festival (KLF)*, *Learning Organization Knowledge Room (LOKeR)*, dan penyebaran materi-materi pembelajaran terkait *Learning Organization*. Selain itu, IKU Tingkat Implementasi *Learning Organization* juga diukur dengan berpedoman pada peraturan khusus yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KM.11/2021 tentang Penilaian Tingkat Implementasi Organisasi Pembelajar (*Learning Organization*) dan Komite *Learning Organization* di Lingkungan Kementerian Keuangan. Ke depannya, BPPK akan terus menginisiasi kegiatan-kegiatan yang dapat membangun budaya belajar agar Kementerian Keuangan dapat menjadi *Learning Organization* sebagaimana yang diharapkan.

Selain melalui implementasi *Learning Organization*, untuk dapat mewujudkan Organisasi dan SDM yang Optimal, Kementerian Keuangan juga menetapkan strategi pembangunan dan pengembangan manajemen pengetahuan (*knowledge management*). Pada tahun 2021, berbagai upaya telah dilakukan oleh BPPK untuk mendukung implementasi manajemen pengetahuan di lingkungan Kementerian Keuangan diantaranya pengembangan *Knowledge Management System (KMS)* yaitu *Kemenkeu Learning Center (KLC)*, pendokumentasian berbagai aset intelektual di bidang keuangan negara, penjaminan mutu aset intelektual, penyebaran aset intelektual, dan sosialisasi pemanfaatan KMS. Ke depannya, BPPK akan terus mendorong implementasi manajemen pengetahuan. Sehingga pada tahun 2024 yang akan datang, implementasi manajemen pengetahuan di lingkungan Kementerian Keuangan diharapkan dapat mencapai level *maturity 4 (Refinement)* berdasarkan *Asian Productivity Organization (APO) KM Framework*.

Selain berperan dalam membangun kompetensi SDM Pengelola Keuangan Negara, BPPK juga memiliki peran dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi untuk mempersiapkan kader-kader pengelola keuangan negara melalui Politeknik Keuangan Negara STAN. Sebagai institusi pendidikan, PKN STAN memiliki tugas untuk menyelenggarakan Tri-dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang keuangan negara. Sepanjang tahun 2021 PKN STAN telah melakukan transformasi di bidang pendidikan dan pengajaran antara lain melalui perubahan program studi dan perubahan kurikulum. Pada perubahan program studi, dilakukan perubahan jenjang pendidikan program studi, dari semula Diploma I dan Diploma III menjadi Diploma IV. PKN STAN juga melakukan perubahan kurikulum dari semula hanya kurikulum akademik, menjadi kurikulum akademik dan kurikulum pembangunan karakter. Pada tahun 2021, PKN STAN menghasilkan 3.799 punggawa keuangan negara yang tersebar tidak hanya di Kementerian Keuangan, melainkan juga di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Selain itu, sepanjang tahun 2021, PKN STAN juga telah menghasilkan 207 publikasi penelitian di bidang Keuangan Negara yang dipublikasikan di berbagai jurnal internasional dan jurnal nasional seperti Scopus, Thomson, Microsoft Academic Search, Ebsco, Proquest, jurnal nasional yang terakreditasi DIKTI dan jurnal nasional yang memiliki ISSN. Di bidang Pengabdian Masyarakat, PKN STAN tetap menyelenggarakan berbagai kegiatan meskipun pandemi *COVID-19* belum berakhir. Sepanjang tahun 2021, PKN STAN menyelenggarakan 131 kegiatan pengabdian masyarakat, dimana 40 diantaranya merupakan program Pengabdian Masyarakat Unggulan seperti pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan BUM-Des, pengelolaan dana BOS, pengelolaan UMKM, dan penyusunan kurikulum SMK.

Kami berharap laporan tahunan ini bermanfaat bagi *stakeholder* dalam memenuhi kebutuhan informasi terkait BPPK dan pembelajaran di bidang keuangan negara. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh *stakeholder*, atas dukungan dan partisipasi yang diberikan dalam penyelenggaraan program pembelajaran dan layanan lainnya di lingkungan BPPK. Dukungan, partisipasi, dan saran dari *stakeholder* sangat kami butuhkan dalam rangka perbaikan dan peningkatan layanan BPPK di masa yang akan datang.

Selain itu, kami juga berharap seluruh jajaran BPPK dapat terus menjalin sinergi yang baik, senantiasa mengembangkan inovasi, dan melakukan perbaikan berkelanjutan agar dapat memberikan pelayanan prima bagi *stakeholder* di masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua agar BPPK dapat terus menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal di masa yang akan datang.



# 01

## Kilas Kinerja 2021

### 01.1

## Arah Kebijakan dan Strategi 2020-2024

BPPK mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPPK memiliki peran krusial dalam mendukung tujuan Kementerian Keuangan dan juga agenda pembangunan nasional melalui pengembangan SDM pengelola keuangan negara yang mumpuni dan berkinerja tinggi. Dalam menjalankan tugas dan peran tersebut, perlu adanya kebijakan strategis yang sejalan dengan kebijakan nasional maupun Kementerian Keuangan.

## 01.1.1

## Rencana Strategis BPPK 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi BPPK pada tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional dan tujuan Kementerian Keuangan, serta mencapai sasaran strategis organisasi BPPK adalah sebagai berikut:

### 1. Penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi yang *fit for purposes* di bidang keuangan negara, termasuk pada penguasaan teknologi informasi

Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) memiliki peran penting untuk memenuhi kebutuhan dan menyiapkan SDM pengelola keuangan negara melalui penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang keuangan negara. Sebagai perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Keuangan, penyelenggaraan pendidikan pada PKN STAN harus didasarkan pada kebutuhan Kementerian Keuangan dan perkembangan keilmuan di bidang keuangan negara. Pendidikan vokasi memiliki keunggulan dalam menerapkan aspek-aspek praktis yang didukung oleh teori yang tepat. Untuk mengantisipasi dan merespons dinamika keilmuan di bidang keuangan negara, PKN STAN perlu menyiapkan program pendidikan (program studi) dengan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan (*fit for purposes*) agar alumninya memiliki kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh instansi tujuan. Hal ini mengingat SDM keuangan negara tidak hanya dibutuhkan oleh Kementerian Keuangan saja melainkan oleh seluruh Kementerian/ Lembaga, maupun Instansi Daerah.

Upaya PKN STAN dalam mencetak SDM keuangan negara berkualitas tentunya harus didukung dengan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Saat ini, dunia telah memasuki era Revolusi Industri 4.0 dengan karakteristik utamanya adalah penggunaan teknologi digital yang dominan.

Implementasi transformasi digital yang dilakukan sebagai respons atas Revolusi Industri 4.0 telah sejalan dengan misi kelima Kementerian Keuangan yaitu mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan sumber daya manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi. Hal ini juga senada dengan arahan Menteri Keuangan bahwa pegawai Kementerian Keuangan ke depan harus mempunyai *basic competency information technology (IT)* yang mendukung sistem pengelolaan keuangan negara.

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut yaitu:

#### a. Pendidikan terapan sesuai dengan kebutuhan pengguna (*link and match*) dan berbasis nilai (*value based education*)

PKN STAN merupakan *college* pada Kemenkeu Corpu, yang berperan sebagai salah satu sumber masukan bagi SDM keuangan negara. Dalam perencanaan dan pengembangan pendidikan, PKN STAN memperhatikan kebutuhan *stakeholder* baik dari kuantitas maupun kualitas. *Education fit for purposes* harus menjadi pegangan ke depan dalam arah pengembangan pendidikan tinggi khususnya pendidikan vokasi di PKN STAN untuk memastikan setiap peserta didik mempunyai kompetensi yang dibutuhkan yang tidak hanya untuk masa sekarang tetapi untuk menjawab tantangan di masa mendatang.

#### b. Penguatan peran PKN STAN melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi Berdasarkan prinsip-prinsip *good university governance*

Penguatan kelembagaan PKN STAN dan penyempurnaan kurikulum serta program studi mempertimbangkan arahan terkait penyederhanaan birokrasi serta optimalisasi tata kelola pendidikan tinggi termasuk pada pemerataan beban kerja, penajaman dan penguatan fungsi, serta pengembangan proses bisnis. Hal ini ditujukan untuk menyiapkan SDM keuangan negara yang tidak hanya berkemampuan tinggi namun juga berkarakter, berintegritas, dan memahami nilai-nilai keberagaman.

## 2. Pengelolaan beasiswa Kementerian Keuangan yang optimal

Beasiswa Kementerian Keuangan yang dikelola oleh BPPK akan diintegrasikan dengan manajemen talenta. Kondisi yang ingin dicapai adalah beasiswa Kementerian Keuangan sebagai *talents' factory* yang memunculkan calon pemimpin-pemimpin Kementerian Keuangan di masa yang akan datang. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut perlu integrasi program beasiswa Kementerian Keuangan dengan *talent management* dan peningkatan kemitraan dengan universitas top dunia.

Strategi untuk mewujudkannya adalah:

- a. Penyelarasan program beasiswa Kementerian Keuangan dengan kebijakan manajemen talenta.
- b. Pengembangan program beasiswa afirmasi untuk pegawai yang berasal dari Indonesia Timur (Papua).

## 3. Penguatan sistem pembelajaran berbasis digital dan pelatihan berdampak tinggi pada peningkatan kinerja keuangan negara

Pembelajaran keuangan negara yang dikelola BPPK tidak hanya menasar internal Kementerian Keuangan namun juga melingkupi pembelajaran keuangan negara pada Kementerian, Lembaga, Institusi Daerah (KLID) dan masyarakat sesuai kebijakan Kementerian Keuangan.

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut:

- a. Penguatan pembelajaran yang mengedepankan karakteristik RAIA (*Relevant, Applicable, Impactful, dan Accessible*) dan bermuatan etika dengan fokus pada tercapainya tujuan strategis Kementerian Keuangan.
- b. Optimalisasi penyelenggaraan pembelajaran berbasis digital bagi SDM keuangan negara.
- c. Optimalisasi pengelolaan pelatihan/pembelajaran bagi SDM keuangan negara pada KLID.
- d. Implementasi sistem penjaminan kualitas pembelajaran.

## 4. Optimalisasi program sertifikasi kompetensi yang sesuai kebutuhan

Kondisi yang ingin dicapai adalah penyelenggaraan sertifikasi kompetensi yang optimal bagi seluruh SDM keuangan negara baik di Kementerian Keuangan, KLID, dan masyarakat sesuai kebijakan Kementerian Keuangan.

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan adalah melalui:

- a. Harmonisasi kebijakan pembinaan kompetensi dan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara.
- b. Penguatan sistem penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara yang efektif dan efisien.

## 5. Penguatan kebijakan dan implementasi manajemen pengetahuan di lingkungan Kementerian Keuangan

Kondisi yang ingin dicapai adalah manajemen pengetahuan yang andal dengan tingkat kematangan yang optimal.

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut:

- a. Pembangunan kerangka manajemen pengetahuan yang mendukung budaya berbagi pengetahuan dan pemanfaatan pengetahuan bagi solusi kinerja SDM keuangan negara.
- b. Peningkatan fungsionalitas dan sentralisasi sistem manajemen pengetahuan.

## 6. Organisasi dan SDM yang *agile* dalam rangka penguatan implementasi Kementerian Keuangan *Corporate University*

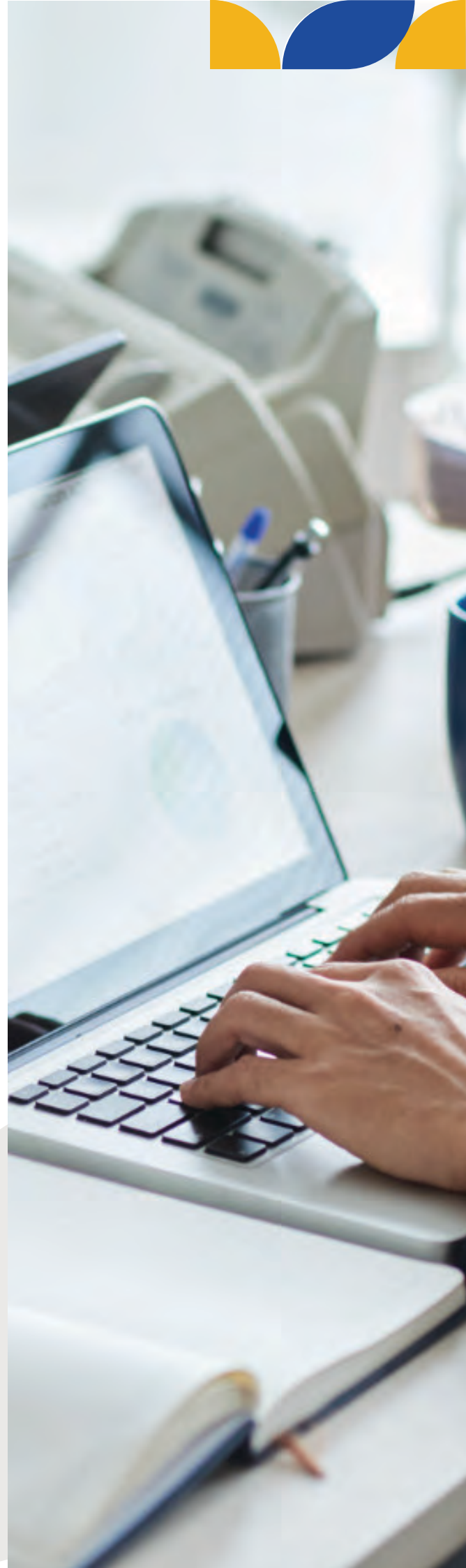
Kondisi yang ingin dicapai adalah terwujudnya organisasi dan SDM yang *agile* dan berorientasi pada pelayanan terhadap *stakeholders* melalui implementasi Kemenkeu Corpu.

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut:

- a. Penataan organisasi dan pengembangan proses bisnis berbasis digital dalam rangka penguatan implementasi Kementerian Keuangan *Corporate University*.
- b. Pengembangan pola kerja dan pola pengembangan kompetensi SDM berbasis fungsi yang aplikatif dan berdampak tinggi.
- c. Penguatan kemitraan strategis dengan institusi pendidikan, pelatihan dan sertifikasi terbaik.
- d. Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) yang efektif dan efisien.
- e. Pemutakhiran sarana prasarana berwawasan lingkungan dan teknologi informasi dalam mendukung pembelajaran yang efektif dan efisien.
- f. Pembangunan infrastruktur dan penguatan implementasi *sharing facilities* berbasis keunggulan komparatif.
- g. Penggunaan teknologi informasi termutakhir dalam mendukung pembelajaran.

## 7. Pemutakhiran sarana prasarana berwawasan lingkungan dan teknologi informasi dalam mendukung pembelajaran yang efektif dan efisien

- a. Pembangunan infrastruktur dan penguatan implementasi *sharing facilities* berbasis keunggulan komparatif.
- b. Penggunaan teknologi informasi termutakhir dalam mendukung pembelajaran.



## 01.2.2

## Program IS RBTK

Program Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK) yang diinisiasi oleh BPPK sangat berpengaruh pada kebijakan strategis BPPK. Pada tahun 2019 BPPK menginisiasi Inisiatif Strategis *Modern E-Learning* sebagai Alat Utama Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia (*IS Modern E-Learning*) dengan periode pelaksanaan tahun 2019 s.d. 2021 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 91/KMK.01/2021.

### 1. Latar Belakang *IS Modern E-Learning*

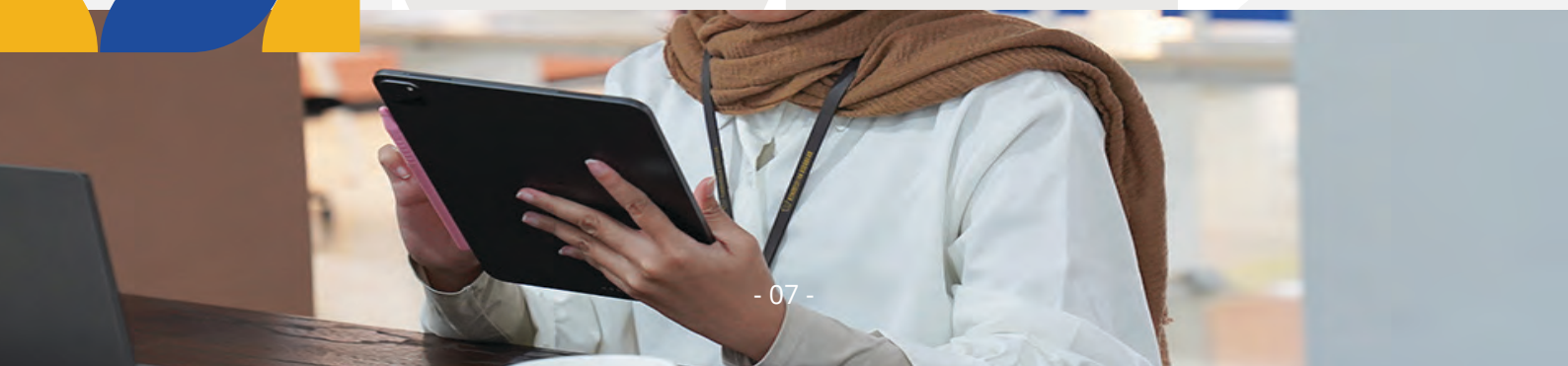
- a. Pelaksanaan *e-learning* dilaksanakan melalui Kemenkeu *Learning Center* (KLC) dengan komposisi sebesar 15% dari total proporsi pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK;
- b. Sistem pembelajaran *online* belum terbangun dengan baik;
- c. Pelaksanaan *training* tatap muka berpotensi mengganggu ritme pelaksanaan pekerjaan rutin;
- d. *Repository* Pengetahuan dalam KLC masih rendah dan belum optimal (belum memadai untuk menggantikan metode pembelajaran klasikal);
- e. Tingginya biaya pembelajaran klasikal dan perjalanan dinas;
- f. Kebutuhan untuk meningkatkan partisipasi/ penetrasi/ penyebaran pengetahuan dan kemudahan untuk mengakses kembali pengetahuan;
- g. Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) belum terintegrasi dengan HRIS;
- h. Jumlah pegawai yang diajukan pada AKP kurang dari 80% dari jumlah pegawai.

### 2. Terobosan yang dilaksanakan

- a. Penguatan fungsi *Learning and Knowledge Management System* (LKMS) Kemenkeu dan integrasi LKMS yang tersebar pada UE I ke KLC;
- b. Penggunaan *omnichannel* dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan *user experience*;
- c. Peningkatan konten digital baik secara kuantitas maupun kualitas;
- d. Implementasi *change management* yang komprehensif untuk mendukung budaya pembelajaran *modern*; dan
- e. Penggunaan Kemenkeu *Leadership Development Program* (KLDP) sebagai salah satu dasar dalam merencanakan pengembangan SDM.

### 3. Key Milestone

- a. *Governance* pelaksanaan *full e-learning*;
- b. Melengkapi dan menyelesaikan seluruh arsitektur BDAT sesuai dengan *framework EA* ke dalam *ORBUS iServer* (penyempurnaan di 2020);
- c. Pengembangan interkoneksi antara KLC dan HRIS untuk mendukung otomatisasi administrasi dan pelaksanaan *E-Learning*;
- d. Penyediaan Infrastruktur TIK dan pembelajaran multimedia;
- e. Implementasi dengan target 30% (2019), 50% (2020), dan 70% (2021) *full e-learning*;
- f. Digitalisasi materi pembelajaran (kualitas dan kuantitas);
- g. Peningkatan fungsionalitas dan sentralisasi LKMS Kemenkeu;
- h. *Change management* implementasi dan budaya *e-learning*.



#### 4. Target Output

- a. Penghematan biaya penyelenggaraan dan anggaran perjadiin pelatihan 70%;
- b. Platform pembelajaran digital yang semakin *accessible*;
- c. Integrasi AKP Jabatan dan Individual dengan HRIS/*e-performance*.

#### 5. Target Outcome

- a. Perubahan budaya belajar pegawai yang semakin mandiri dan mengarah pada *digital learning*;
- b. Pemenuhan gap kompetensi individu.

#### 6. Capaian Implementasi *IS Modern E-Learning*

Melalui implementasi *IS Modern E-Learning*, proses pembelajaran di Kementerian Keuangan dapat terlaksana secara lebih efisien dengan tetap menjaga agar pembelajaran bersifat relevan, aplikatif, berdampak nyata (*impactful*), dan mudah diakses. Hal tersebut ditunjukkan dengan implementasi pembelajaran digital pada tahun 2021 yang proporsinya sebesar 99,43% dari total pembelajaran di Kementerian Keuangan. Program pembelajaran digital pada tahun 2021 tersebut terdiri dari 857 program dan telah diikuti oleh 360.190 peserta dengan total capaian *output* 5.950.498 jamlator dimana terjadi penghematan anggaran penyelenggaraan pelatihan sebesar 92,76% dan penghematan perjalanan dinas pelatihan sebesar 99,73% jika dibandingkan dengan tahun 2018. Capaian tersebut dapat terlaksana dengan dukungan berupa pengembangan modul KMS, *KLC mobile*, dan penambahan fitur pada KLC yang memudahkan pegawai untuk mengakses materi *e-learning* dari mana saja dan kapan saja. Kemudahan akses KLC didukung dengan pemeliharaan infrastruktur TIK dari aspek jaringan, *bandwidth*, dan server.

Selain *IS Modern E-Learning*, pada tahun 2021 BPPK menginisiasi inisiatif strategis terkait data analitik, yaitu:

##### 1. *Data Analytic to Improve Learning Process*

Proyek data analitik ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengalaman belajar pegawai pada platform KLC. Terobosan yang dilakukan dalam proyek data analitik tersebut berupa fitur rekomendasi pelatihan untuk setiap pegawai pada aplikasi KLC dengan memanfaatkan aplikasi *machine learning*.



Target *output* dari proyek tersebut adalah tersedianya fitur rekomendasi pelatihan untuk pegawai pada aplikasi KLC. Sedangkan, target *outcome* yang diharapkan adalah peningkatan pengalaman dan *performance* pembelajaran peserta pelatihan.

Tahapan pada proyek *Data Analytics to Improve Learning Process* yang telah diselesaikan pada tahun 2021 adalah:

- a. Integrasi dengan Sistem KLC;
- b. Implementasi Aplikasi.

Penggunaan *machine learning* pada KLC dengan *output* berupa rekomendasi pelatihan bagi pegawai Kementerian Keuangan merupakan perwujudan dari inisiatif *Data Analytics to Improve Learning Process*. Fitur rekomendasi pelatihan tersebut merupakan fitur baru pada KLC yang dikembangkan untuk memberikan pengalaman baru dalam proses pembelajaran. Fitur tersebut mendukung perwujudan *personalized learning* dimana setiap pegawai dapat melakukan pembelajaran berdasarkan kebutuhan masing-masing individu.

Pengembangan fitur rekomendasi pelatihan ke depan dapat dilakukan melalui penambahan/penyesuaian model algoritma *machine learning* dan pengayaan data *courses history* dari pegawai dengan model algoritma baru yang lebih sempurna dan data *courses history* dari pegawai yang semakin banyak, maka diharapkan rekomendasi yang diberikan akan lebih tajam dan semakin sesuai dengan preferensi peminatan dan kebutuhan pegawai maupun kebutuhan organisasi.

## 2. Data Analitik Pengembangan Kompetensi SDM Melalui Pembelajaran

BPPK mengembangkan Data Analitik Pengembangan Kompetensi SDM melalui Pembelajaran yang bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan terkait pengembangan SDM melalui pelatihan. Terobosan yang dilakukan dalam proyek data *analytics* tersebut adalah penyediaan aliran data terkait pengembangan kapasitas SDM bagi seluruh UE I. Target *output* dari proyek data analitik tersebut adalah *Dashboard* pengembangan kapasitas SDM yang dapat digunakan oleh seluruh UE I. Sedangkan, target *outcomes* yang diharapkan adalah pengambilan keputusan terkait pengembangan SDM melalui pelatihan menjadi lebih berkualitas.

Tahapan kegiatan pada proyek Data Analitik Pengembangan Kompetensi SDM melalui Pembelajaran pada tahun 2021 adalah:

- a. Identifikasi kebutuhan informasi pengembangan SDM UE I;
- b. Finalisasi fitur dan proses bisnis yang diakomodasi di DA;
- c. Perancangan aplikasi;
- d. Pembuatan aplikasi *dashboard Data Analytics UE I* untuk mendukung pengembangan kompetensi SDM;
- e. Implementasi *predictive analytics dashboard* pengembangan kapasitas SDM.

Penggunaan *machine learning* pada KLC dengan *output* berupa rekomendasi pelatihan bagi pegawai sebagai hasil *project Data Analytics to Improve Learning Process* digunakan sebagai salah satu sumber data pada aplikasi Dashboard Pengembangan Kapasitas SDM bagi Seluruh UE I yang merupakan perwujudan dari proyek Data Analitik Pengembangan Kompetensi SDM melalui Pembelajaran. Kedua proyek data analitik tersebut sangat berkaitan satu sama lain. Pengembangan dalam bentuk penyempurnaan *machine learning* agar hasil rekomendasi pelatihan bagi pegawai semakin tajam dan sesuai preferensi tentunya akan membuat *output* usulan peserta dari aplikasi *Dashboard* Pengembangan Kapasitas SDM bagi Seluruh UE I juga semakin akurat dan tepat sasaran.

Aplikasi *Dashboard* Pengembangan Kapasitas SDM bagi Seluruh UE I yang disepakati disebut Sistem Informasi Pemantauan Pembelajaran (SIPP) tersebut dapat diakses melalui KLC pada tautan <https://klc2.kemenkeu.go.id/sipp>. Saat ini, aplikasi tersebut dapat diakses oleh para PIC pengelola SDM masing-masing UE I yang telah ditunjuk (*user* terdaftar). Pengembangan SIPP ke depan dapat dilakukan dengan penambahan fitur-fitur baru sesuai dengan kebutuhan UE I karena pada saat ini hanya 5 fitur yang telah diakomodasi di aplikasi SIPP. Melalui pengembangan *machine learning* pada KLC tersebut, diharapkan *output* usulan peserta pelatihan pada aplikasi SIPP akan semakin akurat dan lebih tepat sasaran. Dengan demikian, setiap UE I dapat lebih mudah dalam melakukan pengambilan keputusan terkait pengembangan kapasitas SDM di unitnya karena didukung dengan data yang makin berkualitas.

## 01.3

# Pengelolaan Kinerja Organisasi

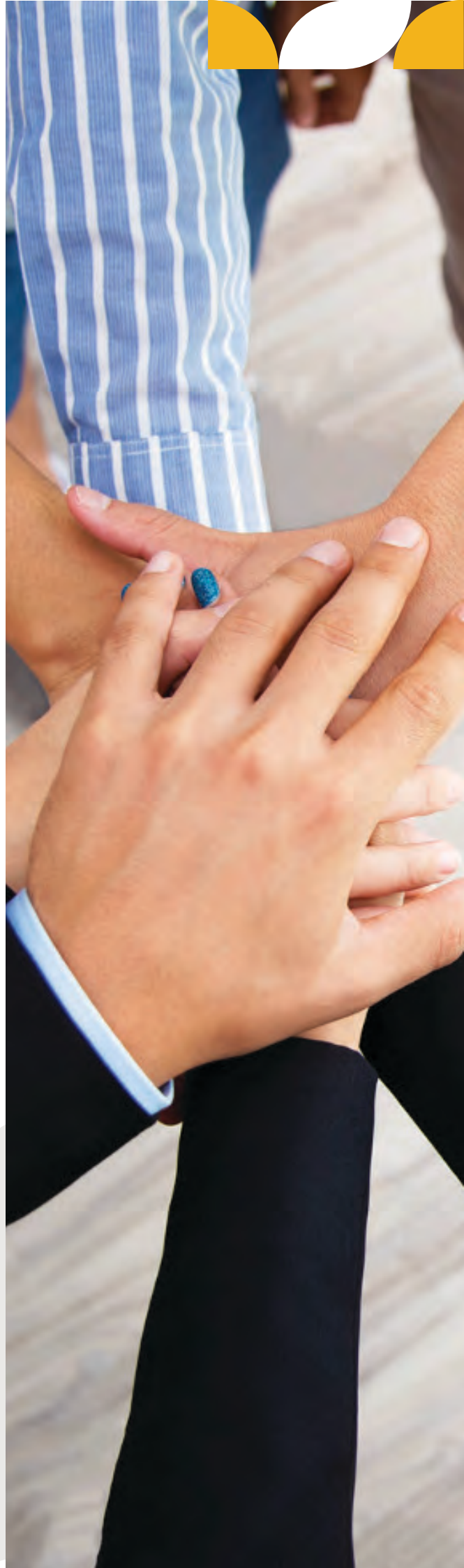
BPPK telah menerapkan sistem manajemen kinerja berbasis *balanced scorecard (BSC)* sejak tahun 2007. Secara umum, pengelolaan kinerja di lingkungan BPPK meliputi seluruh tahapan eksekusi strategi yakni perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi kinerja, *review* dan penyempurnaan kontrak kinerja. Detail tahapan pengelolaan kinerja tahun 2021 antara lain sebagai berikut.

### 1. *Refinement* Kontrak Kinerja Kemenkeu-One BPPK

Tahapan perencanaan pengelolaan kinerja diawali dengan pelaksanaan *review* atas Kontrak Kinerja Tahun 2020. Tindak lanjut hasil *review* tersebut adalah penyempurnaan dan pembaruan Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun target Kontrak Kinerja Tahun 2020, yang biasa disebut *Refinement* Kontrak Kinerja. *Refinement* Kontrak Kinerja dimulai sejak triwulan IV tahun 2020 diawali dengan penyusunan konsep awal Kontrak Kinerja Tahun 2021 berdasarkan hasil *Refinement* Kontrak Kinerja di level Kementerian Keuangan. Dari hasil *Refinement* Kontrak Kinerja di level Kemenkeu ini diketahui IKU *cascading* dan *mandatory* yang ada di BPPK.

Tahap berikutnya adalah pembahasan bersama antara Pengelola Kinerja Organisasi Kemenkeu-One BPPK dan Pengelola Kinerja Organisasi Kemenkeu-Two-Three di lingkungan BPPK. Adapun cakupan pembahasan meliputi Peta Strategi, IKU, dan target IKU BPPK tahun 2021. Perumusan peta strategi, IKU, maupun target IKU Kemenkeu-One BPPK tahun 2021 mengacu pada:

- a. Visi, misi dan program kerja Kemenkeu;
- b. Dokumen perencanaan strategis BPPK antara lain Renstra BPPK 2020-2024 dan/ atau Rencana Kerja 2021;
- c. Peraturan terkait pengelolaan kinerja;
- d. Arahan Kepala BPPK dalam Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dan rapat pimpinan lainnya;



- e. Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK);
- f. Hasil *refinement level* Kemenkeu dan kebijakan *refinement*.

Hasil kesepakatan pembahasan pada *level* pengelola kinerja selanjutnya dibahas bersama Kepala Badan, Sekretaris Badan, para Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Kepala Pusdiklat), Direktur PKN STAN, dan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan (Kepala Balai Diklat).

## 2. Penandatanganan Kontrak Kinerja

Dalam rangka menjaga komitmen seluruh jajaran BPPK untuk mewujudkan visi BPPK, hasil pembahasan *refinement* dituangkan dalam Kontrak Kinerja Kepala Badan, serta Kontrak Kinerja Sekretaris Badan, para Kepala Pusdiklat, Direktur PKN STAN, dan para Kepala Balai Diklat.

Penandatanganan Kontrak Kinerja Kepala Badan dilakukan bersamaan dengan penandatanganan Kontrak Kinerja Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan serta pejabat eselon I lain di lingkungan Kementerian Keuangan yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2021. Selanjutnya, proses penandatanganan Kontrak Kinerja juga dilakukan oleh seluruh pejabat eselon II hingga level pelaksana di seluruh unit kerja BPPK.

Kontrak Kinerja Menteri Keuangan dan Kontrak Kinerja Kepala Badan dan seluruh pejabat eselon I lain kemudian ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 63/KMK.01/2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Penetapan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama Tingkat Kementerian dan Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2021.

## 3. Monitoring dan Evaluasi Kinerja: Komitmen Pimpinan dalam Dialog Kinerja Organisasi (DKO)

*Monitoring* dan evaluasi kinerja merupakan tahapan penting dalam manajemen kinerja BPPK. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara rutin dan berkala setiap triwulan sebagai bentuk komitmen pimpinan BPPK. Proses *monitoring* dan evaluasi kinerja dilakukan dalam rapat pimpinan yang disebut dengan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dan dipimpin langsung oleh Kepala Badan. Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Badan, para Kepala Pusdiklat, Direktur PKN STAN, dan para Kepala Balai Diklat yang didampingi oleh para manajer kinerja serta manajer risiko.

Pelaksanaan DKO tidak hanya difokuskan untuk membahas kinerja tetapi juga membahas risiko yang akan berdampak pada pencapaian sasaran. Pembahasan berfokus pada isu strategis, dampak terhadap pencapaian kinerja dan penetapan rencana aksi. DKO pada tahun 2021 diselenggarakan secara daring mengingat terdapat peserta Kepala Balai Diklat yang tersebar di seluruh Indonesia dan masih terdapat pembatasan sosial akibat pandemi COVID-19.

## 4. Perhitungan Nilai Kinerja Berdasarkan Kualitas Kontrak Kinerja

BPPK menerapkan mekanisme yang dapat mendorong diferensiasi kinerja antar pegawai dan meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja secara berkesinambungan. Mekanisme tersebut bertujuan mewujudkan penilaian kinerja yang lebih objektif dan diimplementasikan melalui penghitungan Nilai Kinerja Pegawai (NKP) berdasarkan Kualitas Kontrak Kinerja (K3). Penilaian K3 dilakukan terhadap dua komponen yaitu kualitas IKU pegawai dan kualitas target IKU yang telah ditetapkan. NKP yang merupakan kombinasi nilai capaian kinerja pegawai dan nilai perilaku, kemudian dikalikan dengan nilai K3 sehingga dihasilkan NKP K3. Dengan adanya penghitungan NKP K3 ini diharapkan seluruh pegawai menyusun IKU yang berkualitas dan benar-benar mencerminkan *output* dari pekerjaannya, serta menetapkan target yang menantang setiap tahunnya.

Dalam proses penilaian NKP K3 juga dilakukan *review* Kontrak Kinerja secara berjenjang. Mulai dari atasan langsung kemudian dilanjutkan oleh pengelola kinerja organisasi setiap level. Pelaksanaan *review* tersebut dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi *e-performance*.

Selanjutnya, atas kinerja organisasi juga dilakukan penilaian berdasarkan Kualitas Kontrak Kinerja. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPPK mencapai 112,94 sedangkan NKO berdasarkan K3 mencapai 116,81 dengan status kinerja baik sekali. Selanjutnya NKO dan NKO K3 Kementerian, BPPK, dan unit eselon I lain ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK.01/2022 tanggal 8 Maret 2022 tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi Tingkat Kementerian dan Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2021.

## 5. Edukasi Pengelolaan Kinerja

Proses penyempurnaan pengelolaan kinerja di lingkungan BPPK juga dilakukan melalui edukasi pengelolaan kinerja kepada seluruh pegawai di lingkungan BPPK. Edukasi pengelolaan kinerja dilakukan dalam berbagai bentuk, diantaranya:

- a. *E-learning* pengenalan pengelolaan kinerja;
- b. Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) pengelolaan kinerja; dan
- c. Pemberian layanan konsultasi pengelolaan kinerja.

Selain tahapan pengelolaan kinerja yang telah diuraikan di atas, akuntabilitas kinerja BPPK tahun 2021 juga dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal. Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja BPPK tahun 2021 sebesar 90,65 atau masuk dalam kategori "AA" dengan predikat "sangat memuaskan".

Dengan upaya-upaya yang telah dilakukan diharapkan pemahaman dan kesadaran pegawai dalam implementasi pengelolaan kinerja berbasis BSC akan meningkat. Pencapaian kinerja yang sudah baik, masih harus terus ditingkatkan dengan memelihara semangat perbaikan yang berkelanjutan (*continuous improvement*).

### 01.4

## Ringkasan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan BPPK TA 2021 (*audited*) telah disusun dan disajikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan BPPK TA 2021 meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).



## 01.4.1

## Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Realisasi Pendapatan Negara mencapai 45,29% sedangkan realisasi Belanja Negara mencapai 88,38%. Strategis organisasi BPPK adalah sebagai berikut:

Uraian	2020		2021	
	Realisasi	%	Realisasi	%
<b>Pendapatan</b>				
PNBP	9.949.803.728	118,42	13.227.023.069	45,29
Jumlah Pendapatan	9.949.803.728	-	13.227.023.069	45,29
<b>Belanja</b>				
Belanja Pegawai	92.972.844.218	98,92	93.911.169.216	98,17
Belanja Barang	228.640.173.191	75,97	210.738.859.670	81,68
Belanja Modal	136.340.201.477	98,73	144.051.011.629	93,50
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>457.953.218.886</b>	<b>85,91</b>	<b>448.701.040.515</b>	<b>88,83</b>

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkup BPPK berasal dari dua pendapatan, yaitu Pendapatan BLU PKN STAN dan PNBP Lainnya. Pendapatan BLU PKN STAN berasal dari penerimaan biaya pendaftaran Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) PKN STAN, pelatihan brevet pajak, kerja sama pelatihan dengan Pemerintah Daerah, kerja sama pelatihan dengan lembaga/badan usaha, pendapatan dari deposito, dan sewa ruangan.

PNBP Lainnya berasal dari biaya pendaftaran ujian sertifikasi kepabeanaan dan cukai, pendapatan dari hasil lelang BMN yang sudah tidak digunakan, penerimaan belanja tahun anggaran yang lalu, dan beberapa pendapatan non rutin.

### Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Tahun	Estimasi Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
2020	8.402.000.000	9.949.803.728	118,42
2021	29.205.491.000	13.227.023.069	45,29

Pada tahun 2020, akibat pandemi COVID-19, terdapat penurunan target pendapatan melalui APBN Perubahan. Adapun realisasi pendapatan turun 81,35% dibanding tahun 2019 menjadi Rp. 9.943.803.728, tetapi tetap mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 118,42%. Penurunan realisasi pendapatan diakibatkan tidak terlaksananya penerimaan mahasiswa baru PKN STAN, penurunan pendapatan dari kerja sama pelatihan dengan pemerintah daerah, sewa (ruangan, asrama, dan kantin), serta pembatasan jumlah peserta sertifikasi kepabeanaan dan cukai.

Pada tahun 2021, meskipun terdapat penerimaan mahasiswa baru PKN STAN, realisasi pendapatan masih relatif rendah, yaitu Rp. 13.227.023.069 atau 45,29% dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan baru dalam Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) PKN STAN, yaitu hanya pendaftar yang lulus Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) yang dapat melanjutkan proses SPMB selanjutnya. Pada tahun 2021, tidak terdapat APBN-Perubahan sehingga tidak dapat menurunkan target pendapatan yang berdampak pada rendahnya persentase capaian.

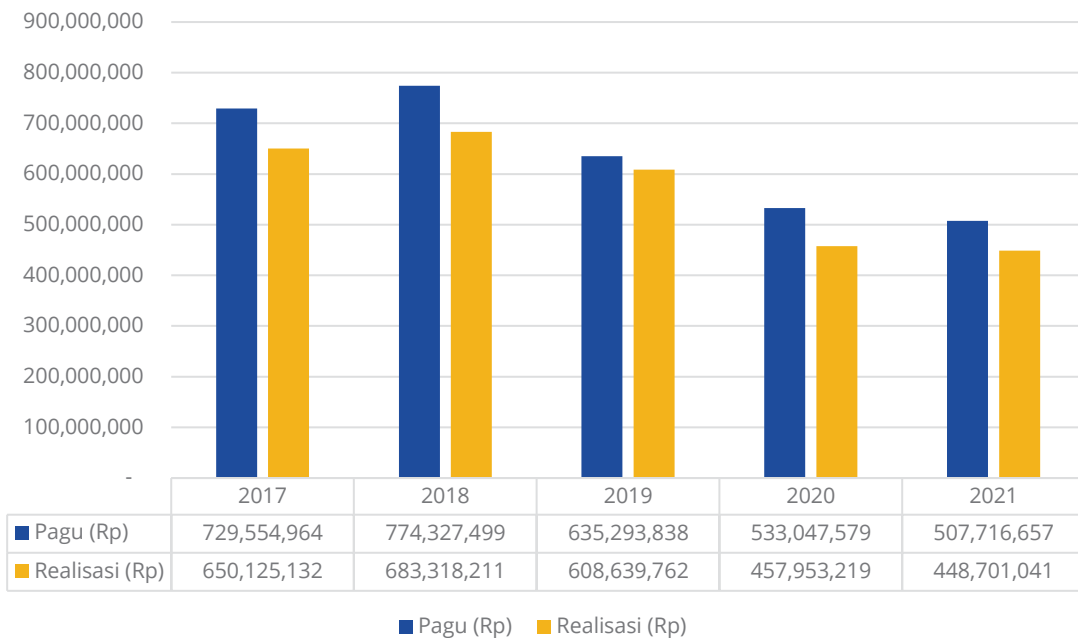
### Pagu dan Realisasi Anggaran

Tahun	Belanja Pegawai				Belanja Barang			
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Porsi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Porsi
2020	93.988.840	92.972.844	98,92	20,30	300.964.205	228.640.173	75,97	49,93
2021	95.663.321	93.911.169	98,17	20,93	257.996.114	210.738.860	81,88	46,97

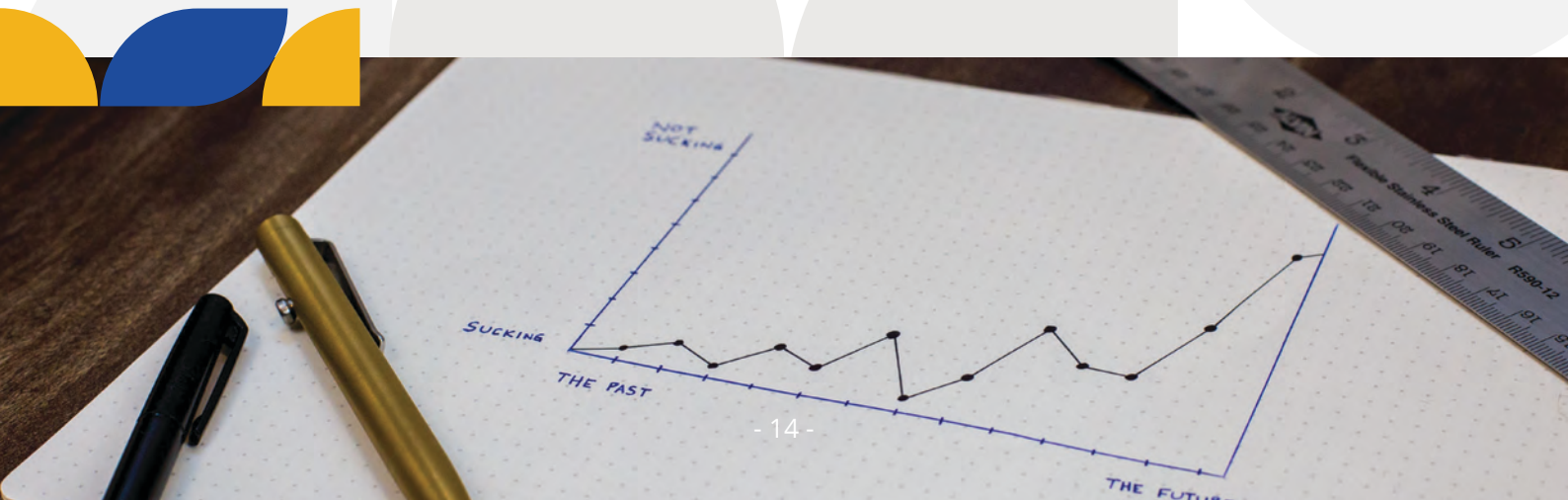
Tahun	Belanja Modal				Total Belanja			
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Porsi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Porsi
2020	138.094.534	136.340.201	98,73	29,77	533.047.579	457.963.219	85,91	100,00
2021	154.057.222	144.051.012	93,50	32,10	507.716.657	448.701.041	88,38	100,00

### Grafik Pagu dan Realisasi Anggaran

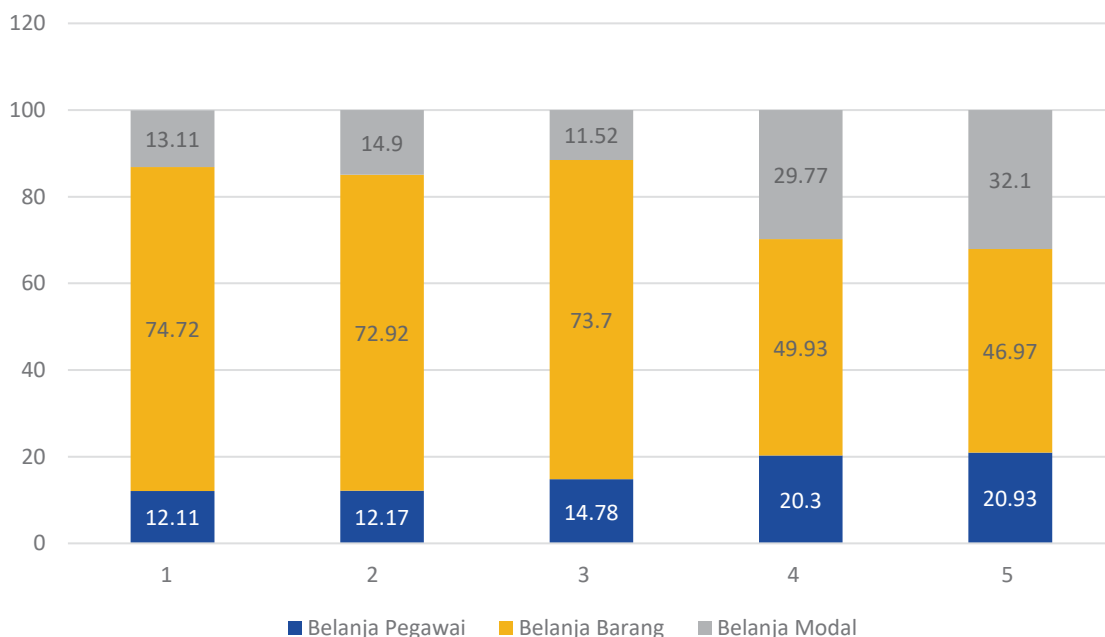


Realisasi belanja, terutama Belanja Barang, cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh penerapan pembelajaran non klasikal melalui *e-learning* dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang mendukung *Corporate University*. Adanya pandemi *COVID-19* menjadi salah satu faktor yang mempercepat pelaksanaan agenda tersebut, selain berdampak pada

pelaksanaan kegiatan-kegiatan lainnya secara daring. Selain itu pada tahun 2021, belanja modal yang cukup besar adalah pada pekerjaan lanjutan pembangunan gedung pendidikan di PKN STAN.



## Realisasi dan Porsi Belanja



Berdasarkan grafik di atas dapat kita lihat bahwa porsi realisasi terbesar dari belanja di BPPK adalah Belanja Barang, diikuti dengan Belanja Modal dan terakhir adalah Belanja Pegawai. Porsi realisasi Belanja Pegawai baik dari secara persentase maupun nominal mengalami kenaikan disebabkan oleh kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/golongan, dan perubahan status pegawai. Belanja Barang turun pada tahun 2020 dan 2021 seiring dengan pelaksanaan pelatihan melalui *e-learning* dan PJJ.

Sebaliknya, untuk Belanja Modal meningkat seiring menurunnya porsi realisasi Belanja Barang. Realisasi Belanja Modal pada tahun 2020 dan 2021 berasal dari pembangunan gedung pada PKN STAN yang dilakukan dengan mekanisme kontrak tahun jamak (direncanakan selesai pada tahun 2022) serta pengadaan berbagai peralatan dan *software* pendukung pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

### 01.4.2

## Neraca

Uraian	31 Desember 2020	Naik/ Turun %	31 Desember 2021	Naik/ Turun %
	Jumlah		Jumlah	
<b>Aset</b>				
Aset Lancar	137.627.114.223	5,05	139.143.393.351	1,10
Aset Tetap	6.956.118.071.040	0,54	7.014.189.082.498	0,83
Piutang Jk Panjang	921.193.946	(16,67)	-	(100,00)
Aset Lainnya	4.334.844.735	(38,85)	7.150.416.083	64,95
<b>Jumlah Aset</b>	<b>7.099.011.223.944</b>	<b>0,58</b>	<b>7.160.482.891.932</b>	<b>0,87</b>
<b>Kewajiban &amp; Ekuitas</b>				
Kewajiban	921.025.008	(23,79)	1.260.681.285	36,88
Ekuitas	7.098.080.196.936	0,59	7.159.222.210.647	0,86
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Ekuitas</b>	<b>7.099.001.223.944</b>	<b>0,58</b>	<b>7.160.482.891.932</b>	<b>0,87</b>

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Nilai aset (*netto*) BPPK pada tahun 2021 adalah Rp.7.160.482.891.932. Dalam kurun waktu lima tahun terdapat kenaikan nilai aset sebesar 4,91%. Aset lancar mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yang sebagian besar berasal dari kenaikan kas pada Badan Layanan Umum (BLU) pada PKN STAN.

Pada tahun 2020 dan 2021 karena adanya pandemi *COVID-19*, alokasi Belanja Modal sebagian besar digunakan untuk pengadaan peralatan pendukung PJJ (masuk dalam kategori Peralatan dan Mesin) dan pengadaan *software* untuk pengembangan berbagai macam aplikasi pendukung (masuk dalam kategori Aset Tak Berwujud). Tercatat terdapat transaksi dari pembelian Peralatan dan Mesin sejumlah 7.304 unit senilai Rp. 69.431.008.334 pada tahun 2020 dan 1.180 unit senilai Rp.15.113.830.753 pada tahun 2021. Adapun untuk transaksi pembelian Aset Tak Berwujud, direalisasikan dalam bentuk *software* sejumlah 500 unit senilai Rp.2.271.648.190 pada tahun 2020 dan 735 unit senilai Rp.4.893.951.300 pada tahun 2021.

Pada tahun 2021 Piutang Jangka Panjang (*netto*) sebesar Rp0 yang berasal dari Piutang Jangka Panjang (bruto) sebesar Rp. 1.431.966.922 dikurangi nilai penyisihan Rp. 1.431.966.922. Piutang jangka Panjang atas nama PT. Handa Panca Sakti direklasifikasi ke Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang (masuk kelompok Aset Lancar).

Aset Lainnya terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain. Nilai Aset Lainnya yang berupa Aset Lain-lain mengalami kenaikan dan penurunan yang bervariasi karena berasal dari aset tetap yang dalam kondisi rusak berat dan akan dihapuskan. Pada tahun 2020, terdapat penghapusan BMN dalam jumlah yang signifikan sebagai tindak lanjut program sensus BMN. Adapun pada tahun 2021, terdapat pembelian Aset Tak Berwujud dalam bentuk *software* sebagaimana sudah disebutkan di atas.

Kewajiban berasal dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar, Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar, Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya, Dana Pihak Ketiga, dan Pendapatan Diterima Di Muka. Nilai kewajiban yang tertera di neraca setiap tahun, sebagian besar berasal dari Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar berasal dari tagihan penggunaan listrik, telepon dan air pada periode Desember yang belum dibayar. Belanja ini dari tahun ke tahun mengalami penurunan karena adanya gerakan efisiensi di Lingkungan Kementerian Keuangan.



### 01.4.3

## Laporan Operasional (LO)

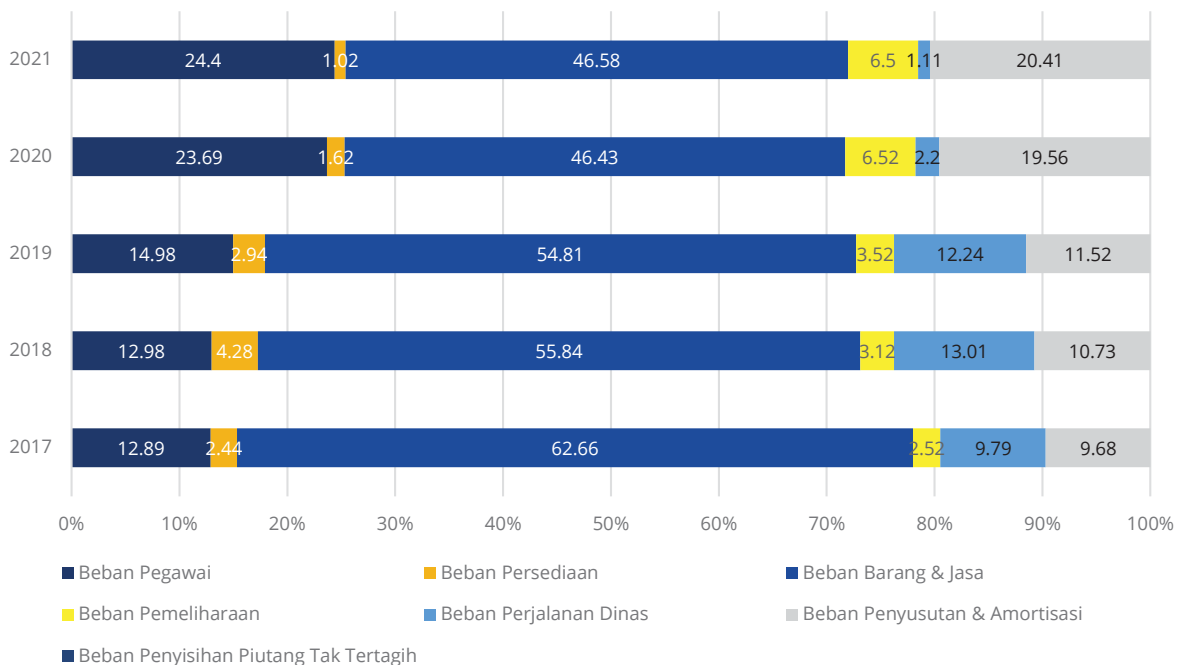
Laporan Operasional menggambarkan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya. Pada tahun 2020, defisit mengalami penurunan 28,04%, yang disebabkan terutama oleh penurunan Beban Operasional khususnya pada Beban Barang & Jasa dan Beban Perjalanan Dinas, meskipun juga terjadi penurunan pendapatan. Selanjutnya, pada tahun 2021, defisit mengalami penurunan 7,05%, yang disebabkan terutama oleh penurunan Beban Perjalanan Dinas dan Beban Persediaan.

Tahun 2020, Pendapatan Operasional mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal ini disebabkan karena pembatalan pelaksanaan SPMB PKN STAN karena adanya pandemi COVID-19 (2020).

Adapun pada tahun 2021, terdapat kenaikan PNPB karena pelaksanaan SPMB PKN STAN, meskipun terdapat perubahan kebijakan, yaitu penggunaan syarat minimal nilai UTBK untuk dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Pembayaran biaya seleksi dilakukan oleh peserta yang berhak mengikuti SKD, sehingga jumlah peserta yang melakukan pembayaran biaya seleksi jumlahnya terbatas.

Beban Operasional mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020. Penurunan beban ini seiring dengan pelaksanaan pelatihan non-klasikal melalui *e-learning* dan Pembelajaran Jarak Jauh dalam rangka mendukung *Corporate University*. Selanjutnya, pelaksanaan gerakan efisiensi sesuai Instruksi Menteri Keuangan Nomor 346/IMK.01/2017 ikut menyumbang penurunan pos Beban Operasional, selain adanya pandemi COVID-19 yang terjadi dalam dua tahun terakhir.

### Perbandingan Porsi Pos Beban Operasional



Dalam Beban Operasional terdapat pos Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang & Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Penyusutan dan Amortisasi, dan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Pada tabel di atas, porsi terbesar dari pos beban adalah Beban Barang dan Jasa yang bersumber dari pelaksanaan *core* bisnis BPPK, yaitu pelaksanaan pendidikan

dan pelatihan, disusul Beban Pegawai dan Beban Pemeliharaan. Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan alokasi sistematis dari penurunan masa manfaat aset yang tidak secara langsung berasal dari pengeluaran anggaran.

## 01.4.4

## Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Uraian	31 Desember 2020	Naik/ Turun %	31 Desember 2021	Naik/ Turun %
	Jumlah		Jumlah	
Ekuitas Awal	7.056.642.468.557	2,80	7.098.080.198.936	0,59
Surplus/ Defisit LO	(401.738.828.539)	(28,04)	(373.414.993.075)	(7,05)
Koreksi	(9.201.942.382)	(105,45)	(3.145.998.392)	-
Transaksi Antar Entitas	452.378.501.300	(22,23)	437.703.003.178	(3,24)
<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>7.098.080.198.936</b>	<b>0,59</b>	<b>7.159.222.210.647</b>	<b>0,86</b>

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, transaksi antar entitas, dan ekuitas akhir. Transaksi antar entitas terjadi antar entitas akuntansi/entitas pelaporan di lingkup Pemerintah Pusat.

Pada level konsolidasian, transaksi antar entitas saling mengeliminasi sehingga bersaldo nihil. Nilai ekuitas BPPK terus mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir, dari Rp. 7.098.080.198.936 pada tahun 2020 menjadi Rp. 7.159.222.210.647 pada tahun 2021 (naik Rp. 61.142.011.711).

## 01.4.5

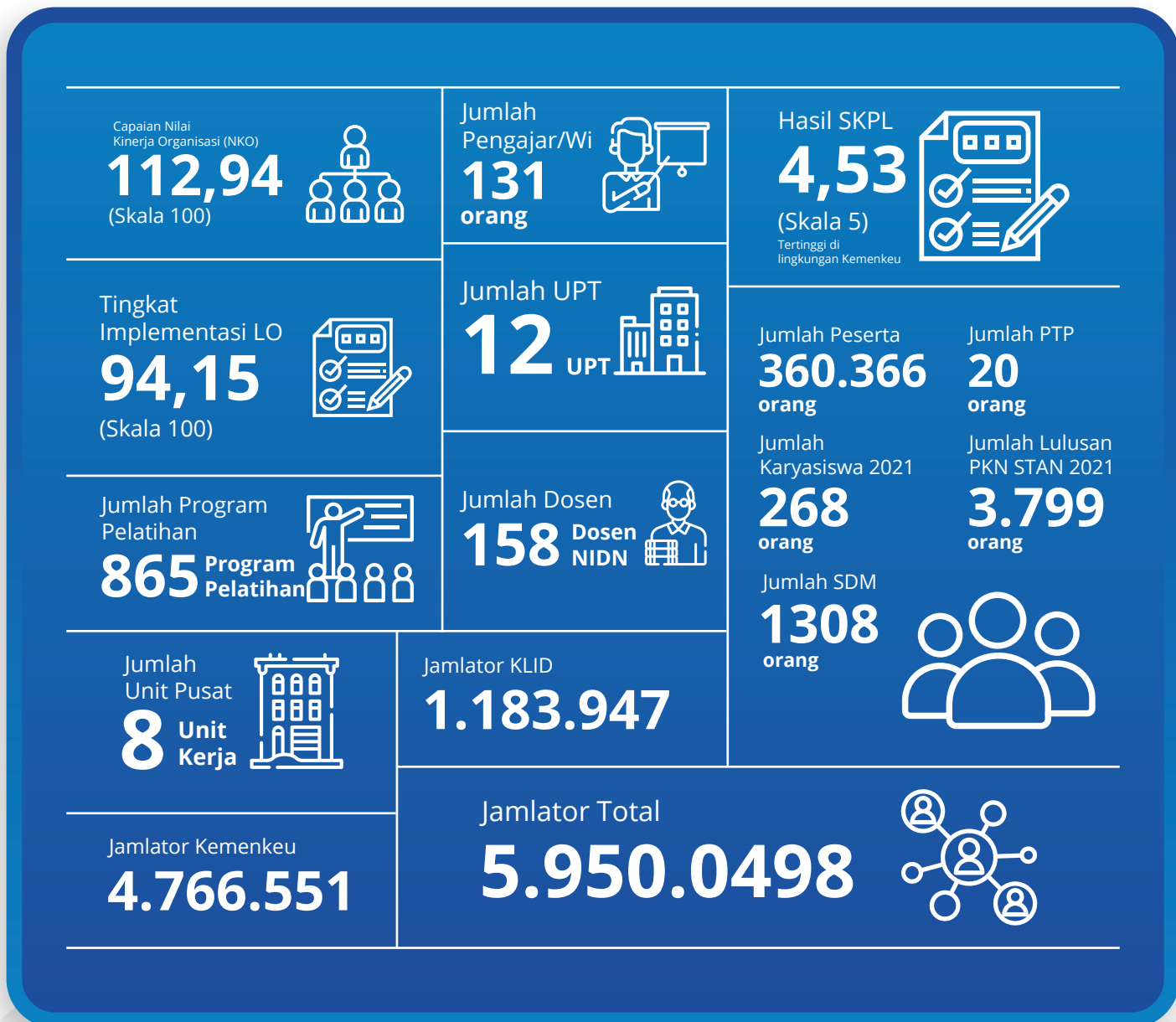
## Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang harus disajikan oleh satker selain neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. Keberadaan CaLK menjadi komponen yang mendukung penyajian laporan keuangan satker.

CaLK menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

# 01.5

## BPPK Dalam Angka



# 01.6

## Penghargaan BPPK



Foto: Top Leader on Digital Implementation 2021

24 Februari 2021

### GOLD WINNER

Majalah Edukasi Keuangan terbitan BPPK kembali meraih penghargaan Gold Winner pada ajang Indonesia Inhouse Magazine Award (InMA) 2021 kategori The Best of Government Inhouse Magazine, bersanding dengan Majalah BICARA terbitan Bank Indonesia dan Majalah Integrasi terbitan OJK.

3 Agustus 2021

### PPID INFORMATIF TINGKAT KEMENTERIAN

BPPK meraih penghargaan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I Kategori Informatif di lingkungan Kementerian Keuangan. Raihan tersebut tidak terlepas dari berbagai inovasi dan kreasi positif yang terus dikembangkan. BPPK telah menyusun handbook PPID dan menggunakan knowledge management system (KMS) untuk media transfer pengetahuan tentang keterbukaan informasi publik

30 November 2021

### INDEKS KEPUASAN TERTINGGI

BPPK meraih Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) sebesar 4,63 dari Survey Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran. Capaian IKPL tersebut menjadi capaian IKPL tertinggi diantara berbagai Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

20 Desember 2021

### PREDIKAT ZONA INTEGRITAS

Sampai dengan tahun 2020, BPPK memiliki 6 (enam) Unit Kerja yang telah mendapatkan predikat sebagai Unit Kerja dengan ZI WBK dari KemenPAN-RB, yaitu Pusdiklat Keuangan Umum, Pusdiklat Bea dan Cukai, Pusdiklat KNPK, BDK Yogyakarta, BDK Manado, dan Balai Diklat Kepemimpinan. Pada tahun 2021, BPPK berhasil menambah 3 (tiga) Unit Kerja yang berpredikat sebagai Unit Kerja dengan ZI WBK yaitu Sekretariat BPPK, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, dan BDK Cimahi.

21 Desember 2021

### TOP DIGITAL

BPPK meraih kategori Top Digital Implementation 2021 #Level Stars 4 pada ajang Top Digital Awards 2021 yang diselenggarakan oleh Majalah ItWorks. Penghargaan tersebut berhasil diperoleh BPPK melalui pelaksanaan pembelajaran digital yang diterapkan melalui Kemenkeu Learning Center (KLC).

21 Desember 2021

### TOP LEADER

Kepala BPPK, Andin Hadiyanto, meraih penghargaan sebagai Top Leader on Digital Implementation 2021 atas komitmennya dalam mengimplementasikan pembelajaran digital dan manajemen pengetahuan sebagai upaya dalam mewujudkan learning organization di lingkungan Kementerian Keuangan.

## 01.7

# Peristiwa Penting



24 Februari 2021

## BPPK Raih *Gold Winner* pada Ajang Indonesia *Inhouse Magazine Award (InMA) 2021*

Majalah Edukasi Keuangan terbitan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan RI kembali meraih penghargaan bergengsi. Melalui siaran *live streaming*, Serikat Perusahaan Pers (SPS) menganugerahi Majalah Edukasi Keuangan sebagai pemenang *Gold Winner* pada ajang *Indonesia Inhouse Magazine Award (InMA) 2021* kategori *The Best of Government Inhouse Magazine*, bersanding dengan Majalah BICARA terbitan Bank Indonesia dan Majalah Integrasi terbitan OJK.

Apresiasi *Indonesia Inhouse Magazine Awards (InMA)*, *Indonesia Print Media Awards (IPMA)*, *Indonesia Student Print Media Awards (ISPRIMA)*, dan *Indonesia Young Readers Awards (IYRA)* yang merupakan apresiasi rutin tahunan persembahan SPS kali ini diikuti oleh 548 entri dan melibatkan sembilan orang juri. Apresiasi ini merupakan wujud dedikasi SPS untuk memicu lahirnya karya-karya sampul muka media cetak dan digital (*e-magazine*) di Indonesia.



12 Maret 2021

## Menteri Keuangan Lantik Andin Hadiyanto sebagai Kepala BPPK

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik dan mengukuhkan jajaran Pimpinan Tinggi Madya unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Pelantikan dilakukan terhadap enam pejabat baru, diantaranya adalah Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan DR. Andin Hadiyanto M.A., melalui Keputusan Presiden Nomor 21/TPA 2021 tanggal 2 Februari 2021 dan Nomor 36/TPA 2021 tanggal 9 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian keuangan.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan secara khusus menyampaikan pesan kepada Pak Andin agar dapat terus membangun Kementerian Keuangan sebagai *knowledge institution*, menjadikan Kemenkeu sebagai *world class corporate university*, dan terus meningkatkan *institutional culture* di Kemenkeu untuk dapat menangkap dan mendesiminasi *knowledge* dalam bidang pengelolaan keuangan negara kepada para pegawai Kemenkeu dan masyarakat luas.

14 April 2022

## Learning Council Meeting 2021

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) kembali melaksanakan kegiatan *Learning Council Meeting (LCM)* untuk tahun 2021. LCM kali ini membahas tentang laporan capaian dan isu implementasi kegiatan pengembangan kompetensi, SDM, serta manajemen pengetahuan (*knowledge management*).

Sama seperti LCM sebelumnya, pertemuan ini dilakukan secara daring dan dihadiri Menteri Keuangan, Staf Ahli Menteri Keuangan, pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, serta sejumlah pejabat di lingkungan BPPK.



LCM adalah forum tertinggi di bidang pembelajaran Kemenkeu Corpu dan pembinaan SDM di Kementerian Keuangan. Pertemuan ini akan membahas tiga agenda, yang pertama laporan tindak lanjut LCM 2020, yang kedua presentasi arah kebijakan pengelolaan dan pembinaan SDM oleh Pak Sekjen, dan yang ketiga diskusi dan arahan Menteri Keuangan.

**6 Mei 2022**

## **BPPK Raih Indeks Kepuasan Pengguna Layanan di Atas Agregat**

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) berhasil meraih Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) Tahun 2020 dengan skor 4,41 yang termasuk dalam kategori "puas". Capaian angka ini mengungguli perolehan IKPL Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara agregat yaitu 4,31.

IKPL merupakan instrumen riset pengukuran tingkat kepuasan para pengguna layanan berbagai program Kemenkeu sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenkeu.

Hal ini digunakan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang taktis dan strategis dalam meningkatkan kinerja pelayanan dan kepuasan pengguna layanan dari waktu ke waktu.

Untuk melaksanakan riset tersebut, pada tahun 2020 Kemenkeu bekerja sama dengan Universitas Padjajaran Bandung dalam mengukur indeks kepuasan pengguna layanan Kemenkeu pada unit-unit eselon I dan layanannya serta kinerja aspek-aspek layanan terkait dan pengaruhnya terhadap kepuasan pengguna layanan.

**3 Agustus 2021**

## **BPPK Raih Penghargaan PPID Tingkat I Kemenkeu Kategori Informatif**

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan meraih penghargaan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I Kategori Informatif di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada acara Webinar Keterbukaan Informasi Publik melalui Youtube Kemenkeu RI.



Raihan BPPK tersebut tidak terlepas dari berbagai inovasi dan kreasi positif yang terus dikembangkan. Salah satunya adalah penyusunan *handbook* PPID dan penggunaan *knowledge management system* (KMS) untuk media transfer pengetahuan tentang keterbukaan informasi publik.



4 Agustus 2021

## Penyampaian Konsep Corpu Sebagai Strategi Pengembangan Kompetensi ASN pada Acara Diskusi Online Media Tempo

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Andin Hadiyanto berkesempatan menjadi salah satu narasumber pada acara Diskusi Online Ngobrol Tempo dengan tema "Penguatan Kelembagaan Pengembangan SDM". Acara yang diselenggarakan oleh Tempo Media Group tersebut berlangsung secara daring melalui akun Youtube Tempodotco, Facebook Koran Tempo, dan TV Tempo.

Dalam diskusi yang turut menghadirkan Bapak Sugiyartanto (Kementerian PUPR) dan Helmi Basalamah (Kementerian LHK) sebagai narasumber, Bapak Andin Hadiyanto memaparkan transformasi pembelajaran tatap muka menuju pembelajaran digital yang diselenggarakan oleh BPPK. Bapak Andin menyebutkan, kini pembelajaran digital

semakin diperkuat dengan adanya Kemenkeu *Learning Center* (KLC) sebagai *platform* pembelajaran *online* yang diluncurkan pada tahun 2017. Hadirnya KLC tersebut sekaligus mendukung implementasi konsep *Corpu* dalam pengembangan kompetensi pegawai Kementerian Keuangan agar selaras dengan pencapaian tujuan organisasi.



19 Agustus 2021

## Kick-off Penguatan Komitmen Zona Integritas Menuju WBBM Pusdiklat Keuangan Umum

Pusdiklat Keuangan Umum menjadi perwakilan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang diajukan untuk mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). dalam rangka mewujudkan hal tersebut, dilaksanakan *kick-off* penguatan komitmen yang diselenggarakan secara *virtual* melalui *Zoom Meeting* dan dihadiri oleh Kepala BPPK, Andin Hadiyanto serta diikuti juga oleh Kepala Pusdiklat KU, Heni Kartikawati

beserta seluruh jajaran pejabat struktural, fungsional, dan seluruh pelaksana di lingkungan Pusdiklat Keuangan Umum. Sebagai bentuk komitmen nyata, Kepala Pusdiklat Keuangan Umum membentuk tim penguatan kembali WBBM Pusdiklat Keuangan Umum sebagai koordinasi terhadap peningkatan kualitas layanan dan pengawasan untuk tetap bersih dari korupsi.

30 Agustus 2021

## Soft Launching Kemenkeu Learning Festival (KLF)

Dalam rangka membangun budaya belajar dan berbagi pengetahuan untuk mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai *Learning Organization* serta sekaligus juga untuk menyambut hari ulang tahun Kementerian Keuangan (Hari Oeang) yang ke-75, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan telah menyelenggarakan kegiatan Kemenkeu *Learning Festival* tahun 2021 (KLF 2021).

KLF 2021 secara resmi di-*launching* oleh Kepala BPPK pada 30 Agustus 2021 yaitu pada acara *Learning Organization Knowledge Room (LOKeR) Spesial – Rekam Pengetahuanmu!*. Dalam sambutannya, Kepala BPPK menyampaikan bahwa melalui Kemenkeu *Learning Festival* 2021, BPPK ingin menghadirkan sumber-sumber belajar yang menarik, menyenangkan dan berkualitas bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.

Selain itu, Kepala BPPK juga menyampaikan bahwa pada gelaran KLF 2021, terdapat 9 (sembilan) kegiatan yang dapat diikuti oleh seluruh pegawai yaitu *Learning Organization Knowledge Room (LOKeR) Spesial, Learning Bootcamp: Content Creator & Knowledge Capture, Learning Competition, Launching KC FunQuest, Bedah Buku Kementerian Keuangan, Learning Bootcamp: Data Laboratory, MoF Learning Week, dan Be a Champion*.



Setelah sambutan Kepala BPPK, acara LOKeR Spesial dilanjutkan dengan menghadirkan sosok yang menginspirasi dalam bidang manajemen pengetahuan yaitu Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak, Nufransa Wira Sakti. Pada acara tersebut, Nufransa berbagi pengalamannya dalam melakukan *knowledge capture*. Beberapa hal penting disampaikan oleh Nufransa diantaranya sebagai berikut:

- pentingnya *knowledge capture*;
- cara membagi dan mengalokasikan waktu untuk dapat melakukan *knowledge capture*;
- persiapan yang harus dilakukan dalam *knowledge capture*;
- kendala yang sering dihadapi serta tips-tips dalam melakukan *knowledge capture*.

6-10 September 2021

## Learning Boot Camp: Content Creator and Knowledge Capture

Salah satu rangkaian acara KLF 2021 adalah *Learning Boot Camp* yang merupakan kegiatan pembelajaran disertai dengan praktik yang dipandu oleh *professional coach* yang terkenal di bidangnya. Kegiatan ini merupakan bentuk pembekalan untuk mempersiapkan gelaran *Learning Competition* KLF 2021.

*Learning Boot Camp* terbagi menjadi 2 (dua) camp, yaitu *knowledge content* dan *knowledge capture*. *Output* utama dalam kegiatan *Learning Boot Camp* ini adalah konten dalam media sosial (Instagram, Tiktok, Youtube, dan Podcast) dan film pembelajaran).

Learning Bootcamp menghadirkan beberapa content creator yang terkenal di Indonesia, yaitu:

- a. Pak Ndul (pembuat *channel* Youtube “Waton Guyon”);
- b. Novia Bachmid (penyanyi, aktris, dan *content creator*);
- c. Andry Alamsyah (dosen, *researcher*, *data scientist*, dan *blockchain expert*); dan
- d. Riri Riza (sutradara, penulis skenario, dan produser film).



13 September - 18 Oktober 2021

## KLF Learning Competition

KLF *Learning Competition* merupakan kompetisi terkait pembelajaran yang dapat diikuti oleh mahasiswa PKN STAN, seluruh pegawai, dan keluarga peawai Kementerian Keuangan. Melalui *Learning Competition*, BPPK ingin membangun antusiasme seluruh pegawai Kementerian Keuangan untuk melakukan pembelajaran.

Terdapat 7 (tujuh) kompetisi yang dapat diikuti, yaitu:

- a. Lomba Tiktok terkait Pembelajaran Keuangan Negara;
- b. *Podcast* terkait Pemulihan Ekonomi Nasional;
- c. Film Pendek Bertema Keuangan Negara;
- d. *Microteaching* Pembelajaran;
- e. *Ice Breaking* Pembelajaran;
- f. *Game-based Learning KC FunQuest*;
- g. *Story Telling* “Ayahku/ Ibuku Pegawai Kemenkeu”.



23 September 2021 - 18 Januari 2022

## Liga Inovasi

Liga Inovasi BPPK adalah langkah strategis dan bukti komitmen dari pimpinan BPPK untuk membudayakan inovasi di lingkungan BPPK. Liga Inovasi BPPK juga ditujukan untuk menjangkau dan mengembangkan ide-ide inovasi para pegawai untuk perbaikan layanan maupun proses bisnis di BPPK. Liga inovasi BPPK akan dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun dan wajib diikuti oleh seluruh unit di lingkungan BPPK.

Liga Inovasi terdiri atas 2 kategori yaitu Inovasi Unit (Liga Pusat dan Liga Balai) dan Ide Inovasi.

Pada Liga Inovasi 2021, terdapat 40 proposal Inovasi Unit dan 36 proposal Ide Inovasi. Pemenang Liga Pusat adalah Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial dengan inovasi "Gamifikasi *E-Learning* Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan". Sementara pemenang Liga Balai adalah BDK Yogyakarta dengan inovasi "Ayo Ngobrol Anti-korupsi dengan ringan (ANGKRINGAN)". Ide Inovasi dimenangkan oleh Wawan Ismawandi melalui ide inovasi "Hai MentorKU".

23 September 2021 - 18 Januari 2022

## Launching KC FunQuest

Masih dalam rangkaian gelaran KLF 2021, pada tanggal 30 September 2021, Kepala BPPK secara resmi melakukan launching KC FunQuest sebagai media pembelajaran kreatif yang didesain dengan menerapkan pendekatan *gamification*. Tujuan pengembangan Aplikasi KC *FunQuest* adalah untuk menyediakan media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi pegawai. Melalui KC *FunQuest*, setiap pegawai akan diberikan misi untuk menyelesaikan 4 pertanyaan kuis setiap hari dan *result*-nya akan di-*expose* pada *leaderboard* untuk meningkatkan faktor kompetisi. *Reward* berupa *point* akan diberikan untuk setiap jawaban yang benar dan dapat ditukar secara virtual dengan item-item untuk melengkapi area permainan sesuai dengan prioritas masing-masing.

Acara *Launching KC FunQuest* tersebut dimeriahkan dengan dihadirkannya *Sketsa Online: Ngegame Jangan Ngegas!*, tutorial akses KC *FunQuest*, dan pertunjukan musikal.



4-8 Oktober 2021

## Kemenkeu Learning Week

Kemenkeu *Learning Week* merupakan satu pekan yang diisi dengan *executive learning class* setiap harinya. Target peserta adalah para pejabat Eselon I, II, dan III di lingkungan Kementerian Keuangan. Kemenkeu *Learning Week* menghadirkan narasumber-narasumber pakar di bidang manajemen pengetahuan dan pembelajaran berkelas internasional. Kemenkeu *Learning Week* diselenggarakan setiap hari dalam bentuk *half-day* webinar selama satu minggu pada tanggal 4 Oktober sampai 8 Oktober 2021 dengan durasi 1,5 sampai 3 jam per harinya.

Dengan mengikuti kegiatan ini para pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan diharapkan dapat memahami praktik-praktik pembelajaran terbaik di organisasi untuk dapat kemudian diterapkan di unit kerja masing-masing dalam rangka mewujudkan Kemenkeu sebagai *Learning Organization*.



13 Oktober 2021

## Bedah Buku "Merancang Anggaran dan Merajut Keindonesiaan"

Acara bedah buku "Merancang Anggaran dan Merajut Keindonesiaan" Biografi Boediarso Teguh Widodo ini merupakan bagian dari rangkaian acara Kemenkeu Learning Festival 2021 yang diselenggarakan BPPK. Buku ini merupakan salah satu bentuk *knowledge capture* yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan untuk mengabadikan perjalanan karir, ide dan gagasan, serta pengetahuan dari salah satu tokoh penting yang telah mengabdikan di lingkungan Kementerian Keuangan selama lebih dari 38 tahun, yaitu Boediarso Teguh Widodo. Selama masa pengabdianya tersebut, berbagai jabatan strategis telah beliau emban yang mayoritas adalah jabatan di bidang analisis, penyusunan dan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Banyak sekali jasa yang telah diberikan oleh Boediarso kepada Kementerian Keuangan dan Indonesia, diantaranya:



- a. bernegosiasi dengan IMF dan Bank Dunia dalam mengawal penyusunan anggaran dan memperjuangkan berbagai keputusan strategis pada masa Letter of Intent (LOI) akibat krisis moneter dan fiskal 1997;

b. mengubah format penyusunan APBN dari *T-account* menjadi *I-account* guna peningkatan transparansi dan kejelasan informasi pengendalian defisit; dan

c. menjadi sosok sentral dalam reformasi perimbangan keuangan pemerintah pusat ke daerah.

19 Oktober 2021

## Bedah Buku Biografi Profesional Marwanto Harjowiryo: Maestro Simfoni Perbendaharaan

Bedah buku kembali diselenggarakan oleh BPPK untuk memberikan inspirasi bagi seluruh pegawai Kementerian Keuangan dalam memberikan pengabdian. Buku Biografi Profesional Marwanto Harjowiryo: Maestro Simfoni Perbendaharaan merupakan buku yang disusun oleh Kementerian Keuangan untuk mengabadikan pengetahuan sosok yang sangat berjasa dalam reformasi di bidang perbendaharaan yaitu Marwanto Harjowiryo yang pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan.



Selama 36 tahun pengabdian di Kementerian Keuangan, beliau telah membuat banyak sekali legacy, diantaranya:

d. mengubah paradigma Humas ke arah yang lebih strategis sebagai *public relations* Kementerian Keuangan; dan

- a. menjadi *key player* di balik suksesnya reformasi birokrasi Kementerian Keuangan;
- b. melakukan berbagai bentuk digitalisasi pengelolaan keuangan negara melalui pengembangan Aplikasi SPAN, Aplikasi OM-SPAN, Modul Penerimaan Negara, dan Aplikasi SAKTI;
- c. merealisasikan penerapan *Treasury Single Account* dan *Treasury Dealing Room*;

e. menginisiasi penerapan *Survey* Kepuasan Pengguna Layanan yang disertai dengan analisis data untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) sekaligus untuk mendeteksi dan membersihkan organisasi dari calo Alokasi Transfer ke Daerah.

19 November 2021

## Be A Champion

*Be a champion* merupakan acara puncak dari KLF untuk memberikan penghargaan kepada para pemenang *learning competition*. *Be a Champion* 2021 mengusung tema "*Heritage of Indonesia*". Selain pemberian penghargaan, acara *Be a Champion* tersebut dimeriahkan dengan berbagai segmen diantaranya pertunjukan tari tradisional, teater drama musikal, dan *stand up comedy*.





5 - 16 Desember 2021

## Seminar Jurnal Ilmiah Perbendaharaan 2021 (Conference on Public Finance and Treasury 2021)

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan Seminar Jurnal Ilmiah Perbendaharaan 2021 (*Conference on Public Finance and Treasury 2021*).

Seminar Jurnal Ilmiah Perbendaharaan 2021 mengusung tema "Pandemi COVID-19: Antara Dampak dan Peluang Meretas Jalan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan Negara yang Lebih Baik".

Tema ini selaras dengan kondisi Pandemi COVID-19 yang sudah hampir 2 tahun melanda dunia. Tujuan dari penyelenggaraan seminar kali ini adalah memberikan *insight* serta cara berpikir dan inovasi baru bagi para pemangku kepentingan dalam menyusun dan mengimplementasikan berbagai kebijakan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan Negara.

21 Desember 2021

## BPPK Raih Dua Penghargaan di Ajang Top Digital Awards 2021

Menjelang penghujung tahun 2021, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) berhasil mendapatkan penghargaan dalam ajang *Top Digital Awards 2021* yang diselenggarakan oleh Majalah ItWorks. Dalam acara puncak yang digelar di Raffles Hotel pada Selasa, 21 Desember 2021, BPPK meraih kategori *Top Digital Implementation 2021 #Level Stars 4* dan *Top Leader on Digital Implementation 2021*.

*Top Digital Awards* ini merupakan *event* penghargaan di bidang Teknologi Digital (IT & TELCO) di Indonesia kepada perusahaan dan instansi pemerintahan yang mendorong peningkatan implementasi dan pemanfaatan solusi digital dalam proses bisnisnya. Kategori *Top Digital Implementation 2021 #Level Stars 4* berhasil diperoleh BPPK melalui pelaksanaan pembelajaran digital yang diterapkan lewat Kemenkeu *Learning Center* (KLC). Kini, KLC semakin berkembang untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dengan menghadirkan generasi keduanya (KLC 2) yang dapat diakses melalui [www.klc2.kemenkeu.go.id](http://www.klc2.kemenkeu.go.id).



KLC juga mendukung kegiatan *knowledge management system* (KMS) dan *learning management system* (LMS) terhadap berbagai pengetahuan tentang keuangan dan kekayaan negara.

Adapun kategori *Top Leader on Digital Implementation* 2021 berhasil diraih melalui Kepala BPPK, Andin Hadiyanto, yang telah berkomitmen mengimplementasikan pembelajaran digital dan manajemen pengetahuan sebagai upaya dalam mewujudkan *learning organization* di lingkungan Kementerian Keuangan.



27 Desember 2021

## Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan BPPK

Pada berbagai kesempatan, Menteri Keuangan menginstruksikan agar seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan menerapkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Selaras dengan instruksi tersebut, BPPK terus berbenah untuk mendapatkan predikat WBK dan WBBM bagi seluruh unit kerja di lingkungan BPPK. Sampai dengan tahun 2021, BPPK memiliki 9 (sembilan) Unit Kerja yang telah mendapatkan predikat sebagai Unit Kerja dengan ZI WBK dari Kemendagri-RB, yaitu

No	Unit Kerja yang Mendapatkan ZI WBK	Tahun Perolehan
1	Pusdiklat Keuangan Umum	2017
2	Pusdiklat Bea dan Cukai	2018
3	Pusdiklat KNPk	2018
4	BDK Yogyakarta	2020
5	BDK Manado	2020
6	Balai Diklat Kepemimpinan	2020
7	Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	2021
8	Sekretariat Badan	2021
9	BDK Cimahi	2021

Sebagai bentuk komitmen BPPK dalam pembangunan ZI WBK dan WBBM, pada 27 Desember 2021, BPPK menyelenggarakan kegiatan “Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan BPPK”. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan apresiasi bagi Unit Kerja yang telah mendapatkan predikat sebagai ZI WBK dan untuk mempersiapkan Unit Kerja lainnya agar mampu memperoleh predikat ZI WBK. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala BPPK, Andin Hadiyanto dan dihadiri oleh jajaran pegawai dari seluruh Unit Kerja di lingkungan BPPK. Dalam sambutannya, Kepala BPPK mencanangkan target bahwa pada tahun 2022, BPPK diharapkan dapat menambah jumlah Unit Kerja yang berpredikat ZI WBK sebanyak 6 (enam) Unit Kerja, yaitu Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial, BDK Medan, BDK Pekanbaru, BDK Palembang, BDK Malang, dan BDK Denpasar. Selain itu, BPPK juga diharapkan dapat memiliki 1 (satu) Unit Kerja yang berhasil memperoleh predikat ZI WBBM yaitu Pusdiklat Keuangan Umum.



# 02

## Profil BPPK

### 02.1

#### Visi, Misi dan Tata Nilai

#### 02.1.1

#### Visi

Visi BPPK Tahun 2020-2024 adalah Menghasilkan SDM pengelola keuangan negara yang Unggul dan Beretika dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan.” Dengan visi ini BPPK berkomitmen untuk terus mencetak punggawa keuangan negara yang tidak hanya memiliki kualitas kompetensi dan kinerja tinggi tetapi juga beretika dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan dan juga Indonesia.

## 02.1.2 Misi

Dalam mewujudkan visinya tersebut, BPPK mendukung Misi Kementerian Keuangan Nomor 5 “Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan sumber daya manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi”. Adapun misi BPPK ditetapkan sebagai berikut:

1. Mengelola pendidikan yang berkualitas tinggi dalam kerangka Kementerian Keuangan *Corporate University*.
2. Memperkuat pelatihan yang berdampak tinggi bagi SDM keuangan negara dalam kerangka Kementerian Keuangan *Corporate University*.
3. Mengembangkan program sertifikasi kompetensi keuangan negara yang berkualitas dan *fit for purposes*.
4. Mewujudkan manajemen pengetahuan keuangan negara yang andal dalam kerangka Kementerian Keuangan *Corporate University*.
5. Mengembangkan sistem tata kelola berbasis *digital* dan manajemen sumber daya yang optimal.

## 02.1.3 Tata Nilai

Tata nilai yang berlaku pada BPPK mengacu pada tata nilai yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011, nilai-nilai Kementerian Keuangan terdiri dari:

1. Integritas: Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar, serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
2. Profesionalisme: Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
3. Sinergi: Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
4. Pelayanan: Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.
5. Kesempurnaan: Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Adapun perilaku utama yang diharapkan dapat dimiliki oleh pegawai Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

Integritas	Profesionalisme	Sinergi	Pelayanan	Kesempurnaan
Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya	Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas	Memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati	Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan	Berwawasan ke depan dan adaptif
Bertindak transparan	Memiliki kepercayaan diri yang tinggi	Berkomunikasi dengan sikap terbuka dan menghargai perbedaan	Menghindari arogansi kekuasaan	Melakukan perbaikan terus menerus
Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela	Bekerja efisien dan efektif	Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik	Bersikap ramah dan santun	Mengembangkan inovasi dan kreatifitas
Bertanggung jawab atas hasil kerja	Bekerja cerdas, cepat, cermat dan tuntas	Berorientasi pada hasil yang memberikan nilai tambah	Bersikap proaktif dan cepat tanggap	Peduli lingkungan
Bersikap objektif	Bekerja dengan hati			

## 02.2

# Sejarah BPPK

## 02.2.1

### Pendidikan Jangka Panjang dan Pendek pada Masa Sebelum BPLK

Sebelum terbentuknya BPLK, Pendidikan dan Pelatihan pegawai Kementerian Keuangan ditangani oleh masing-masing Direktorat Jenderal dan dapat digolongkan menjadi Pendidikan yang dilaksanakan dalam jangka Panjang dan jangka pendek.

#### 1. Jangka Panjang

Pendidikan jangka Panjang terdiri dari:

- a. Akademi Pajak dan Pabean (AP2)
- b. Kursus Thesauri Negara
- c. Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan Negara (STIKN)
- d. Akademi Thesauri Negara (ATN)
- e. Akademi Dinas Pemeriksa Keuangan (ADPK)
- f. Pendidikan Tenaga Akuntan
- g. Akademi Perbendaharaan Negara (APBN)
- h. Institut Ilmu Keuangan

#### 2. Jangka Pendek

- a. Pendidikan dan Latihan di Direktorat Jenderal Anggaran
- b. Pendidikan dan Latihan di Direktorat Jenderal Pajak
- c. Pendidikan dan Latihan di Direktorat Ipeda (Iuran Pembangunan Daerah)
- d. Pendidikan dan Latihan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- e. Pendidikan dan Latihan di bidang Pengawasan Keuangan Negara

## 02.2.2

### Lahirnya Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan (BPLK)

BPLK terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen yang diikuti dengan SK Menteri Keuangan Nomor 405/MK/6/4/1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan yang meliputi:

1. Sekretariat Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan;
2. Pusdiklat Kebendaharaan Umum;
3. Pusdiklat Perpajakan;
4. Pusdiklat Bea dan Cukai;
5. Pusdiklat Pengawasan;
6. Pusdiklat Ipeda dan Pegadaian; dan
7. Pusdiklat Akuntansi Negara atau disebut juga Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).

Dengan lahirnya BPLK, pendidikan dan pelatihan pegawai Kementerian Keuangan yang semula ditangani oleh masing-masing Direktorat Jenderal dipindahkan dan dilimpahkan kepada BPLK. Dalam perjalanannya organisasi BPLK mengalami beberapa kali perubahan mengikuti perubahan lingkungan maupun tuntutan yang harus dihadapi.

## 02.2.3

### Terbentuknya Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)

Tahun 2001, perubahan organisasi BPLK kembali terjadi dengan ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001. Nama BPLK berubah menjadi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dengan susunan Sekretariat Badan, Pusdiklat Pegawai, Pusdiklat Anggaran, Pusdiklat Perpajakan, Pusdiklat Bea dan Cukai, dan Pusdiklat Keuangan Umum. STAN secara status quo tetap berada di BPPK tetapi harus segera menyesuaikan diri dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan selanjutnya kembali terjadi dengan ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, yaitu Sekretariat Badan, Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Pusdiklat Pajak,

Pusdiklat Bea dan Cukai, Pusdiklat Keuangan Umum, dan Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan. STAN secara status quo tetap berada di BPPK tetapi harus segera menyesuaikan diri dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 02.3

# Struktur Organisasi

BPPK mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut BPPK menyelenggarakan fungsi:

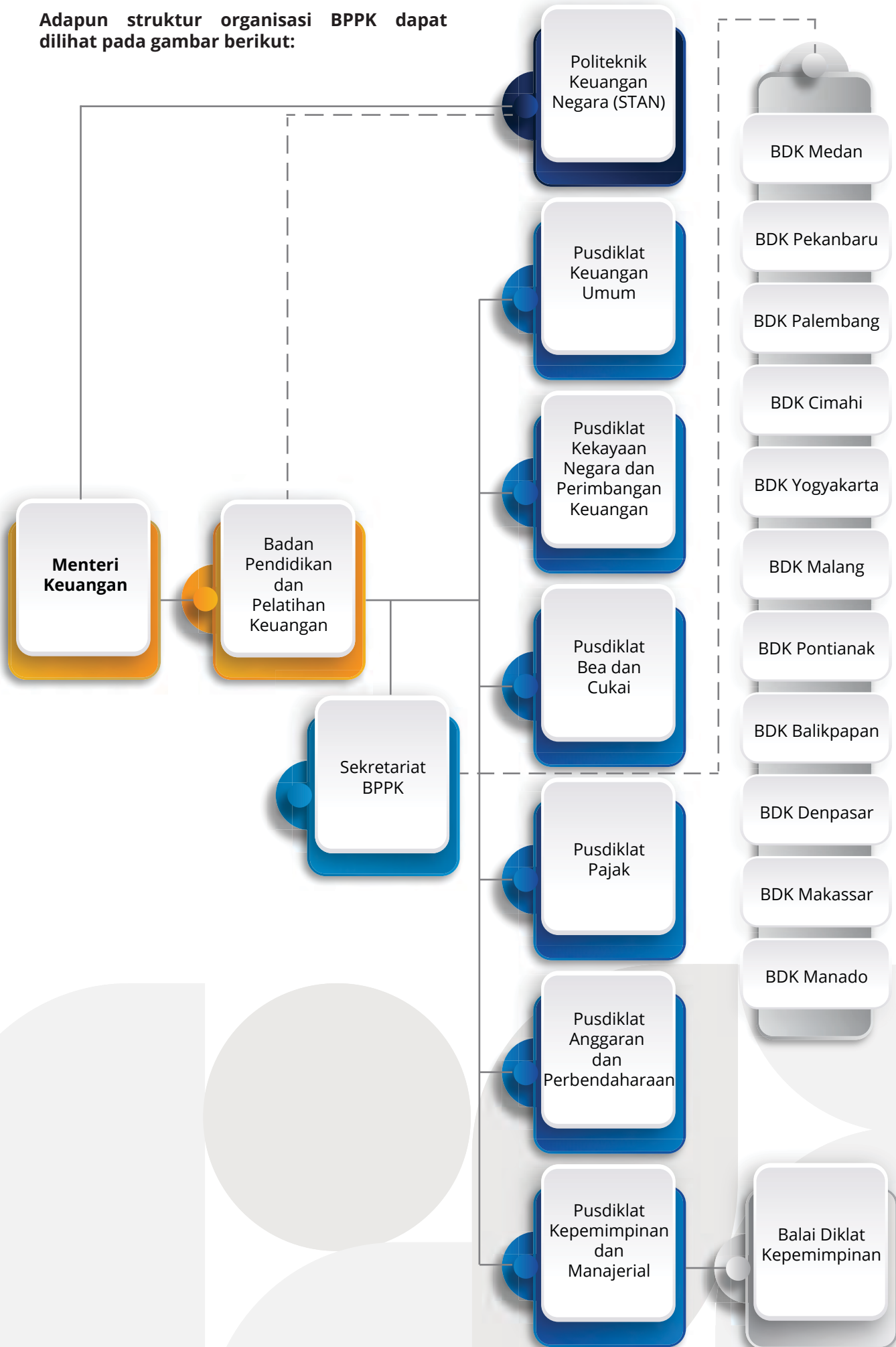
1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara dan manajemen pengetahuan;
2. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara dan manajemen pengetahuan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi, pemanfaatan hasil pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara dan manajemen pengetahuan;
4. Pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan oleh Unit Pusat maupun Unit Teknis di daerah sesuai dengan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; dan
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.



Adapun struktur organisasi BPPK dapat dilihat pada gambar berikut:



## 02.4

# Profil Pejabat



## **Andin Hadiyanto, S.E., M.A., Ph.D.**

Kepala Badan Pendidikan dan  
Pelatihan Keuangan

Lahir di Wonosobo pada tanggal 9 Juni 1965. Menamatkan pendidikan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Gajah Mada pada 1989. Mendapatkan gelar Master of Art (1997) & Doctor of Philosophy (2000) dari Graduate School of International Development Nagoya University, Jepang.

Mengawali karier di Kementerian Keuangan pada 1 Desember 1990. Pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Kebijakan Kerja Sama Internasional (2009-2011), Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (2011-2012), dan Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal (2012). Pada 7 Desember 2018

kembali dipercaya sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional setelah sebelumnya menempati posisi sebagai Direktur Eksekutif Bank Dunia, yang mewakili 11 negara ASEAN di Bank Dunia, Washington DC, pada tanggal 22 Juli 2019 dilantik sebagai Dirjen Perbendaharaan oleh Menkeu, Sri Mulyani Indrawati. Terakhir, Andin Hadiyanto dilantik oleh Sri Mulyani sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan pada 12 Maret 2021 menggantikan Rionald Silaban.



## **Iqbal Islami, Ak., M.B.A.**

Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Lahir di Gunung Sugih pada tanggal 6 Desember 1963. Menyelesaikan jenjang Diploma IV Sekolah Tinggi Akuntansi Negara di tahun 1991 dan meraih gelar Master dari Case Western Reserve University tahun 1994.

Mengawali karier di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada tahun 1985. Diangkat menjadi Widyaiswara Muda STAN tahun 2005, hingga kemudian di tahun 2011 menjadi Widyaiswara Madya pada Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Tahun 2016, Iqbal Islami ditunjuk untuk menduduki jabatan struktural Eselon II sebagai Kepala Pusdiklat Anggaran Perbendaharaan. Kemudian, tahun 2020 diangkat menjadi Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan hingga saat ini.



## **Wahyu Kusuma Romadhoni, S.E., M.Si.**

Kepala Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 20 Juli 1974. Menyelesaikan jenjang Sarjana dari Universitas Gadjah Mada di tahun 2001 dan meraih gelar Master dari Universitas Indonesia tahun 2006.

Mengawali karier di Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun 1995.

Kemudian menjadi Kepala Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berganti nama menjadi Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial pada tahun 2021 hingga saat ini.



## **Bambang Juli Istanto, S.E., M.M.**

Sekretaris Badan Pendidikan dan  
Pelatihan Keuangan

Lahir di Karanganyar pada tanggal 4 Juli 1971. Menyelesaikan jenjang Sarjana dari Universitas Sebelas Maret di tahun 1994 dan meraih gelar Master dari STIE Artha Bodhi Iswara tahun 2008.

Mengawali karier di Kementerian Keuangan pada tahun 1996. Diangkat menjadi Kepala Bagian Keuangan di Sekretariat Badan Pendidikan dan

Pelatihan Keuangan pada tahun 2009. Kemudian menjadi Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan pada tahun 2021 hingga saat ini.



## **Drs. Hario Damar, MBA., Ph.D.**

Kepala Pusdiklat Pajak

Lahir di Jakarta pada tanggal 29 Juni 1962. Menyelesaikan jenjang Diploma III Sekolah Tinggi Akuntansi Negara di tahun 1984, meraih gelar Sarjana dari Universitas Krisnadwipayana tahun 1988, Master dari Saint Mary's University at Halifax dan University of New Brunswick tahun 1996. Gelar Doktor diraih pada tahun 2003 dari Asahi University. Mulai bekerja di Kementerian Keuangan pada tahun 1983. Menduduki berbagai jabatan strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak seperti, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu tahun 2008, Direktur Transformasi

Teknologi Komunikasi dan Informasi tahun 2009, dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur tahun 2011, Hario Damar kemudian menjadi Kepala Pusdiklat Pajak Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tahun 2015 hingga saat ini.



## **Ir. Harry Mulya, M.Si.**

Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai

Lahir di Pangkal Pinang pada tanggal 13 September 1962. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Sriwijaya tahun 1987, dan gelar Master dari Universitas Indonesia tahun 2005.

Mulai bekerja di Kementerian Keuangan pada tahun 1992. Menduduki berbagai jabatan strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai seperti Kepala Kantor Wilayah DJBC Nangroe Aceh Darussalam tahun 2011,

Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara tahun 2012, dan Direktur Penindakan dan Penyidikan tahun 2015. Harry Mulya kemudian menjadi Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tahun 2017 hingga saat ini.



## **Heru Wibowo, S.E., M.A., Ph.D.**

Kepala Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

Lahir di Trenggalek pada tanggal 9 Desember 1971. Menyelesaikan jenjang Sarjana dari Universitas Brawijaya di tahun 1995 dan meraih gelar Master dari International University of Japan tahun 2005. Gelar Doktor diperolehnya dari The University of Western Australia pada tahun 2012.

Mengawali karier di Badan Analisa Keuangan dan Moneter pada tahun 1999. Diangkat menjadi

Kepala Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Penganggaran Risiko Fiskal di Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun 2019. Kemudian menjadi Kepala Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan pada tahun 2021 hingga saat ini.



## **Heni Kartikawati, S.Psi., M.A., M.Psi.**

Kepala Pusdiklat Keuangan Umum

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 18 Desember 1970. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1995. Jenjang pendidikannya berlanjut pada program Master di Nagoya University tahun 2002. Mengawali karier di Kementerian Keuangan pada tahun 1996. Diangkat menjadi Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat BPPK tahun 2008, dan Kepala Bagian Kepegawaian di tahun 2014.

Heni Kartikawati kemudian ditunjuk menjadi Kepala Balai Diklat Kepemimpinan tahun 2017, dan menjadi Kepala Pusdiklat Keuangan Umum pada tahun 2018.



## **Rahmadi Murwanto Ak., MAcc., MBA, Ph.D.**

Direktur PKN STAN

Lahir di Metro pada tanggal 13 Maret 1970. Meraih gelar Master dari Weatherhead School of Management at Case Western Reserve University pada tahun 2001. Jenjang pendidikannya berlanjut pada program Doktorat di Victoria University New Zealand pada tahun 2010.

Mengawali karier di Kementerian Keuangan pada tahun 1990. Diangkat menjadi Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat BPPK pada tahun 2014.

Kemudian diangkat sebagai Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN pada tahun 2016.

Sempat menjabat sebagai Kepala Balai Diklat Keuangan Yogyakarta pada tahun 2020, Rahmadi Murwanto kemudian ditunjuk kembali menjadi Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN pada tahun 2021 hingga saat ini.



**Frisda Agriani Ambarita, S.E., Ak.**  
Kepala BDK Medan



**Arfiansyah Darwin, S.E., M.M.**  
Kepala BDK Pekanbaru



**Ahmad Rus'an, S.E., Ak.**  
Kepala BDK Palembang



**Ririn Mardiyani, S.E., M.Si.**  
Kepala BDK Cimahi



**Unggul Kusawan  
Respatiadi, S.E., M.Si.**  
Kepala BDK Yogyakarta



**Endang Widajati, S.E.**  
Kepala BDK Malang



**Marianto, S.E., Ak.**  
Kepala BDK Pontianak



**Ahmad Fatkhur, S.E., M.M.**  
Kepala BDK Balikpapan



**Endang Pancawardani,  
S.S.T., Ak. S.Tr.Ak M.Sc.**  
Kepala BDK Denpasar



**Suyuti, S.E, M.M.**  
Kepala BDK Makassar



**Cucu Pujasetia, SE**  
Kepala BDK Manado



**Z. Imtihan, S.S. ,M.A.**  
Kepala BD Kepemimpinan



# 03

## Sumber Daya Manusia

### 03.1

### Profil Sumber Daya Manusia

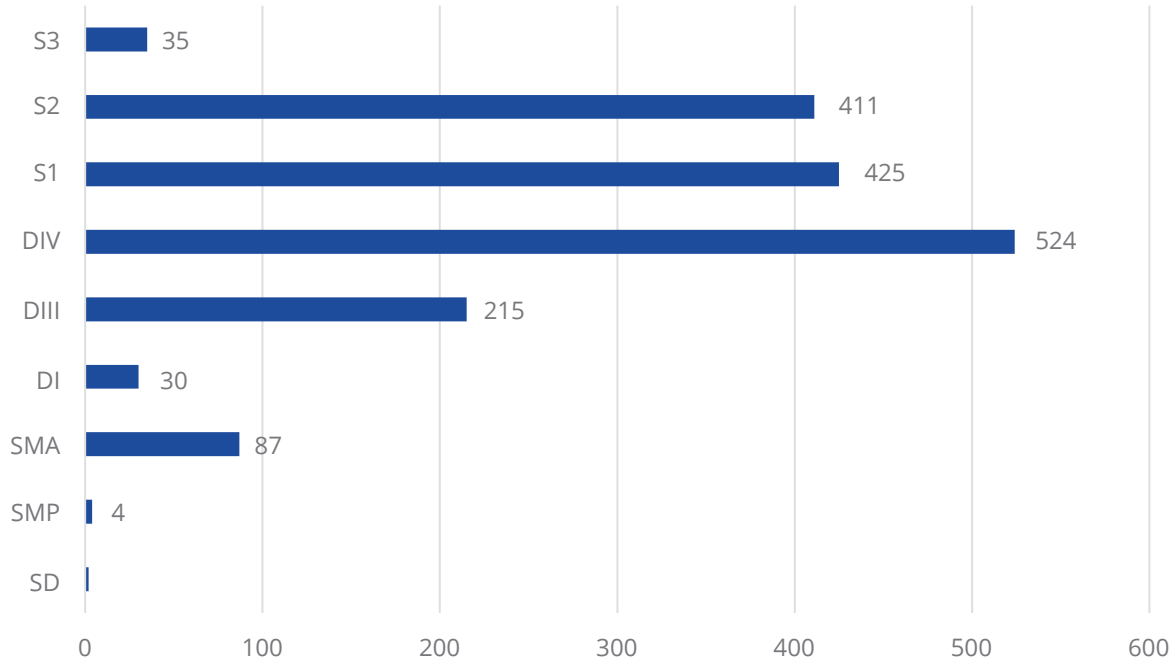


Gambar 1: SDM BPPK Berdasarkan Unit Kerja



Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu komponen yang sangat berperan penting dalam berjalannya suatu organisasi. Pada akhir tahun 2021, BPPK tercatat memiliki pegawai sebanyak 1308 pegawai yang tersebar di 8 Unit Eselon II dan 12 Balai Diklat.

Gambar 1 menggambarkan profil SDM pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) per 31 Desember 2021.



Gambar 2: SDM BPPK Berdasarkan Pendidikan

SDM BPPK diperkuat juga dengan jenjang pendidikan yang beragam yang dimiliki pegawai. Untuk pegawai yang telah menempuh pendidikan Doktor, jumlahnya mencapai 35 orang (2,7%). Sedangkan pegawai dengan tingkat pendidikan Pascasarjana, jumlahnya mencapai 411 orang (31,4%), Sarjana/Diploma IV sebanyak 524 orang (40,1%), Diploma III sebanyak 215 orang (16,4%), Diploma I sebanyak 30 orang (2,3%), SMA sebanyak 87 orang (6,7%), SMP sebanyak 4 orang (0,3%), dan selebihnya adalah jenjang pendidikan SD yang kini hanya tinggal 2 orang saja (0,2%).

Bisa ditarik kesimpulan secara awal bahwa pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana/Diploma IV merupakan tingkat pendidikan yang paling dominan yang dimiliki pegawai BPPK (40,1%) dan disusul dengan Pendidikan Pascasarjana (31,4%). Melihat dari jenjang pendidikan yang dimiliki pegawai di BPPK ini, BPPK memiliki SDM yang unggul terutama dari segi pendidikan.



**3%**

Baby Boomers  
38 Orang



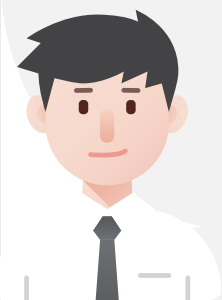
**35%**

Gen X  
462 Orang



**55%**

Gen Y  
713 Orang



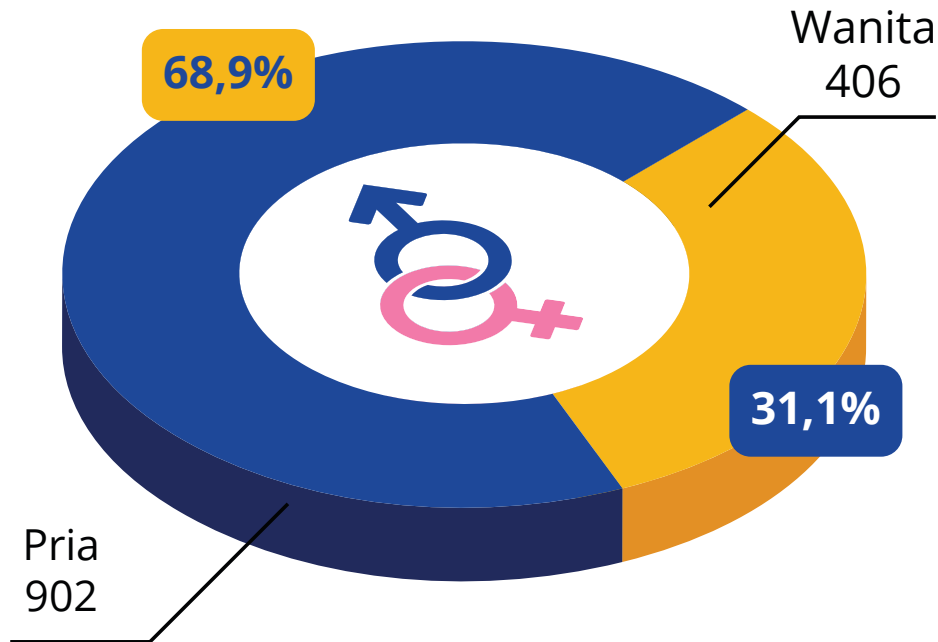
**7%**

Gen Z  
95 Orang

Gambar 3: SDM BPPK Berdasarkan Generasi

Kemajuan suatu organisasi juga bergantung pada pengetahuan dan pengalaman kerja pegawai. Tingkat pengetahuan dan pengalaman setiap pegawai berdasarkan jenjang usia di lingkungan BPPK bisa memberikan kolaborasi kerja sama yang baik di dalam bekerja. Profil SDM BPPK memiliki kelompok usia yang beragam. Kondisi ini tentu bisa menjadi kekuatan organisasi di dalam

membangun pola dan ritme kerja yang selalu mengikuti perkembangan yang ada. Berdasarkan generasinya, pegawai BPPK memiliki jumlah pegawai terbanyak pada kelompok generasi Y yaitu lebih dari 50% keseluruhan pegawai. Kemudian disusul dengan generasi X sebanyak 35% dari total pegawai, 7% dari generasi Z, dan 3% dari generasi Baby Boomers.



Gambar 4: SDM BPPK Berdasarkan Gender

BPPK menerapkan kebijakan pembinaan pegawai yang pro gender, dengan kata lain, BPPK memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatannya secara adil dan setara memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Saat ini berdasarkan data per 31 Desember 2021, perbedaan gender pegawai BPPK terlihat

cukup jauh. Gambar 5 menunjukkan bahwa komposisi pegawai BPPK didominasi oleh Pria yaitu sebanyak 902 orang atau 68,9% dari total pegawai, sedangkan pegawai perempuan hanya mencapai 406 orang atau 31,1% dari total pegawai.



## 03.2

# Pengelolaan Sumber Daya Manusia

## 03.2.1

### Perencanaan SDM

Kebijakan perencanaan SDM di BPPK memedomani Roadmap Pengelolaan ASN Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 sesuai KMK-581/KMK.01/2020. Selain itu, BPPK menerapkan pertumbuhan negatif (*negative growth*) pada jumlah SDM selama periode tahun 2020-2024 sesuai Renstra BPPK tahun 2020-2024. Jumlah pegawai BPPK per 31 Desember 2021 sebanyak 1.308, sedangkan jumlah pegawai per 31 Desember 2020 sebanyak 1.363 sehingga *negative growth*-nya sebesar (-4,04%). Jika dibandingkan dengan jumlah pegawai berdasarkan Rencana Strategis BPPK Tahun 2020-2024 sebesar 1.381 pada akhir tahun 2020 dan 1375 pada akhir tahun 2021 maka pertumbuhan negatif pegawai BPPK lebih tinggi dibandingkan dengan Renstra BPPK tersebut. Adapun strategi pemenuhan kebutuhan SDM BPPK tidak hanya berfokus pada jalur pemenuhan eksternal tetapi juga melalui jalur pemenuhan internal di lingkup Kementerian Keuangan. Jalur pemenuhan eksternal berupa rekrutmen CPNS, Rekrutmen PPPK, Pindah Instansi, dan Seleksi Terbuka, sedangkan jalur pemenuhan internal berupa Manajemen Talenta, Pengembangan Kompetensi, dan Mutasi/Redistribusi/Pindah Jabatan.

Pada tahun 2021, BPPK telah menyusun perencanaan Sumber Daya Manusia berupa pengusulan Formasi Umum (CPNS dan/atau PPPK) sebanyak 26 pegawai dengan rincian 6 (enam) orang lulusan Diploma IV Akuntansi dan 20 orang lulusan Diploma III (7 Diploma III Akuntansi, 10 Diploma III Kebendaharaan Negara, dan 3 Diploma III Manajemen Aset).



## 03.2.2

## Manajemen Talenta

Proses Manajemen talenta diselenggarakan melalui 3 tahap, yaitu penetapan talenta, program pengembangan talenta, dan evaluasi talenta. Talenta BPPK tahun 2021 ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-109/PP/2021 tentang Penetapan *Talent* Jabatan Administrator dan *Talent* Jabatan Pengawas di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun 2021. Berdasarkan Keputusan tersebut, pada tahun 2021, terdapat 47 orang talenta administrator dan 90 orang talenta pengawas.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi talenta untuk dapat menduduki jabatan satu tingkat lebih tinggi, dilaksanakan berbagai bentuk program pengembangan talenta yang meliputi:

1. **Workshop Pra-Mentoring:** Pembekalan mentor tetap dan mentor tidak tetap tentang *mentoring*.
2. **Workshop Transformational Leadership:** Pembekalan talent tentang praktik-praktik kepemimpinan transformasional.
3. **Workshop Pengembangan Kompetensi Manajerial:** Pengembangan Kompetensi dengan tema pengambilan keputusan, kerja sama, dan *managing people*.
4. **E-Learning Mandatory Talent:** Peningkatan kompetensi para talent terkait kompetensi teknis.
5. **Secondment pada Unit Kepatuhan Internal:** Peningkatan kompetensi para talent terkait pemahaman para talent terkait dengan tugas dan fungsi serta lingkup unit Kepatuhan Internal di BPPK.
6. **Coaching & Mentoring:** Peningkatan kompetensi melalui metode *Learning while Working* dengan disertai penyusunan *Individual Development Plan*, Rencana Pengembangan, Jurnal Mentoring, dan Kendali *Mentoring*.

Setelah program pengembangan talenta dilaksanakan, BPPK melakukan proses evaluasi talenta. Evaluasi talenta diperoleh dari hasil capaian kinerja tahun berjalan, peningkatan kompetensi talent selama program pengembangan dan hasil uji kelayakan dan kepatutan. Dari hasil evaluasi talenta diperoleh 47 orang talenta *ready now* untuk Jabatan Administrator dan 84 orang talenta *ready now* untuk Jabatan Pengawas.

## 03.2.3

## Mutasi dan Promosi

Sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai, setiap tahun BPPK melakukan mutasi pegawai, termasuk pada tahun 2021. Mutasi yang melibatkan pegawai BPPK sepanjang tahun 2021 terdiri dari mutasi antar unit eselon I Kementerian Keuangan, mutasi keluar Kementerian Keuangan, dan mutasi antar unit di lingkungan BPPK.

Dari mutasi antar Unit Eselon I Kementerian Keuangan, BPPK mendapatkan 7 orang pegawai baru, namun di sisi lain, BPPK harus melepas 30 orang pegawai untuk melanjutkan tugas di Unit Eselon I lain di lingkungan Kementerian Keuangan. Selain itu, dari proses mutasi masuk/keluar Kementerian Keuangan, BPPK juga harus melepas 2 orang pegawai untuk melanjutkan tugas di luar Kementerian Keuangan. Sedangkan dari sisi mutasi internal, terdapat 185 pegawai yang dimutasi ke unit kerja lain tetapi masih dalam lingkup BPPK.

Selain itu, dalam rangka pengembangan karier pegawai dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, pada tahun 2021, BPPK juga melakukan promosi kepada talenta terpilih yang berhasil melalui proses manajemen talenta. Promosi tersebut meliputi 1 JPT Pratama, 7 Jabatan Administrator, dan 18 Jabatan Pengawas.

### 03.2.4

## Persiapan Purnabhakti

Sebelum memasuki masa pensiun, pegawai BPPK diwajibkan untuk mengikuti Pelatihan Persiapan Purnabhakti. Pelatihan Persiapan Purnabhakti ini dimaksudkan untuk membekali para pegawai dengan persiapan-persiapan yang diperlukan dalam memasuki masa purnabhakti agar memiliki kesiapan mental dan kesehatan serta tetap mampu berkarya di masa purnabhakti. Materi yang didapatkan para pelatihan ini adalah materi mengenai kesehatan fisik dan psikologi, pengelolaan keuangan dan kewirausahaan, jasa keuangan dan perbankan, dan materi observasi bidang usaha dalam menyiapkan masa purnabhakti. Proses pembelajaran dilakukan menggunakan metode jarak jauh dalam rangka optimalisasi akses bagi peserta pelatihan sehingga kegiatan pengembangan SDM dalam kondisi *new normal* dapat tetap berjalan. Pada tahun 2021, terdapat 9 Orang Pegawai yang mengikuti Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) Persiapan Purnabhakti.

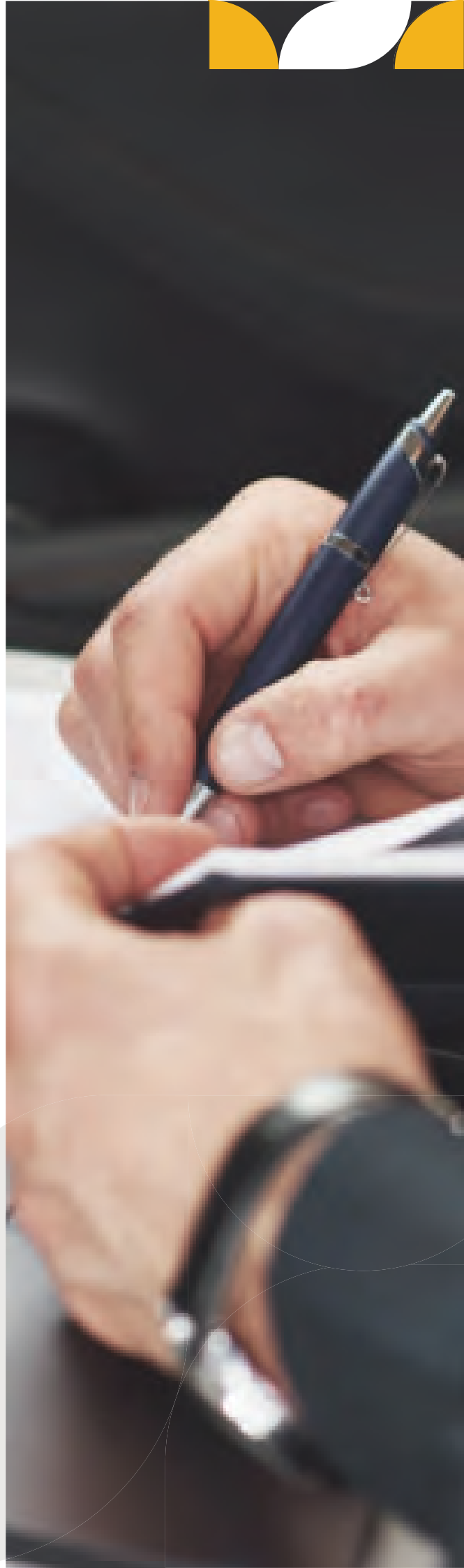
### 03.2.5

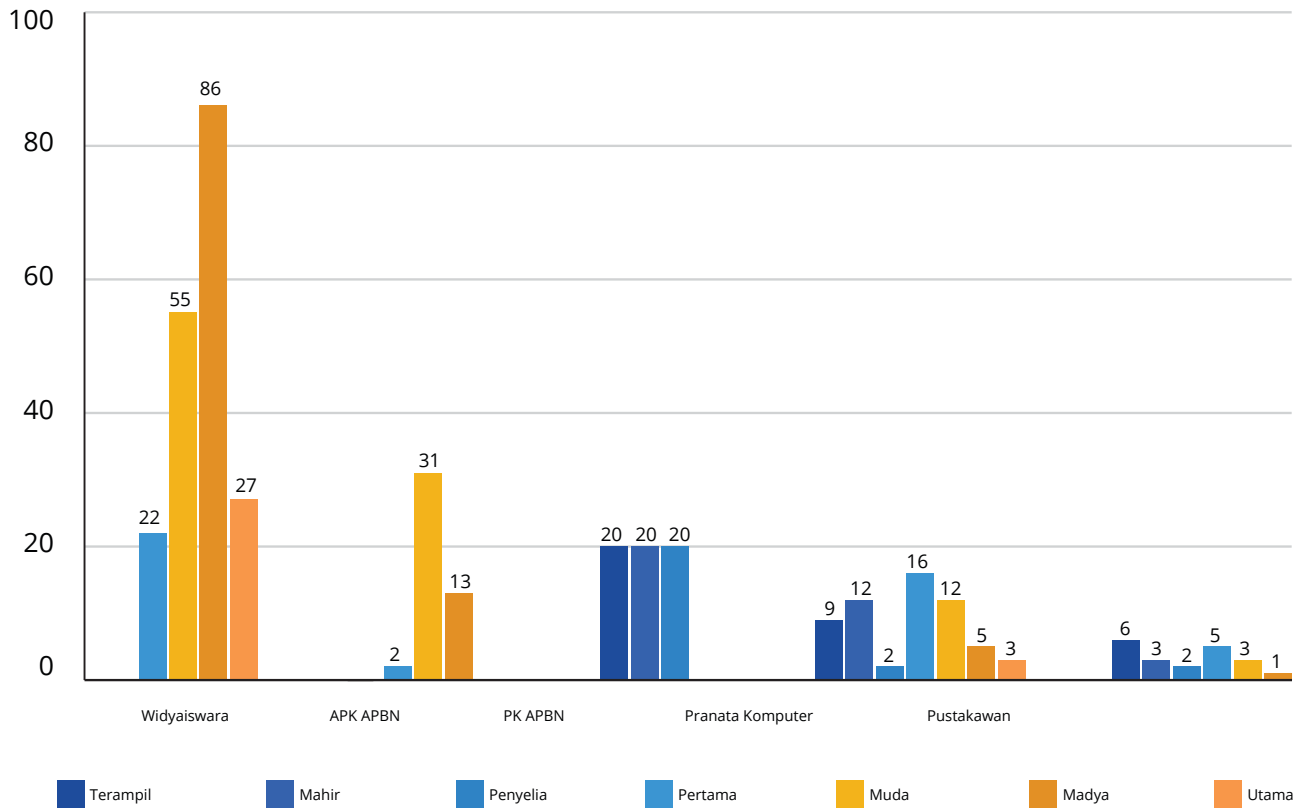
## Pengelolaan Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Keberadaan jabatan fungsional sangat diperlukan oleh BPPK untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

Sepanjang tahun 2021, BPPK telah melakukan peninjauan kembali terhadap kebutuhan jabatan fungsional untuk mendukung kinerja BPPK pasca penataan organisasi. Perhitungan kebutuhan utamanya dilakukan untuk jabatan fungsional inti BPPK, yaitu Widyaiswara. Pada tahun 2021 BPPK juga menghitung kebutuhan jabatan fungsional pendukung lainnya, yaitu Analis Pengelolaan Keuangan (APK) APBN, Pranata Keuangan (PK) APBN, Pranata Komputer, dan Pustakawan sesuai permintaan dari Unit Pembina Internal Jabatan Fungsional (UPIJF) masing-masing jabatan fungsional.

Dari perhitungan kebutuhan tersebut, kebutuhan BPPK terhadap jabatan fungsional adalah sebagai berikut:





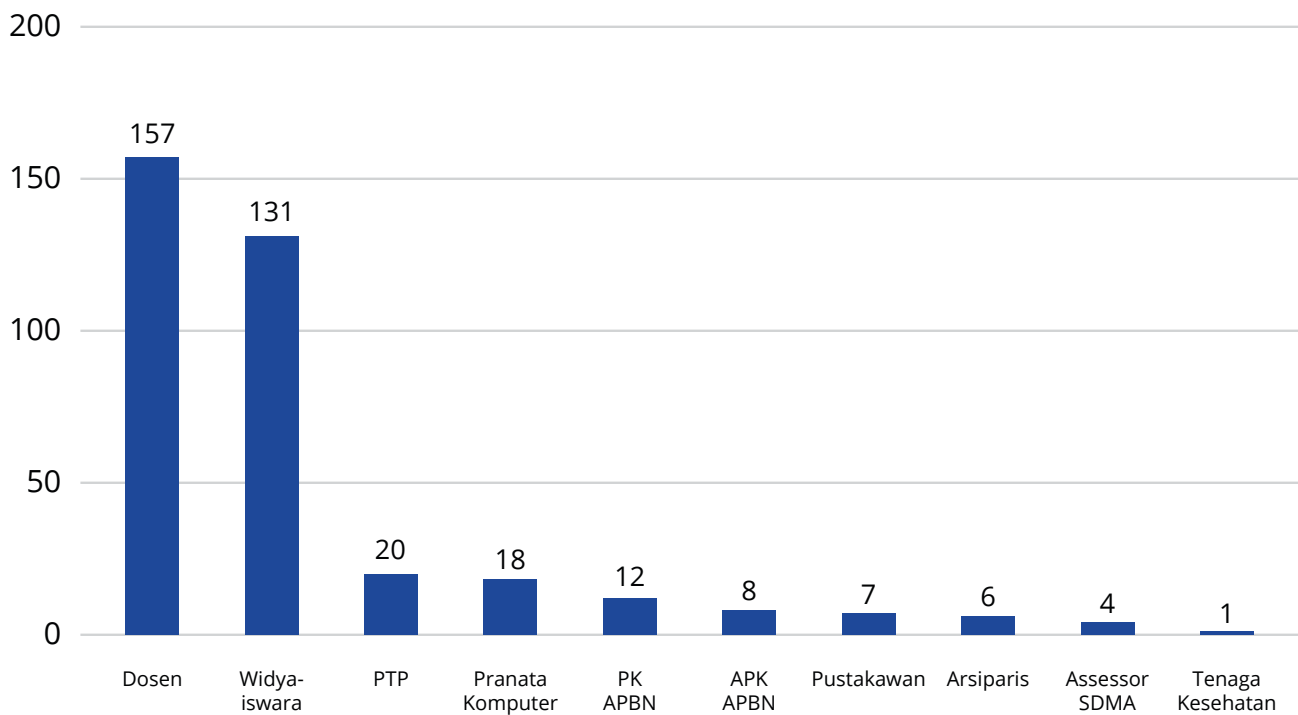
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, terdapat 4 (empat) mekanisme pengangkatan ke dalam jabatan fungsional, yaitu Pengangkatan Pertama, Perpindahan dari Jabatan Lain, Penyesuaian/*Inpassing*, dan Promosi. Selain empat mekanisme sesuai dengan PermenPAN RB tersebut, terdapat mekanisme lainnya seperti kebijakan nasional berupa penyetaraan/*delayering* dari jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional.

Sepanjang tahun 2021, BPPK melakukan pengangkatan pejabat fungsional melalui mekanisme penyesuaian/*inpassing* dan perpindahan dari jabatan lain. Pegawai BPPK yang diangkat menjadi pejabat fungsional melalui mekanisme penyesuaian/*inpassing* pada tahun 2021 mencapai 59 orang, yaitu Jabatan Fungsional PTP, PK APBN, APK APBN, Pustakawan, Arsiparis, dan Pranata Komputer. Selain itu, terdapat 4 (empat) orang pejabat fungsional yang telah diangkat melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain, yang seluruhnya adalah Dosen di lingkungan PKN STAN.

Rekrutmen jabatan fungsional di BPPK, baik untuk mekanisme penyesuaian/*inpassing* maupun perpindahan dari jabatan lain, didahului dengan pelaksanaan seleksi internal. Seleksi internal perlu diselenggarakan untuk mendapatkan calon pejabat fungsional dengan kinerja terbaik, mengingat adanya keterbatasan jumlah formasi setiap jabatan fungsional di BPPK. Pada tahun 2021, seleksi internal dilakukan untuk 4 (empat) jabatan fungsional yaitu Widyaiswara, PTP, Pranata Komputer, dan Arsiparis.

Tindak lanjut dari hasil seleksi internal adalah pengusulan uji kompetensi dan/ atau pengusulan pengangkatan ke Biro SDM untuk Jabatan Fungsional Widyaiswara dan PTP, mengingat UPIJF kedua jabatan fungsional tersebut berada di lingkup internal BPPK. Untuk jabatan fungsional lainnya, BPPK menyampaikan nama pegawai yang telah lulus seleksi internal kepada UPIJF masing-masing untuk diproses lebih lanjut.

Pada akhir tahun 2021, BPPK memiliki 364 orang pejabat fungsional yang terbagi ke dalam 10 (sepuluh) jenis jabatan fungsional.



Grafik Jumlah Masing-Masing Jabatan Fungsional di BPPK

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JF yang berbasis sistem merit, pada tahun 2021, BPPK telah menyusun rancangan Perubahan Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-9/PP/2018 tentang Manajemen Talenta di lingkungan BPPK. Dalam rancangan tersebut salah satunya diatur Manajemen Talenta Jabatan Fungsional. Manajemen Talenta Jabatan Fungsional dalam hal ini adalah untuk kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi. Adapun tahapan Manajemen Talenta Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi calon *Talent* Fungsional;
2. Asesmen calon *Talent* Fungsional, berupa tahapan pengukuran/penilaian penguasaan tingkat kompetensi calon *Talent* Fungsional melalui metode tes tulis, wawancara, assessment center, dan/atau metode lain yang ditentukan;
3. Pengembangan calon *Talent* Fungsional, dilakukan melalui pembelajaran untuk pemenuhan kompetensi yang dinyatakan tidak memenuhi standar kelulusan asesmen kompetensi;
4. Penetapan *Talent* Fungsional, dilakukan terhadap calon *Talent* Fungsional yang dinyatakan lulus asesmen kompetensi.



## 03.3

## Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

## 03.3.1

### Capaian Pembelajaran Pegawai BPPK

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kementerian Keuangan, pegawai memiliki hak untuk mengikuti pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi bagi setiap Pegawai Negeri Sipil dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran (JP) dalam 1 (satu) tahun. Rekapitulasi pemenuhan standar jamlat periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2021 di lingkungan BPPK yang telah memenuhi minimal 20 JP adalah sebesar 99,45%. Data dimaksud diperoleh dari pengembangan kompetensi berupa penugasan pelatihan yang diterbitkan oleh Sekretariat Badan tahun 2021 dan Rekap Pengembangan Kompetensi sesuai dengan PMK Nomor 216 Tahun 2018 yang disampaikan oleh unit. Berikut adalah rincian persentase capaian per unit kerja di lingkungan BPPK:

Unit	Total Pegawai yang sudah Memenuhi	Total Pegawai Keseluruhan*	Presentasi Memenuhi 20 JP
Sekretariat Badan	200	200	100,00%
Pusdiklat Pajak	100	102	98,04%
Pusdiklat KNPK	63	64	98,44%
Pusdiklat Keuangan Umum	78	78	100,00%
Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial	94	94	100,00%

Pada tahun 2021, telah dilaksanakan sebanyak 6.641 penugasan pelatihan, yang terdiri atas pelatihan AKP Reguler dan AKP Insidental Tahun 2021. Beberapa di antaranya merupakan pelatihan mandatori/insidental yang bersifat masif, seperti *E-learning* Manajemen Pengetahuan: Dokumentasi Pengetahuan, *E-learning Flexible Working Space*, *E-learning Integrity and Service Assessment (ELISA)*, Program MKN Tingkat Dasar dan Menengah. Terdapat juga pelatihan yang bersifat *mandatory* untuk jabatan tertentu seperti *E-Learning* Dasar-Dasar *Coaching*, *Mentoring*, dan *Counseling (CMC)* dan Pelatihan Jarak Jauh *Coaching*, *Mentoring*, dan *Counseling (CMC)* yang diperuntukan

untuk Pejabat Eselon III dan Eselon IV serta *E-Learning* Pelatihan Peningkatan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural untuk Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Terampil, dan Jabatan Fungsional Pertama dan Mahir.

Terdapat 1977 rencana penugasan pelatihan reguler periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2021 yang berasal dari hasil AKP Reguler tahun 2021. Berkaitan dengan penugasan atas pelatihan dimaksud, penugasan yang terealisasi adalah sebanyak 99,24% serta terdapat pembatalan 15 penugasan mengikuti pelatihan (0,76%).

## 03.3.2

## Strategi Pengembangan Pegawai BPPK

Pengembangan pegawai dilakukan melalui berbagai bentuk. Di antaranya adalah melalui izin belajar, tugas belajar, dan pembelajaran. Dalam rangka peningkatan kompetensi, para pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dapat melanjutkan pendidikan di luar kedinasan dengan memilih program studi yang dibutuhkan untuk perkembangan organisasi sebagaimana diatur

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.01/2012 tentang Izin Mengikuti Pendidikan di Luar Kedinasan untuk Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan. Selama tahun 2021, terdapat 54 (lima puluh empat) penerbitan Surat Izin mengikuti pendidikan di luar kedinasan dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	DIII	-
2	S1	32
3	S2	7
4	S3	15
<b>Total</b>		<b>54</b>

Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan kepada pegawai untuk menuntut ilmu, mendapat pendidikan atau pelatihan keahlian, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan biaya negara atau dengan biaya oleh instansi pemerintah lainnya, pemerintah negara asing, atau

badan internasional atau badan swasta nasional/internasional, lembaga pendidikan nasional/internasional yang meliputi program DIII, DIV, S1, S2 dan S3.

No	Nama Beasiswa	Lulus Seleksi
1	Beasiswa Bappenas program pascasarjana dalam negeri dan luar negeri tahun 2021	2
2	Beasiswa LPDP Pascasarjana	13
3	Beasiswa Kementerian Komunikasi dan Informasi S2 dalam negeri dan luar negeri	1
4	Beasiswa ( Ministerial- FETA Scholarship) Program S2/S3 Luar Negeri dan Linkage.	7
5	Beasiswa Program Diploma III/Diploma IV PKN STAN Tahun 2021	1
<b>Jumlah pegawai yang diterima</b>		<b>24</b>

Untuk Pengembangan kompetensi pegawai melalui pembelajaran, dilakukan Analisis Kebutuhan Pembelajaran untuk tahun berikutnya. Proses AKP Strategis dan AKP Jabatan/ Individu Tahun 2022 telah dilaksanakan pada tahun 2021. Total program yang dihasilkan pada proses AKP 2022 adalah 135 program, dengan rincian 18 program AKP Strategis, 95 program AKP Jabatan, dan 22 program AKP individu. Total peserta pelatihan hasil AKP 2022 berjumlah 2.379 peserta, dengan rincian asal peserta: 248 peserta dari Sekretariat Badan, 433 peserta dari Balai Diklat, 700 peserta dari PKN STAN, dan 998 peserta dari Pusdiklat.

## 03.4

# Pengawasan dan Penegakan Disiplin

Dasar hukum yang digunakan selama melakukan pengawasan dan penegakan disiplin di lingkungan BPPK yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-5/KMK.01/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/KMK.09/2021 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 258/KMK.09/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.



7. Peraturan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan nomor PER-2/IJ/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan *Profiling* Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan.
8. Surat Edaran Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor SE-1/PP/2021 Tentang Penanganan Benturan Kepentingan dan Area Rawan Gratifikasi di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Upaya peningkatan pengawasan dan penegakan disiplin yang telah dilakukan di lingkungan BPPK antara lain :

1. Mendorong peran Duta Transformasi yang merupakan tim kolaboratif beranggotakan *Change Agent* (pejabat administrator/setingkat eselon III) dan *Lighthouse Team* (pejabat pengawas/setingkat eselon IV dan/atau pelaksana) yang dipilih sebagai panutan (*role model*) bagi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dengan menerapkan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil.
2. Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Utama setiap bulan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya kesalahan karena kekeliruan sehingga bisa terdeteksi lebih dini. Hasil Pemantauan berupa kesalahan minor dan/atau mayor disampaikan dalam bentuk nota dinas. Meskipun catatan hanya minor, namun dapat berkembang menjadi temuan apabila tidak segera ditindaklanjuti.
3. Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilaksanakan setiap semester sebagai implementasi dari aturan yang berlaku. Di mana dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada unit yang dipantau.
4. Ide pelaksanaan Pemilihan Unit Kepatuhan *Internal Award* (Politeknik Keuangan STAN dan Balai Diklat) dan Mitra Unit Kepatuhan *Internal Award* (Pusdiklat) pada saat peringatan hari Anti Korupsi Sedunia di lingkungan BPPK.
5. Terdapat penerbitan kebijakan terkait surat keterangan lupa presensi yang ditandatangani oleh masing-masing pimpinan unit untuk mengurangi jumlah pegawai yang lupa presensi baik monabppk dan atau *mobile e-kemenkeu*.
6. Proses tindak lanjut bagi pegawai yang melanggar disiplin dengan hukuman yang sesuai dengan aturan, yaitu hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.

7. Sosialisasi-sosialisasi terkait pengawasan dan kedisiplinan pegawai yang dilakukan di setiap unit kerja di lingkungan BPPK dengan berbagai tema sebagai cara untuk mengingatkan para pegawai agar lebih *aware* terhadap aturan yang berlaku.
8. Penyusunan *profiling* pegawai sebagai salah satu penguatan integritas dan nilai etika. Selain penyusunan *profiling* yang dilakukan oleh unit Kepatuhan Internal, para atasan juga diharapkan mengetahui profil masing-masing bawahannya sebagai bentuk penerapan *know your employee*. Dengan mengetahui profil pegawai dari tingkat kedisiplinan, gaya hidup, kehidupan bermedia sosial dan hal-hal bersifat pribadi diharapkan ada deteksi dini apabila ada pegawai yang terindikasi rawan pelanggaran disiplin maupun kode etik dan kode perilaku pegawai.
9. Penyusunan *Fraud Risk Scenario* (FRS) yaitu pemetaan proses bisnis disertai dengan potensi adanya tindakan *fraud*. FRS adalah pedoman yang berisikan keterangan potensi *fraud*, skema *fraud*, indikator *fraud (red flag)* dan rencana aksi penanganan. Apabila dalam proses pemantauan pengendalian utama atau pemantauan kode etik dan kode perilaku serta beraktivitas keseharian ada ditemukan indikator-indikator (*red flag*) maka atasan langsung berkoordinasi dengan unit Kepatuhan Internal dapat segera menindaklanjuti dengan pendalaman, pencegahan dan tindakan adanya potensi *fraud* oleh pegawai.
10. Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) untuk mengendalikan Gratifikasi secara transparan dan akuntabel dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

Dari proses pengawasan dan penegakan disiplin di lingkungan BPPK selama tahun 2021, terdapat 5 (lima) laporan terkait penerimaan/penolakan Gratifikasi yang telah diproses oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) BPPK. Selain itu, BPPK juga melakukan pemantauan kode etik dan kode perilaku dilakukan pada tiap semester, yaitu Semester I (periode April s.d Mei 2021) dan Semester II (periode September s.d Oktober 2021). Hasil indikasi pelanggaran kode etik dan kode perilaku menyebutkan bahwa terjadi 30 indikasi pelanggaran dengan rincian pelanggaran disiplin pemanfaatan waktu kerja 28 frekuensi, pelanggaran protokol kesehatan 1 frekuensi, dan penggunaan BMN yang tidak sesuai ketentuan 1 frekuensi.



# 04

## Analisis Kinerja

### 04.1

## Perumusan Kebijakan Pembelajaran

Pada tahun 2021, BPPK masih melanjutkan IS RBTK Kementerian Keuangan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 302/KMK.01/2019 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. BPPK memiliki IS Modern *e-learning* Sebagai Alat Utama Dalam Pengembangan SDM dengan target 70% Implementasi *full e-learning*. Meskipun begitu, Kebutuhan Pembelajaran Klasikal masih tetap dibutuhkan. Proyeksi kebutuhan pembelajaran pada tahun 2021 masih didominasi kebutuhan pembelajaran tatap muka yang merupakan pembelajaran pembentukan karakter yang terakumulasi dari kebutuhan pada tahun 2020 dan tahun 2021.

Terkait hal ini, BPPK telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BPPK Nomor SE-4/PP/2021 tentang Pedoman Pembelajaran Klasikal dalam tatanan baru di Lingkungan BPPK sebagai referensi untuk pembelajaran yang masih harus dilaksanakan secara klasikal.

Dalam rangka pengembangan kompetensi SDM Pengelola Keuangan Negara, BPPK telah melakukan pemenuhan kebutuhan pembelajaran strategis terkait keuangan negara yang merupakan kebutuhan spesifik masing-masing unit eselon I untuk peningkatan kinerja organisasi di Kementerian Keuangan. Selain itu, BPPK juga telah melakukan Inisiasi Pembelajaran Keuangan Negara untuk KLID dan masyarakat umum melalui Kemenkeu *Learning Center* (KLC).

Untuk membangun budaya belajar di lingkungan Kementerian Keuangan, BPPK telah menginisiasi diterbitkannya berbagai ketentuan yang menjadi dasar implementasi *learning organization* (organisasi pembelajar) di lingkungan Kementerian Keuangan. Sedangkan untuk menunjang proses pembelajaran dan retensi aset intelektual, BPPK telah mengembangkan *Learning and Knowledge Management System* di Lingkungan Kementerian Keuangan pada *platform* KLC 1 yang kemudian dimutakhirkan dengan KLC 2 dalam mendukung *platform* pembelajaran yang *agile* dan *ter-update*.

Selain di bidang Pembelajaran, BPPK juga melakukan penguatan di bidang pendidikan vokasi. Penguatan tersebut dilakukan melalui transformasi kelembagaan PKN STAN dan penataan program dan kurikulum pendidikan PKN STAN.



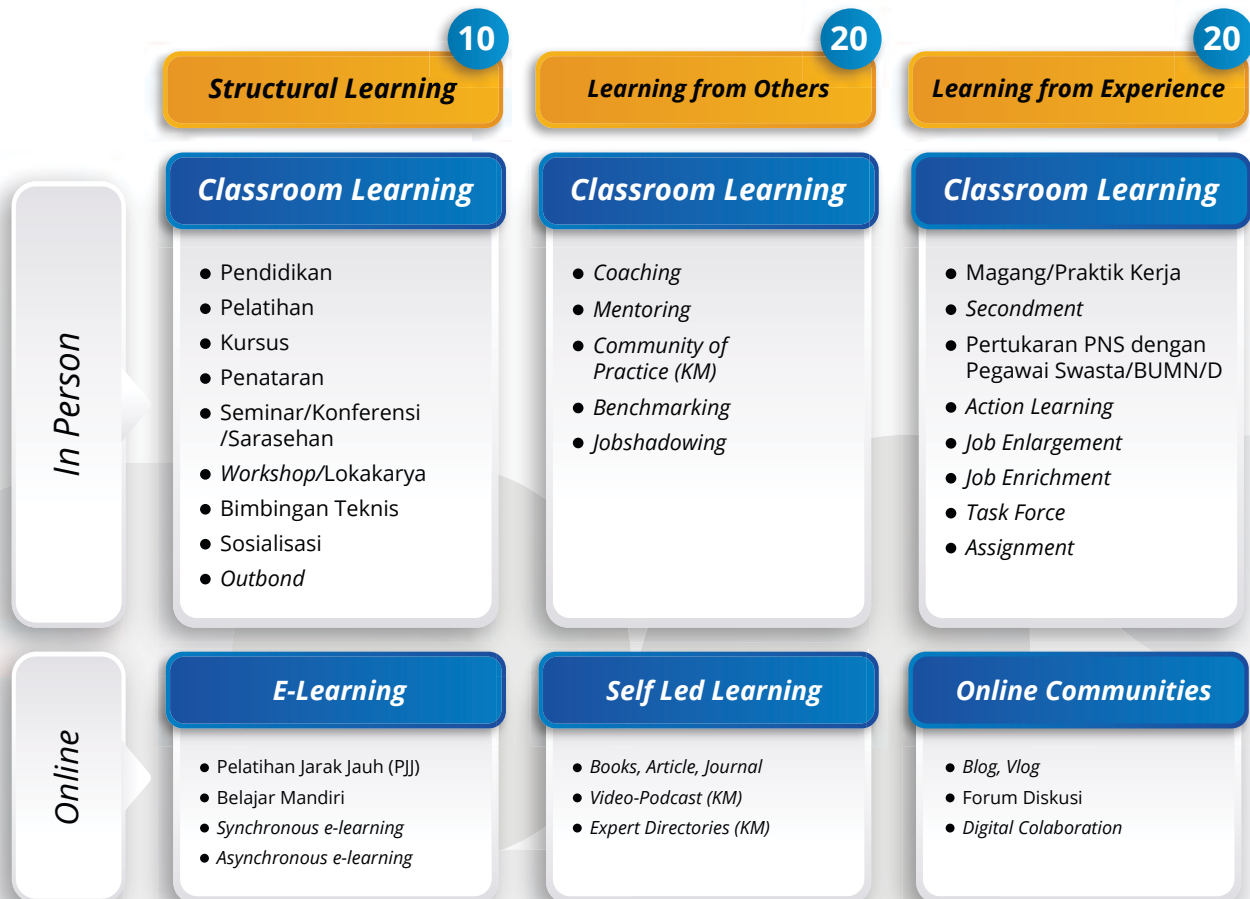
## 04.2

# Pengelolaan Pembelajaran Keuangan Negara

Peran strategis Kementerian Keuangan dalam mengelola keuangan negara perlu didukung dengan sumber daya manusia yang andal, akuntabel, dan kompeten, serta dapat menyelesaikan tugas dengan efektif dan efisien. Salah satu aspek kunci dalam mencetak sumber daya manusia dengan kriteria tersebut adalah dengan menyediakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sejalan dengan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan yang terus digerakkan di Kementerian Keuangan, implementasi *Corporate University* menjadi salah satu tema

sentral dalam inisiatif strategis program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan untuk mengembangkan kompetensi sumber daya manusia dalam rangka pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan.

Kemenkeu Corpu merupakan strategi pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang merupakan bagian dari pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan melalui perwujudan keterkaitan dan kesesuaian antara pendidikan, pembelajaran, dan penerapan nilai-nilai dengan target kinerja yang didukung dengan manajemen pengetahuan (*knowledge management*). Bentuk pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam kerangka Kemenkeu Corpu terdiri atas pendidikan dan/atau pembelajaran. Pendidikan dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar pada pendidikan formal atau pendidikan vokasi yang dilaksanakan oleh Politeknik Keuangan Negara STAN. Sedangkan pembelajaran dilakukan melalui jalur klasikal dan/atau non klasikal dengan pendekatan pembelajaran terintegrasi (10:20:70) yang memanfaatkan ketiga *channel* pembelajaran yaitu *Structured Learning*, *Learning from Others* dan *Learning from Experience*. Berikut ini adalah gambar yang mengilustrasikan model pembelajaran terintegrasi:



Pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Keuangan, bukan hanya merupakan tanggung jawab BPPK sebagai unit pengelola pembelajaran namun seluruh Unit Eselon I sebagai unit pengguna pembelajaran juga memiliki peran yang sangat besar untuk dapat menghasilkan kegiatan pembelajaran yang mampu menunjang pencapaian target kinerja

organisasi. Seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki peran dalam setiap tahapan *learning value chain* yang meliputi *analysis, design, development, implementation, dan evaluation*. Berikut ini adalah gambar yang mengilustrasikan peran Unit Eselon I dalam setiap tahapan *learning value chain*:

## A Analysis

1. Komitmen dalam Analisis Kebutuhan Pembelajaran
2. Keterlibatan dalam *Learning Council Meeting*
3. Keterlibatan dalam menyusun AKP Strategis, Jabatan (kompetensi by SKJ/SKTJ), dan individu
4. Komitmen dalam menyusun dan mengimplementasikan *learning journey*-SKTJ- KLDP

## DD Design & Development

1. Keterlibatan SGO/SME dalam penyusunan Kurikulum (ISD)
2. Keterlibatan SGO/SME dalam penyusunan bahan ajar
3. Keterlibatan dalam implementasi Manajemen Pengetahuan

## I Implementation

1. Berperannya *learning partners* pada setiap Satker/ Unit kerja dalam mengelola kesempatan
2. Mengelola kesesuaian peserta yang dikirim dengan kompetensi yang dilatih (relevan)
3. Keterlibatan SGO/SME dalam *learning delivery*
4. Keterlibatan dalam mengelola *learning from others, learning from experiences*
5. *Leaders as teacher, leaders as coaches, leaders as learning participants*

## E Evaluation

1. Keterlibatan dalam Evaluasi Pembelajaran
2. Keterlibatan dalam pengumpulan data peningkatan perilaku kerja peserta pelatihan (Epaspem Level 3)
3. Keterlibatan dalam pengumpulan data Peningkatan kinerja peserta pelatihan (Epaspem Level 4)
4. Mengelola keterkaitan *learning* dengan pengembangan karier

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam proses peningkatan kapasitas pegawai di Kementerian Keuangan adalah besarnya jumlah pegawai yang membutuhkan pengembangan serta lokasi unit kerja yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pembelajaran tatap muka dirasakan belum maksimal karena hanya menyentuh sebagian kecil pegawai. Dengan semangat efisiensi dan efektivitas pembelajaran, lahirlah *Modern E-Learning*.

*Modern E-Learning* adalah salah satu Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK) Kementerian Keuangan. *Modern E-Learning* merupakan alat utama dalam pengembangan sumber daya manusia. Kebijakan ini hadir untuk menjawab tantangan pengembangan kapasitas pegawai secara masif dengan bantuan TIK. Tujuannya adalah menghasilkan SDM Kemenkeu yang kompetitif melalui proses pembelajaran yang efisien, relevan, aplikatif, berdampak nyata, dan mudah

diakses. Pada pelaksanaannya, *modern e-learning* tidak hanya berupa pembelajaran via KLC, tapi bisa juga melalui *virtual meeting* dan *knowledge sharing* di seluruh unit.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi yaitu mengelola pendidikan, pelatihan (pembelajaran), sertifikasi dan manajemen pengetahuan dalam kondisi darurat pandemi *COVID-19*, BPPK tetap menjalankan protokol kesehatan dan terus melakukan inovasi terhadap layanan yang ada. Hal tersebut sejalan dengan arahan Menteri Keuangan yang menyatakan target kinerja pada perspektif *learning and growth* yang merupakan area layanan BPPK tidak boleh ada perubahan ataupun penurunan target kinerja. Oleh karena hal itu, Kepala BPPK memberikan arahan kebijakan agar BPPK tidak menghentikan layanan, melainkan dengan melakukan adaptasi atau konversi layanan dengan mengoptimalkan *platform digital*.

Untuk memastikan bahwa *stakeholder* menerima layanan dalam kualitas yang terbaik, BPPK mengimplementasikan Manajemen Mutu Pembelajaran. Manajemen mutu pembelajaran di BPPK dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala BPPK Nomor KEP-94/PP/2021 tentang Standar Mutu Pembelajaran di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan Keputusan Kepala BPPK Nomor KEP-97/PP/2018 tentang Penjaminan Mutu Pembelajaran di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala BPPK Nomor KEP-50/PP/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-97/PP/2018 tentang Penjaminan Mutu Pembelajaran di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

## 04.2.1

### Pembelajaran di Bidang Pengelolaan Anggaran dan Perbendaharaan

Dalam rangka mendukung ketercapaian salah satu misi Kementerian Keuangan yaitu “memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif”, BPPK melalui Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan (Pusdiklat AP) menyelenggarakan berbagai kegiatan pembelajaran di bidang anggaran dan perbendaharaan. Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM pengelola keuangan negara agar mampu melaksanakan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, dan akuntabel. Terdapat 4 (empat) kelompok besar program pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat AP yang mencakup penerimaan negara, belanja negara, perbendaharaan dan risiko, serta kebijakan fiskal.

Dari berbagai program pembelajaran yang diselenggarakan oleh Pusdiklat AP, terdapat beberapa program pembelajaran yang menjadi program pembelajaran unggulan di tahun 2021, yaitu Program Pelatihan *Digital Learning* Manajemen Keuangan Negara Tingkat Menengah

dan *E-Learning* Jabatan Fungsional Pranata dan Analisis Pengelolaan Keuangan APBN. Program pembelajaran unggulan merupakan program pembelajaran yang dibutuhkan secara masif dan didesain secara sistematis dalam kerangka *Corporate University* sehingga relevan, aplikatif, berdampak tinggi, dan mudah diakses.

#### 1. Program Pelatihan *Digital Learning* Manajemen Keuangan Negara (MKN) Tingkat Menengah

Pelaksanaan Program Pelatihan *Digital Learning* Manajemen Keuangan Negara Tingkat Menengah dilatarbelakangi perlunya standarisasi kompetensi bagi para pejabat pengelola keuangan negara di seluruh Kementerian/Lembaga demi mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membekali para pegawai Kemenkeu dan K/L Non Kemenkeu dalam memahami dasar-dasar pengelolaan keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setelah mengikuti program pelatihan ini, diharapkan seluruh peserta pembelajaran dapat mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

Program ini memberikan manfaat kepada Pusdiklat AP, Kemenkeu, dan Kementerian lembaga. Bagi Pusdiklat AP, manfaat dari program ini adalah terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam pengembangan kompetensi pengelolaan keuangan negara. Sedangkan bagi Kemenkeu dan Kementerian lembaga lainnya, program ini menyediakan SDM yang kompeten dalam pengelolaan keuangan negara.

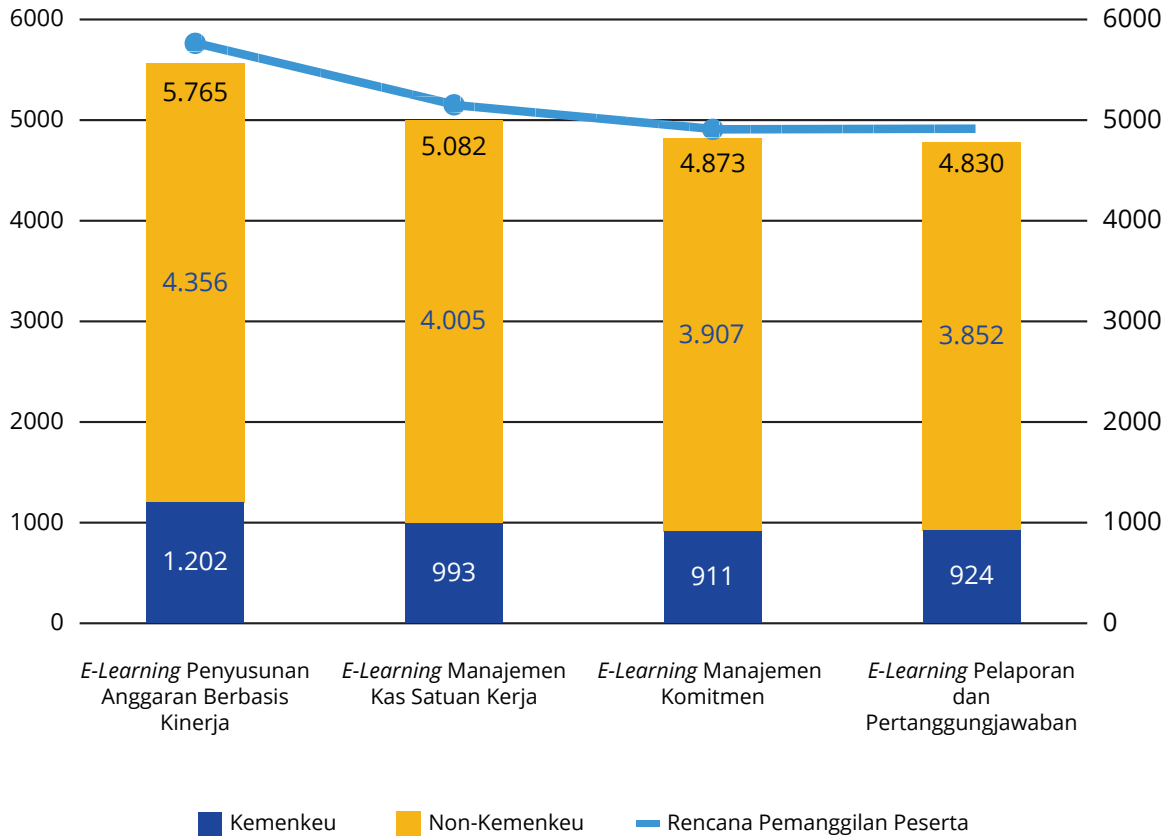
Program *Digital Learning* MKN Tingkat Menengah dilakukan dengan metode pembelajaran digital *e-learning* menggunakan Kemenkeu *Learning Center* ([www.klc2.kemenkeu.go.id](http://www.klc2.kemenkeu.go.id)). Program ini terdiri dari empat bagian yaitu *E-learning* Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja, *E-learning* Manajemen Kas Satuan Kerja, *E-learning* Manajemen Komitmen dan *E-learning* Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Setiap bagian terdiri dari 30 (tiga puluh) jamlat yang terbagi dalam 7 (tujuh) mata pelajaran.



<b>E-learning Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja</b>	<b>E-learning Manajemen Kas Satuan Kerja</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perumusan Indikator Kinerja Penganggaran</li><li>2. Implementasi Standar Biaya</li><li>3. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Kinerja Penganggaran</li><li>4. Diskusi Perumusan Indikator Kinerja Penganggaran, Implementasi Standar Biaya serta <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Kinerja Penganggaran</li><li>5. Penyusunan KPJM</li><li>6. Penyusunan RKA-K/L</li><li>7. Diskusi Penyusunan KPJM dan RKA-K/L</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perpajakan Pelaksanaan Anggaran</li><li>2. Pengelolaan PNBP</li><li>3. Pengelolaan Hibah</li><li>4. Diskusi Perpajakan Pelaksanaan Anggaran, Pengelolaan PNBP, dan Pengelolaan Hibah</li><li>5. Perencanaan Kegiatan dan Kebutuhan Kas</li><li>6. Aplikasi Penarikan Dana</li><li>7. Diskusi Perencanaan Kegiatan dan Kebutuhan Kas serta Aplikasi Penarikan Dana</li></ol>
<b>E-learning Manajemen Komitmen</b>	<b>E-learning Pelaporan dan Pertanggungjawaban</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perpajakan Pelaksanaan Anggaran</li><li>2. Pengelolaan PNBP</li><li>3. Pengelolaan Hibah</li><li>4. Diskusi Perpajakan Pelaksanaan Anggaran, Pengelolaan PNBP, dan Pengelolaan Hibah</li><li>5. Perencanaan Kegiatan dan Kebutuhan Kas</li><li>6. Aplikasi Penarikan Dana</li><li>7. Diskusi Perencanaan Kegiatan dan Kebutuhan Kas serta Aplikasi Penarikan Data</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen Sumber Transaksi Keuangan</li><li>2. Penyusunan Laporan Keuangan</li><li>3. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Kinerja</li><li>4. Diskusi Dokumen Sumber Transaksi Keuangan, Penyusunan Laporan Keuangan, dan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Kinerja</li><li>5. Penyusunan Laporan Kinerja</li><li>6. Kerugian Negara</li><li>7. Diskusi Penyusunan Laporan Kinerja dan Kerugian Negara</li></ol>

Peserta Program Pelatihan *Digital Learning* MKN Tingkat Menengah terbagi menjadi sembilan (9) angkatan di mana angkatan pertama diselenggarakan pada tanggal 1 - 5 Februari 2021 dan angkatan terakhir dilaksanakan pada tanggal 22 - 26 November 2021.

Total peserta program pelatihan ini adalah 20.150 atau 98,05% dari rencana peserta yang dipanggil untuk mengikuti pelatihan. Detail jumlah peserta untuk setiap bagian pelatihan terdapat pada tabel berikut.



Sebaran peserta per unit K/L Non Kemenkeu untuk setiap Program Pelatihan *Digital Learning* MKN Tingkat Menengah yang sudah

dipilih berdasarkan sepuluh besar K/L pengirim peserta terbanyak adalah sebagai berikut.

No	Unit	Realisasi Peserta			
		<i>E-Learning</i> PABK	<i>E-Learning</i> Manajemen Kas Satker	<i>E-Learning</i> Manajemen Komitmen	<i>E-Learning</i> Pelaporan dan Pertanggung-jawaban
1	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	392	349	342	331
2	Kementerian Kelautan dan Perikanan	386	348	338	333
3	Kementerian Kesehatan	331	312	304	298
4	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	203	170	225	221
5	Badan Pusat Statistik	193	175	172	167
6	Mahkamah Agung	173	156	149	148
7	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	147	139	133	129
8	Komisi Pemilihan Umum	141	126	118	117
9	Badan Pemeriksa Keuangan	125	126	126	124
10	Kementerian Luar Negeri	125	116	117	117
<b>Jumlah</b>		<b>2.216</b>	<b>2.017</b>	<b>2.024</b>	<b>1.985</b>

Dari evaluasi level 1, nilai indeks persepsi peserta terhadap penyelenggaraan mencapai 4,52 atau 104,37% dari target 4,33. Sedangkan nilai indeks persepsi peserta terhadap pengajar mencapai 4,57 atau 105,44% dari target 4,33. Berdasarkan hasil nilai indeks tersebut dapat dikatakan bahwa secara umum penyelenggaraan pelatihan dan penyampaian materi oleh pengajar sudah sangat baik. Sedangkan dari evaluasi level 2, nilai akhir untuk Program Pelatihan *Digital Learning* MKN Tingkat Menengah mencapai nilai rata-rata sebesar 90,43. Nilai ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mampu menyerap materi pelatihan dengan baik.

## 2. *E-Learning* Jabatan Fungsional Pranata dan Analisis Pengelolaan Keuangan APBN

Dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan mengembangkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dibentuklah Jabatan Fungsional Pranata dan Analisis Pengelolaan Keuangan APBN. Jabatan fungsional ini tidak hanya terdapat pada Kementerian Keuangan saja namun juga di Kementerian/Lembaga lainnya, sehingga penting untuk memberikan pemahaman dasar-dasar pengelolaan keuangan negara kepada pegawai Kementerian Keuangan

dan Kementerian/Lembaga lainnya yang menduduki jabatan-jabatan fungsional tersebut.

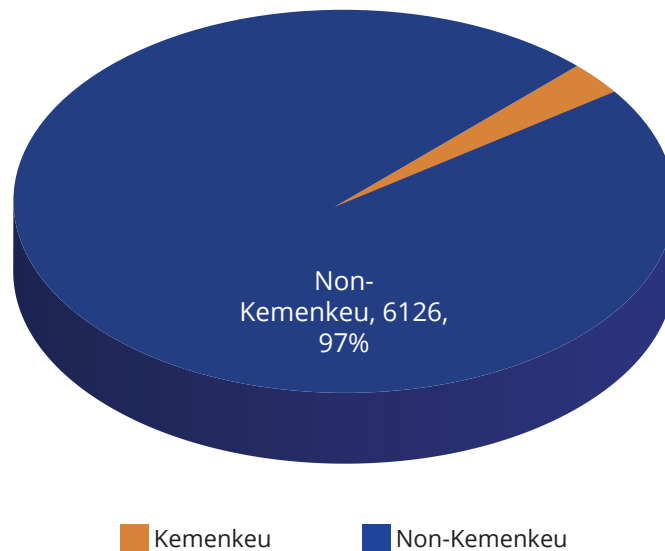
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN dan Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan. Setelah mengikuti program ini peserta diharapkan mampu menyusun konsep dokumen penganggaran satuan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manfaat program ini bagi Pusdiklat AP adalah terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam pengembangan kompetensi pengelolaan keuangan negara. Bagi K/L adalah tersedianya SDM yang kompeten dalam pengelolaan keuangan negara.

Pelaksanaan Program Unggulan Jabatan Fungsional Pengelolaan Keuangan Negara diselenggarakan dengan metode pembelajaran *e-learning* menggunakan Kemenkeu *Learning Center* (KLC) melalui laman [klc2.kemenkeu.go.id](http://klc2.kemenkeu.go.id). Pelatihan ini diikuti oleh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dari seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) yang telah mendaftar. Program pelatihan ini terdiri dari 30 Jamlat dan terbagi menjadi 7 (tujuh) mata pelajaran sebagai berikut.

No	Mata Pelajaran	Jamlat
1	Peraturan di Bidang Perencanaan Pelaksanaan Anggaran	3
2	Peraturan di Bidang Pelaksanaan Anggaran	5
3	Peraturan di Bidang Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan	5
4	Peraturan/Kebijakan di Bidang	7
5	DUPAK	4
6	<i>Adapting to Change</i>	2
7	<i>Analytical Thinking</i>	4
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>

Peserta program pelatihan ini dibagi menjadi sebelas (11) angkatan, dimana angkatan pertama dilaksanakan pada tanggal 31 Mei – 11 Juni 2021 dan angkatan terakhir dilaksanakan pada tanggal 15 – 26 November 2021. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dari

angkatan satu sampai dengan angkatan XI sebanyak 6.293 peserta. Peserta yang berasal dari Kemenkeu sebanyak 167 peserta (3%) sedangkan 6.126 (97%) peserta berasal dari K/L non Kemenkeu seperti tersaji pada grafik berikut ini.



Rincian realisasi per unit K/L Non Kemenkeu untuk *E-Learning* Jabatan Fungsional Pranata dan Analisis Pengelolaan Keuangan APBN yang

sudah dipilah berdasarkan sepuluh besar K/L pengirim peserta terbanyak adalah sebagai berikut.

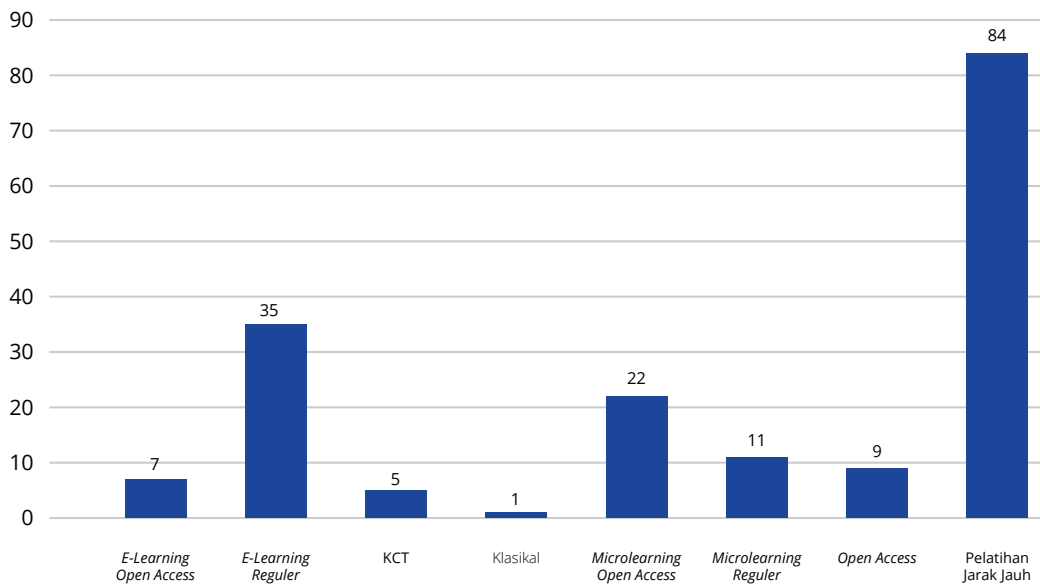
No	Unit	Rencana	Realisasi	Capaian
1	Kementerian Agama	1491	1.412	94,70%
2	Kementerian Kesehatan	902	874	96,90%
3	Kementerian Kelautan dan Perikanan	494	454	91,90%
4	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	320	293	91,56%
5	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	304	285	93,75%
6	Kementerian Pertanian	241	227	94,19%
7	Mahkamah Agung	227	206	90,75%
8	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	206	186	90,29%
9	Badan Narkotika Nasional	167	151	90,42%
10	Komisi Pemilihan Umum	158	148	93,67%
<b>Jumlah</b>		<b>4.510</b>	<b>4.236</b>	<b>93,92%</b>



Dari evaluasi level 1, nilai indeks persepsi peserta terhadap penyelenggaraan mencapai 4,65 atau 107,29% dari target 4,33. Sedangkan nilai indeks persepsi peserta terhadap pengajar mencapai 4,64 atau 105,44% dari target 4,33. Berdasarkan hasil nilai indeks tersebut dapat dikatakan bahwa secara umum penyelenggaraan pelatihan dan penyampaian materi oleh pengajar cukup baik. Sedangkan dari evaluasi level 2 yang diselenggarakan, rata-rata nilai ujian peserta adalah sebesar 88.43. Pencapaian ini dinilai baik dan menunjukkan bahwa peserta telah memahami materi pelatihan dengan baik.

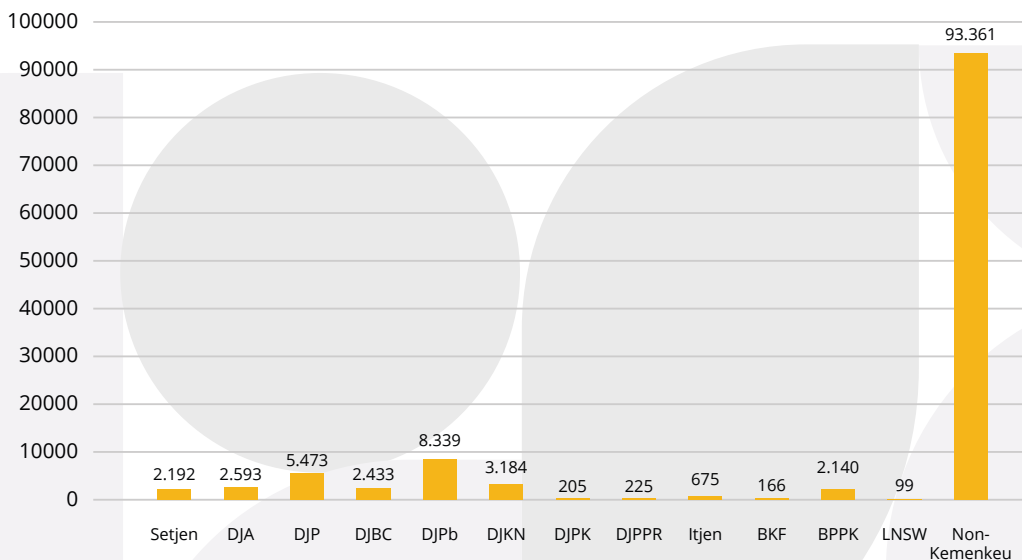
### 3. Program Pembelajaran Lainnya

Selain dua program unggulan yang telah disampaikan sebelumnya, pada tahun 2021, Pusdiklat AP juga menyelenggarakan pelatihan klasikal dan digital terkait beberapa topik pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan jumlah program pelatihan yang diselenggarakan, pada tahun 2021, Pusdiklat AP menyelenggarakan 174 program. Rincian dari program pelatihan yang diselenggarakan dapat dilihat pada grafik berikut.



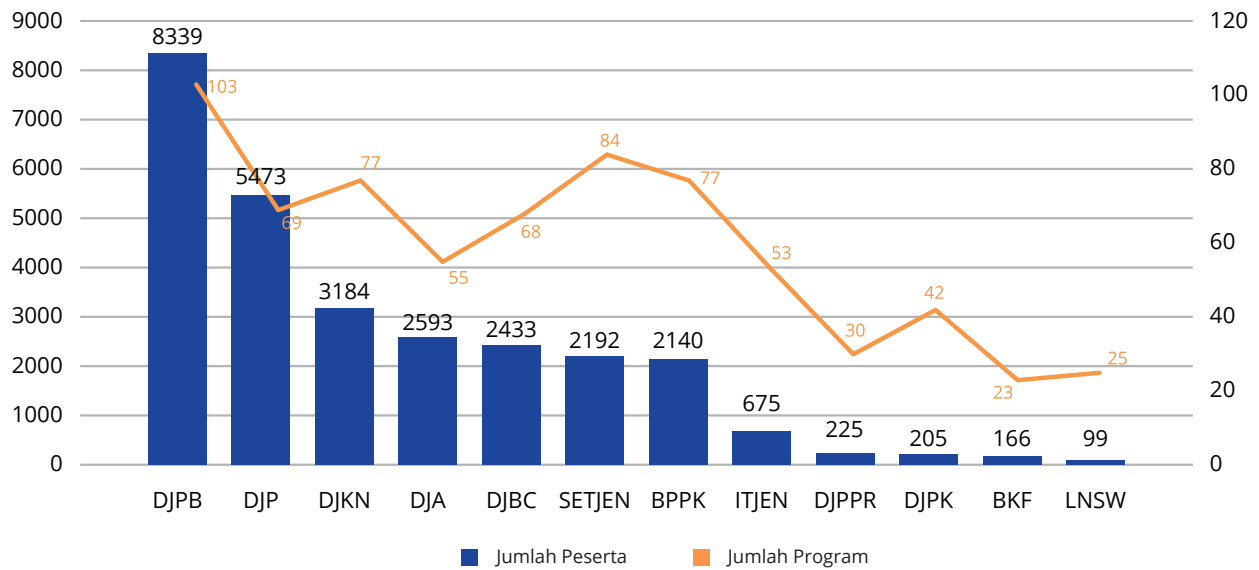
Secara total, Pusdiklat AP berhasil mendidik 121.085 peserta pelatihan. Dari 121.085 peserta, jumlah peserta Kemenkeu sebanyak 27.724 (22,90%) dan peserta K/L Non Kemenkeu sebanyak 93.361 (77,10%).

Adapun jumlah peserta terbesar dari Kemenkeu berasal dari Unit DJPb sebanyak 8.339 peserta atau sebesar 6,90%. Realisasi sebaran peserta pelatihan reguler seperti berikut.



Peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat AP dari internal Kementerian Keuangan berasal dari seluruh unit Eselon I. Secara total, selama tahun 2021, peserta dari Kementerian Keuangan sejumlah 27.724 orang

yang mengikuti 706 pelatihan yang diselenggarakan. Perbandingan jumlah peserta dan jumlah program per Unit Eselon I di Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut.



Dari eksternal Kementerian Keuangan, pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat AP diikuti oleh 93.361 peserta dari 85 Kementerian/Lembaga. Dari jumlah tersebut, Kementerian Agama merupakan kementerian yang mengirimkan jumlah peserta paling banyak yaitu sejumlah 9.718 peserta diikuti dengan

Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di posisi dua dan tiga. Adapun 10 Kementerian/ lembaga yang mengirimkan peserta terbanyak, dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Kementerian/Lembaga	Jumlah Peserta
1	Kementerian Agama	9.718
2	Kementerian Kesehatan	6.295
3	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	4.709
4	Kementerian Kelautan dan Perikanan	4.391
5	Komisi Pemilihan Umum	4.360
6	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	4.230
7	Mahkamah Agung	3.645
8	Badan Pusat Statistik	3.604
9	Badan Pemeriksa Keuangan	3.477
10	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2.634

#### 4. Manajemen Pengetahuan di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

Dalam rangka menunjang pembelajaran di bidang anggaran dan perbendaharaan, pada tahun 2021, Pusdiklat Anggaran dan

perbendaharaan juga melakukan dokumentasi aset intelektual di bidang anggaran dan perbendaharaan. Sebanyak 97 aset intelektual telah berhasil didokumentasikan dan dapat diakses melalui *platform* KMS ([klc2.kemenkeu.go.id/kms/](http://klc2.kemenkeu.go.id/kms/)).

Kategori	Jumlah Aset Intelektual
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	14
Badan Layanan Umum	2
Pelaksanaan Anggaran	2
Pengadaan Barang Jasa	19
Pengelolaan Belanja	23
Pengelolaan PNBK	6
Penyusunan APBN	17
Perbendaharaan dan Risiko	5
Strategi Pembiayaan	9
<b>Total</b>	<b>97</b>

#### 5. Webinar di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

Selain menyelenggarakan pelatihan di bidang anggaran dan perbendaharaan, Pusdiklat AP juga menyelenggarakan beberapa kegiatan seminar virtual atau webinar membahas beberapa topik spesifik terkait pengelolaan keuangan negara dalam bentuk *Kemenkeu Corpu Talk* dan *Open Class*.

Selama tahun 2021, Pusdiklat AP menyelenggarakan 5 (lima) *Kemenkeu Corpu Talk* dan 21 kegiatan *Open Class*. Antusiasme peserta terhadap pelaksanaan webinar ini cukup tinggi yang ditunjukkan dengan banyaknya jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini. Tabel berikut menunjukkan 10 (sepuluh) program webinar yang diselenggarakan oleh Pusdiklat AP dengan jumlah peserta terbanyak.



No	Program Webinar	Realisasi Peserta
1	Kemenkeu <i>Corpu Talk</i> Mempertahankan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah di Tengah Pandemi untuk Kebaikan Negeri	2.850
2	Kemenkeu <i>Corpu Talk</i> Satu Tahun Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran: Capaian, Tantangan, dan Harapan	2.788
3	Kemenkeu <i>Corpu Talk</i> Modernisasi Pengelolaan Kas Negara melalui <i>Digital Payment - Marketplace</i> dalam Rangka Pelaksanaan Belanja Negara: Capaian, Tantangan, dan Harapan	2.578
4	<i>Open Class (AP Corner)</i> Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT): FAQ Memasuki Bulan Desember 2021	1.860
5	Kemenkeu <i>Corpu Talk</i> Penguatan Peran Pengawasan APIP Kementerian/Lembaga dalam meningkatkan <i>Gender Budget Statement</i> dan Implementasi Pengarusutamaan <i>Gender</i>	1.843
6	<i>Open Class (AP Corner)</i> Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2021	1.611
7	<i>Open Class (AP Corner)</i> Peran Konsultan Perencana dan Manajemen Konstruksi/Pengawas Dalam Pekerjaan Konstruksi	1.602
8	<i>Open Class (AP Corner)</i> <i>E-Purchasing</i> Melalui Toko Daring: Implementasi Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021	1.590
9	Kemenkeu <i>Corpu Talk</i> Determinan Kepatuhan Bendahara Pemerintah Dalam Menyetorkan Pajak	1.421
10	<i>Open Class (AP Corner)</i> <i>Building Learning Commitment</i> : Strategi Efektivitas Pembelajaran di Bidang Keuangan Negara	1.076

## 04.2.2

# Pembelajaran di Bidang Pengelolaan Pajak

## PUSDIKLAT PAJAK DALAM ANGKA 2021



**139** Video Knowledge Capture

139 Video yang telah diunggah di Kemenkeu Learning Center (KLC)



**245** Video Self Learning

245 video bedah pasal dan 1022 video soal jawab



**4,63** Indeks Kepuasan (skala 5)

Indeks Kepuasan dilakukan melalui survei yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal bekerja sama dengan Tim Peneliti independen dengan *output* berupa Indeks Kepuasan Publik atas Layanan Kementerian Keuangan



**86,09%**

Alumni Meningkatkan Kinerjanya

86,09% alumni meningkat kinerjanya berdasarkan evaluasi pascapembelajaran level 4 *kirkpatrick* terhadap 3 *sampling* pelatihan



**60.606** Peserta Pembelajaran

60.606 peserta pembelajaran yang berasal dari pembelajaran klasikal, PJJ, *E-learning*, webinar, dan *open-access* baik dari internal maupun eksternal kemenkeu yang diselenggarakan di Pusdiklat Pajak dan Balai Diklat Keuangan di daerah-daerah

Dalam rangka mendukung salah satu misi Kementerian Keuangan yaitu “mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif”, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan melalui Pusdiklat Pajak menyelenggarakan berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang khususnya diperuntukkan bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan aparatur negara lainnya yang berhubungan erat dengan perpajakan. Selama tahun 2021, peserta pembelajaran pada program pembelajaran yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Pajak mencapai 60.606 peserta yang berasal dari pembelajaran klasikal, PJJ, *e-learning*, webinar, dan *open access* baik dari internal maupun eksternal Kementerian Keuangan. Diantara berbagai program pembelajaran yang telah dilaksanakan, terdapat dua program pembelajaran unggulan, yaitu PJJ Lanjutan *Double tax Agreement* dan PJJ Pembekalan *Secondment* Optimalisasi Penerimaan Negara.

### 1. PJJ Lanjutan *Double Tax*

Pemerintah Indonesia mempunyai berbagai perjanjian internasional dengan negara lain, salah satunya adalah *Tax Treaty* yang dikenal juga dengan *Double tax Agreement* atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dalam Bahasa Indonesia. P3B merupakan perjanjian internasional antar dua negara mengenai hak pemajakan masing-masing negara yang dibuat dalam rangka mengurangi pengenaan pajak berganda dan upaya penghindaran pajak. P3B sendiri mempunyai beberapa tujuan yaitu menghindari pajak berganda yang akan membebani dunia usaha, meningkatkan investasi asing, meningkatkan sumber daya manusia (SDM), pertukaran informasi untuk mencegah pengelakan pajak (*tax evasion*), dan menyetarakan kedudukan antar negara.

Penyusunan P3B yang baik idealnya harus mempertimbangkan berbagai macam faktor yang memerlukan sinergi antar kementerian/ lembaga. Untuk membangun sinergi antar kementerian/ lembaga, pada tahun 2020 Pusdiklat Pajak bekerja sama dengan CapaBuild-IBFD (*International Bureau of Fiscal Documentation*) merancang tiga program pelatihan terkait dengan *Double tax Agreement* (DTA). Target peserta dari program pelatihan ini berasal dari delapan kementerian/ lembaga di bidang perekonomian, investasi, perdagangan dan perindustrian yaitu Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Badan Kebijakan Fiskal dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan), Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN dan Kementerian Investasi/BKPM. Mengingat adanya pandemi *COVID-19* yang melanda dunia sejak triwulan satu 2020 hingga saat ini, waktu dan metode penyelenggaraan ketiga program tersebut mengalami penyesuaian. Program pelatihan kerja sama ini didanai oleh negara-negara maju melalui CapaBuild-IBFD, berikut rincian tiga program dimaksud:

#### a. Program A

Program A dengan nama Pelatihan Jarak Jauh *Double tax Agreement* telah diselenggarakan selama tiga hari pada 18, 19 dan 24 Agustus 2020. Pelatihan ini memberi pemahaman yang sama kepada peserta dari kementerian/ lembaga yang berbeda terkait dengan perdagangan, investasi secara umum dalam kaitannya dengan P3B maupun perjanjian internasional lainnya. Pelatihan yang diselenggarakan secara daring ini diikuti oleh delapan kementerian/ lembaga tersebut di atas.

#### b. Program B

Pelatihan teknis selama lima hari dengan tema besar *key issues* (isu-isu utama) P3B disertai dengan *study* kasus P3B dengan konteks Indonesia dilanjutkan dengan berbagi pengalaman dari negosiator P3B baik dari dalam dan luar negeri. Pelatihan Program B lebih spesifik untuk peserta yang nantinya akan menjadi tim yang melaksanakan perundingan perjanjian khususnya Kementerian Keuangan, dalam hal ini Badan Kebijakan Fiskal dan Ditjen Pajak ditambah Kementerian Luar Negeri. Namun, Pusdiklat Pajak juga melibatkan peserta dari kementerian/ lembaga/ instansi lain sebagai observer.



### c. Program C

Pelatihan selama tiga hari berfokus pada kemampuan negosiasi dimana akan banyak dilakukan *role play* dengan target peserta para negosiator perundingan. Program C akan lebih efektif apabila dapat dilakukan secara tatap muka langsung, oleh karena itu pelaksanaan program C akan dijadwalkan kembali melihat kondisi pandemi COVID-19.

Penyelenggaraan Program B didahului dengan FGD Hambatan Non Tarif Dalam Perdagangan Internasional yang dirancang untuk mendapatkan informasi pendukung dalam penyusunan materi pelatihan program B dan juga memberikan penyegaran kembali kepada peserta terkait dengan P3B. Kegiatan rangkaian program B selanjutnya adalah Pelatihan Jarak Jauh Lanjutan *Double Tax Agreement*. Pelatihan ini dimaksudkan untuk menambah pemahaman peserta terkait konsep Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (*Double Tax Agreement*), kendala maupun alternatif solusi dalam implementasi P3B maupun dalam proses perundingan negosiasi, dan *Global Developments and Double Tax Treaties* serta isu-isu kebijakan yang memengaruhinya.

Pelatihan Jarak Jauh Lanjutan *Double Tax Agreement* Tahun Anggaran 2021 diselenggarakan dari tanggal 24 Juni sampai dengan 2 Juli 2021. Jumlah peserta yang direncanakan mengikuti pembelajaran adalah 39 orang. Realisasi peserta yang mengikuti pembelajaran sebanyak 37 orang. Peserta berasal dari Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dari 37 orang yang mengikuti pembelajaran, sebanyak 24 orang pria dan 13 orang wanita.

Hasil dari program pembelajaran ini menggunakan *tools* evaluasi level 1 (*reaction*) yang meliputi evaluasi pengajar dan penyelenggaraan. Evaluasi pengajar adalah penilaian peserta terhadap pengajar dalam kegiatan pembelajaran. Hasil rekapitulasi evaluasi pengajar Pelatihan Jarak Jauh Lanjutan *Double tax Agreement* menunjukkan bahwa rata-rata pengajar mendapat penilaian Sangat Baik yaitu rata-rata indeks penilaian 4,59 dari skala 5.

Evaluasi penyelenggaraan adalah penilaian peserta terhadap butir-butir penyelenggaraan dalam kegiatan pembelajaran. Hasil rekapitulasi evaluasi penyelenggaraan menunjukkan bahwa menurut peserta Pelatihan Jarak Jauh Lanjutan *Double Tax Agreement* telah diselenggarakan dengan Sangat Baik yaitu rata-rata indeks penilaian 4,33 dari skala 5.

## 2. PJJ Pembekalan *Secondment* Optimalisasi Penerimaan Negara

Salah satu inisiatif strategis program Reformasi Transformasi Birokrasi Kelembagaan Kementerian Keuangan adalah Joint Program Optimalisasi Penerimaan Negara oleh DJP, DJBC, DJA, DJKN, dan Inspektorat Jenderal yang diimplementasikan melalui *joint analysis*, *joint audit* dan *joint investigation*. Inisiatif strategis ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan Negara dan penegakan hukum di bidang perpajakan serta kepabeanan dan cukai. DJP, DJBC, DJA, DJKN, dan Inspektorat Jenderal memegang peranan penting dalam menyumbang penerimaan negara melalui sektor perpajakan. Akan tetapi, baik DJP, DJBC, DJA, DJKN, dan Inspektorat Jenderal sering mengalami kendala dalam pelaksanaan tugasnya yang beririsan karena keterbatasan data yang dimiliki. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara keduanya untuk menggali secara optimal potensi penerimaan negara. Pelatihan ini dimaksudkan untuk mewujudkan sinergi sekaligus membekali para *seconded* sebelum melaksanakan tugasnya. Di tahun 2021, terdapat tiga program PJJ Pembekalan *Secondment*, yaitu PJJ Pembekalan *Secondment* DJP-DJBC, PJJ Pembekalan *Secondment* DJBC-DJA, dan PJJ Pembekalan *Secondment* Inspektorat Jenderal.

### a. Program A

Pelatihan ini dimaksudkan untuk membekali para *seconded* Inspektorat Jenderal terkait proses bisnis yang ada di DJP dan DJBC agar para peserta pelatihan mampu mengidentifikasi dan melakukan tugas pengawasan internal Kementerian Keuangan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara melalui program *secondment*. Setelah mengikuti program ini, peserta diharapkan mampu memahami pengawasan, pemeriksaan, penagihan, penanganan keberatan, penerbitan SPKTNP, dan evaluasi putusan dalam perpajakan dengan baik.

Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) Pembekalan *Secondment* Inspektorat Jenderal menggunakan metode Pelatihan Jarak Jauh (tatap muka virtual) yang diselenggarakan melalui *multiple platform* (Zoom, WA Group, Google Docs, Kahoot, atau *platform* lainnya). Pelatihan Jarak Jauh Pembekalan *Secondment* Inspektorat Jenderal Angkatan I Tahun Anggaran 2021 diselenggarakan dari tanggal 9 Juni sampai dengan 10 Juni 2021. Realisasi peserta yang mengikuti pembelajaran adalah sebanyak 13 orang. Pelatihan ini diselenggarakan dengan total 14 jam pelatihan (JP). Mata pelajaran meliputi Pengawasan (2 JP), Pemeriksaan (2 JP), Penagihan (2 JP), Penanganan Keberatan, Banding, dan Peninjauan Kembali (6 JP), dan Evaluasi Putusan (2 JP).

Bentuk evaluasi untuk pelatihan ini adalah evaluasi level 1 (*reaction*) yang meliputi evaluasi pengajar dan evaluasi penyelenggaraan. Evaluasi pengajar adalah penilaian peserta terhadap pengajar dalam kegiatan pembelajaran. Hasil rekapitulasi evaluasi pengajar PJJ Pembekalan *Secondment* Inspektorat Jenderal menunjukkan bahwa rata-rata pengajar mendapat penilaian Sangat Baik yaitu rata-rata indeks penilaian 4,92 dari skala 5. Hasil rekapitulasi evaluasi penyelenggaraan menunjukkan bahwa menurut peserta PJJ Pembekalan *Secondment* DJBC-DJA Angkatan I telah diselenggarakan dengan Sangat Baik yaitu rata-rata indeks penilaian 4,79 dari skala 5.

#### b. PJJ Pembekalan *Secondment* DJBC - DJA

Pelatihan ini dimaksudkan untuk membekali para *secondee* Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Anggaran terkait proses bisnis yang beririsan antara DJP dan DJBC agar para peserta pelatihan mampu mengidentifikasi dan melakukan penggalan potensi perpajakan dan menganalisa proses bisnis yang dapat digabungkan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara melalui program *secondment*. Setelah mengikuti program ini, peserta diharapkan mampu memahami Proses Bisnis DJP, Penegakan Hukum, Ekstensifikasi, PPh, dan PPN dalam perpajakan dengan baik.

Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) Pembekalan *Secondment* DJBC-DJA menggunakan metode

pelatihan jarak jauh (tatap muka virtual) yang diselenggarakan melalui *multiple platform* (Zoom, WA Group, Google Docs, Kahoot, atau *platform* lainnya). PJJ Pembekalan *Secondment* DJBC-DJA Angkatan I Tahun Anggaran 2021 diselenggarakan dari tanggal 27 Mei sampai dengan 3 Juni 2021. Realisasi peserta yang mengikuti pembelajaran adalah sebanyak 196 orang. Peserta berasal dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Anggaran. Pelatihan ini diselenggarakan dengan total 33 jam pelatihan (JP). Mata pelajaran meliputi Proses Bisnis DJP (8JP), Penegakan Hukum (9 JP), Ekstensifikasi (6 JP), PPh (4 JP), dan PPN (4 JP).

Bentuk evaluasi untuk pelatihan ini adalah evaluasi level 1 (*reaction*) yang meliputi evaluasi pengajar dan evaluasi penyelenggaraan. Evaluasi pengajar adalah penilaian peserta terhadap pengajar dalam kegiatan pembelajaran. Hasil rekapitulasi evaluasi pengajar PJJ Pembekalan *Secondment* DJBC-DJA Angkatan I menunjukkan bahwa rata-rata pengajar mendapat penilaian Sangat Baik yaitu rata-rata indeks penilaian 4,69 dari skala 5. Hasil rekapitulasi evaluasi penyelenggaraan menunjukkan bahwa menurut peserta PJJ Pembekalan *Secondment* DJBC-DJA Angkatan I telah diselenggarakan dengan Sangat Baik yaitu rata-rata indeks penilaian 4,6 dari skala 5.

#### c. PJJ Pembekalan *Secondment* Inspektorat Jenderal

Pelatihan ini dimaksudkan untuk membekali para *secondee* Inspektorat Jenderal terkait proses bisnis yang ada di DJP dan DJBC agar para peserta pelatihan mampu mengidentifikasi dan melakukan tugas pengawasan internal Kementerian Keuangan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara melalui program *secondment*. Setelah mengikuti program ini, peserta diharapkan mampu memahami pengawasan, pemeriksaan, penagihan, penanganan keberatan, penerbitan SPKTNP, dan evaluasi putusan dalam perpajakan dengan baik.

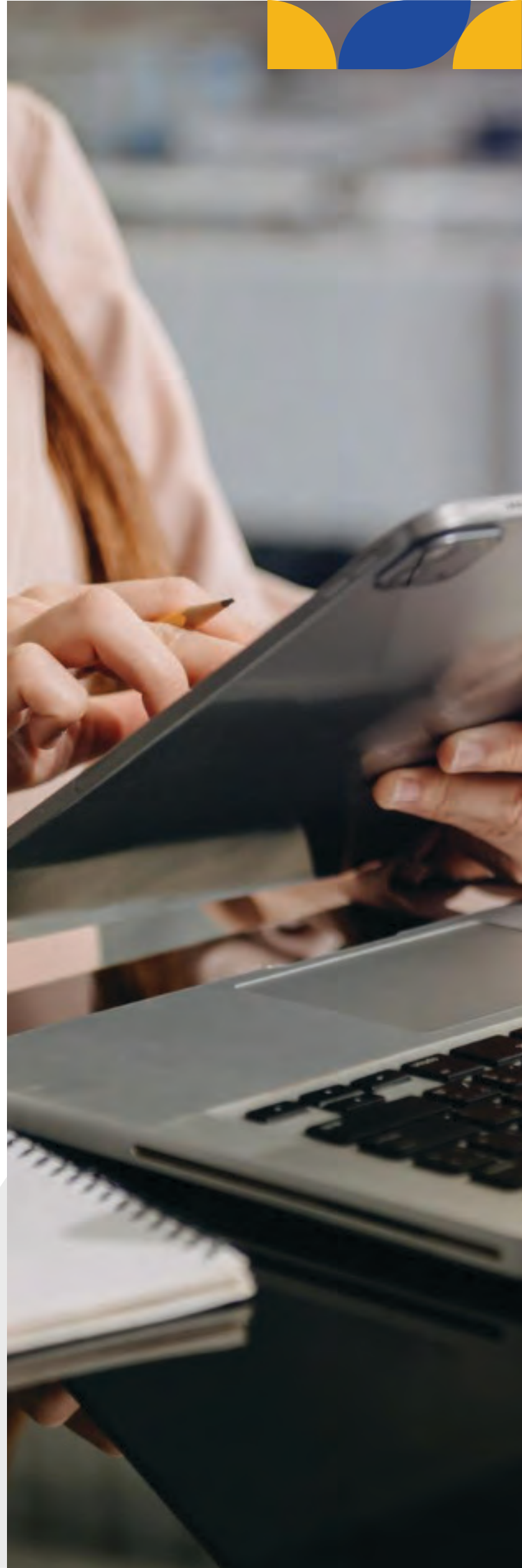
Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) Pembekalan *Secondment* Inspektorat Jenderal menggunakan metode Pelatihan Jarak Jauh (tatap muka virtual) yang diselenggarakan melalui *multiple platform*. (Zoom, WA Group, Google Docs,

Kahoot, atau *platform* lainnya). Pelatihan Jarak Jauh Pembekalan *Secondment* Inspektorat Jenderal Angkatan I Tahun Anggaran 2021 diselenggarakan dari tanggal 9 Juni sampai dengan 10 Juni 2021. Realisasi peserta yang mengikuti pembelajaran adalah sebanyak 13 orang. Pelatihan ini diselenggarakan dengan total 14 jam pelatihan (JP). Mata pelajaran meliputi Pengawasan (2 JP), Pemeriksaan (2 JP), Penagihan (2 JP), Penanganan Keberatan, Banding, dan Peninjauan Kembali (6 JP), dan Evaluasi Putusan (2 JP).

Bentuk evaluasi untuk pelatihan ini adalah evaluasi level 1 (*reaction*) yang meliputi evaluasi pengajar dan evaluasi penyelenggaraan. Evaluasi pengajar adalah penilaian peserta terhadap pengajar dalam kegiatan pembelajaran. Hasil rekapitulasi evaluasi pengajar PJJ Pembekalan *Secondment* Inspektorat Jenderal menunjukkan bahwa rata-rata pengajar mendapat penilaian Sangat Baik yaitu rata-rata indeks penilaian 4,92 dari skala 5. Hasil rekapitulasi evaluasi penyelenggaraan menunjukkan bahwa menurut peserta PJJ Pembekalan *Secondment* DJBC-DJA Angkatan I telah diselenggarakan dengan Sangat Baik yaitu rata-rata indeks penilaian 4,79 dari skala 5.

### 3. Manajemen Pengetahuan di Bidang Perpajakan

Selain pengembangan kompetensi melalui penyelenggaraan program pelatihan, Pusdiklat Pajak juga melaksanakan berbagai upaya untuk dapat mendukung optimalisasi pengelolaan perpajakan nasional dengan mengimplementasikan manajemen pengetahuan. Dengan semakin banyaknya aset intelektual di bidang perpajakan, diharapkan para pegawai DJP maupun aparatur negara lainnya yang berkaitan erat dengan perpajakan mendapatkan referensi atau sumber belajar yang mudah diakses, kapan pun dan di mana pun. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyusun konten berupa video *knowledge capture* tentang perpajakan yang dapat diakses melalui platform *knowledge management system* seperti Kemenkeu *Learning Center* (KLC). Pada tahun 2021, terdapat 139 video *Knowledge Capture* yang telah diunggah di Kemenkeu *Learning Center* (KLC).



Selain itu, Pusdiklat Pajak juga menginisiasi pembuatan Program Video *Self Learning* yang dimaksudkan untuk memfasilitasi pegawai Kementerian Keuangan, khususnya Pegawai DJP, untuk mempelajari peraturan perpajakan secara mandiri dalam bentuk video penjelasan pasal demi pasal dilengkapi dengan latihan soal dan ujian mandiri pada *platform* KLC yang dapat diakses dari komputer, laptop maupun *handphone*, kapan saja dan di mana saja.

Peraturan perpajakan merupakan salah satu alat kerja bagi fiskus yang wajib dipedomani. Untuk mempelajari peraturan perpajakan tersebut, terdapat beragam metode pembelajaran yang dapat dilakukan oleh para pegawai, antara lain dengan mengikuti pelatihan maupun dengan belajar sendiri.

Program *Self Learning* Perpajakan merupakan salah satu alternatif pembelajaran sebagai satu inisiatif strategis Pusdiklat Pajak Tahun Anggaran 2021 yang disusun dalam bentuk video bedah pasal dan bank soal yang menghimpun butir-butir naskah soal dengan tingkatan kognitif (Taksonomi *Bloom*) C1-mengingat, C2-memahami, dan C3-menerapkan, yang mencakup peraturan tentang KUP, PPh, PPn, PBB, dan Bea Meterai dan telah mengakomodasi perubahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan Program *Self Learning*, pegawai dapat belajar sendiri. peraturan melalui video penjelasan pasal-pasal dan pada akhir sesi peserta dapat melakukan ujian mandiri. Peserta akan diberikan informasi hasil ujian mandiri sekaligus mengetahui tingkat profisiensi dalam peraturan perpajakan. Selain itu, peserta dapat mengulang-ulang ujian mandiri untuk menaikkan tingkat pemahaman.



## 04.2.3

## Pembelajaran di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Dalam rangka mendukung salah satu misi Kementerian Keuangan, yaitu “mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif”, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan melalui Pusdiklat Bea dan Cukai menyelenggarakan berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang khususnya diperuntukkan bagi pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan aparatur negara lainnya yang berhubungan erat dengan kepabeanan dan cukai. Kegiatan pengembangan kompetensi tersebut dilakukan dengan berbagai metode yang meliputi pembelajaran secara tatap muka (klasikal), pelatihan jarak jauh (PJJ), *e-learning*, *microlearning*, *open access learning*, dan *open class*. Selain itu, pada Januari 2021, Pusdiklat Bea dan Cukai telah disahkan sebagai *World Customs Organization (WCO) Regional Training Center (RTC) for Asia Pacific Region* yang bertugas memfasilitasi tindak lanjut program WCO di kawasan Asia Pasifik dengan menyelenggarakan program peningkatan kapasitas kepabeanan dan pelatihan di berbagai bidang khusus. Kegiatan RTC Indonesia ini juga sekaligus mempromosikan pembelajaran digital yang dilakukan secara *e-learning*, PJJ, webinar dan *talk show*.

### 1. Pusdiklat BC sebagai *World Customs Organization (WCO) Regional Training Center (RTC) Asia/Pacific*

Proses penetapan Pusdiklat Bea dan Cukai sebagai *World Customs Organization (WCO) Regional Training Center (RTC) Asia/Pacific in Indonesia* merupakan sebuah jalan panjang dan penuh perjuangan. Diawali dengan sebuah rapat persiapan penetapan pada Februari 2018, Pusdiklat Bea dan Cukai melakukan penilaian mandiri atas pemenuhan persyaratan untuk menjadi RTC. Berdasarkan hasil penilaian mandiri tersebut, Pusdiklat Bea dan Cukai kemudian secara berlanjut melakukan perbaikan dan berbagai kegiatan untuk dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan. Beberapa hal yang dilakukan di antaranya mengadakan tambahan sarana dan prasarana,

menyelenggarakan berbagai kegiatan pengembangan kapasitas dalam tingkat regional Asia/Pasifik maupun sub-regional ASEAN, membangun basis data ahli kepabeanan ASEAN bersama-sama dengan negara anggota ASEAN yang lain, mengintensifkan koordinasi dan komunikasi dengan *prominence persons* dalam struktur Sekretariat WCO dan WCO *Regional Office for Capacity Building (ROCB) A/P* dalam rangka mempromosikan rencana penetapan sebagai WCO RTC, pengembangan kapasitas pegawai Pusdiklat BC baik dalam penyelenggaraan pelatihan maupun keterampilan bahasa, melakukan kegiatan kunjungan patok banding ke WCO RTC yang sudah ada, dan berbagai kegiatan lainnya.

Setelah proses persiapan yang panjang dan berdasarkan hasil penilaian mandiri, Pusdiklat Bea dan Cukai merasa persyaratan sebagai WCO RTC telah terpenuhi, pada 25 Oktober 2019, disampaikan surat *Expression of Interest* kepada WCO A/P *Vice Chair*, yang pada saat itu dijabat oleh India. Menyusuli surat tersebut, delegasi Pusdiklat Bea dan Cukai mendapat kesempatan untuk menyampaikan secara langsung rencana strategis Pusdiklat Bea dan Cukai untuk mendukung pengembangan kapasitas pegawai pabean di Asia/Pasifik dalam *29th WCO A/P Regional Contact Point (RCP) Meeting* di Puducherry, India, pada tanggal 18-20 November 2019. Presentasi Pusdiklat Bea dan Cukai mendapatkan sambutan dan dukungan positif dari delegasi yang hadir.

Berbekal banyaknya dukungan yang diperoleh pada *29th WCO A/P RCP Meeting*, Indonesia secara resmi menominasikan Pusdiklat Bea dan Cukai sebagai WCO RTC pada tanggal 29 November 2019. Pandemi *COVID-19* yang melanda dunia pada 2020, menyebabkan forum pengambilan keputusan atas nominasi Indonesia, yaitu forum WCO A/P *Regional Head of Customs Administration (RHCA) Conference* diundur pelaksanaannya pada tanggal 12 November 2020 dan dilaksanakan secara daring. Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai secara langsung menyampaikan kembali kesiapan Pusdiklat Bea dan Cukai untuk ditetapkan sebagai WCO RTC pada *21st WCO A/P RHCA Conference* tersebut dan kemudian disetujui oleh delegasi yang hadir.

Persetujuan dari para pimpinan administrasi pabean Asia/ Pasifik tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU) between World Customs Organization and the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia on the Establishment of World Customs Organization Regional Training Centre in Jakarta, Republic of Indonesia* pada tanggal 29 Januari 2021 antara Sekretaris Jenderal WCO dan Kepala BPPK yang mewakili Kementerian Keuangan RI.

Dengan ditandatanganinya MoU tersebut, maka Pusdiklat Bea dan Cukai telah resmi menjadi WCO RTC dan dimulailah bakti Pusdiklat Bea dan Cukai untuk melayani para pegawai administrasi pabean di wilayah Asia/ Pasifik dalam bidang pengembangan kapasitas, terutama di bidang pengawasan pabean.

Beberapa kegiatan pengembangan kapasitas yang dilaksanakan oleh Pusdiklat BC sebagai RTC adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Tanggal	Narasumber	Peserta
1	<i>International Conference on Digital Transformation in Customs</i>	16-18 Maret	Ibu Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Mr. Baik Hyungmin, Bpk. Nugroho Wahyu Widodo, Mr. Donald Tan Chor Suan, Bpk. Royke Lumban Tobing, Bpk. Agus Sudarmadji, Mr. Gideon Han Ilkwon, Bpk. Heru Hardjanto AP	3.130 peserta (Zoom dan YouTube), dari 19 negara
2	<i>Customs Collage Serie 6: Webinar on Strategic Trade Control Enforcement</i>	16 Juni	Bpk. Andin Hadiyanto, Mr. James McColm, Bpk. R. Tarto Sudarsono	3.130 peserta (Zoom dan YouTube), dari 19 negara
3	<i>Customs Collage Serie 7: Webinar on Authorized Economic Operator 2.0</i>	19 Agustus	Bpk. Andin Hadiyanto, Bpk. Askolani, Ms. Asha Menon	3.130 peserta (Zoom dan YouTube), dari 19 negara
4.	<i>Customs Collage Serie 8: Webinar Trade Facilitation Measure to Address COVID-19</i>	14 Oktober	Bpk. Harry Mulya, Bpk. R.Syarif Hidayat, Mr.Allwyn Netto	3.130 peserta (Zoom dan YouTube), dari 19 negara

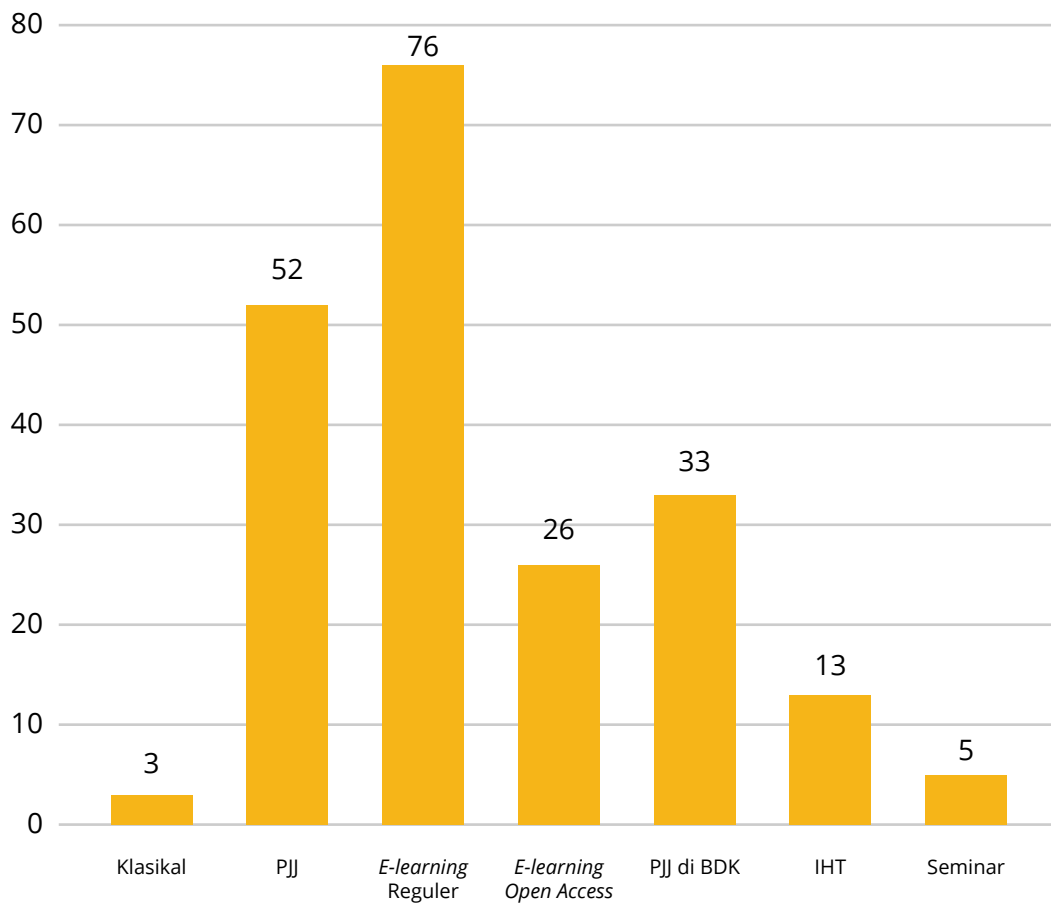
## 2. Capaian Pembelajaran di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Pada tahun 2021, Pusdiklat Bea dan Cukai telah menyelenggarakan sebanyak 162 pelatihan (termasuk lokakarya/ *workshop/ seminar/IHT*) di bidang kepabeanan dan cukai. Kegiatan pelatihan tersebut diselenggarakan

di Pusdiklat Bea dan Cukai sebanyak 3 pelatihan klasikal, 52 pelatihan jarak jauh, 76 *e-learning* dan 26 *open access (e-learning dan microlearning)* dan 5 seminar. Selain itu, terdapat pelatihan yang diselenggarakan di Balai Diklat Keuangan sebanyak 33 pelatihan, dan yang diselenggarakan di kantor unit DJBC sebanyak 13 pelatihan/IHT.



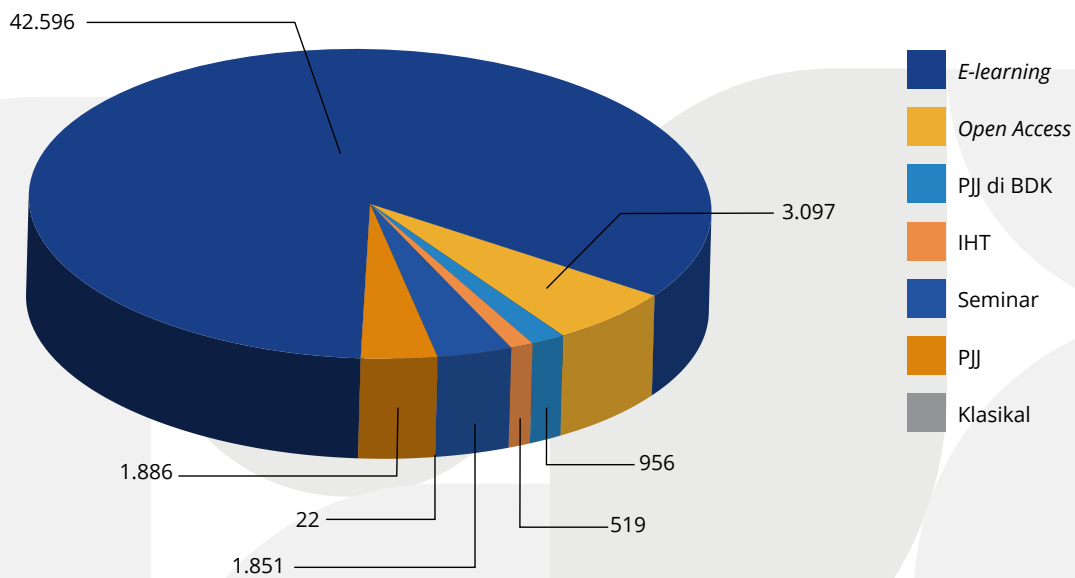
### Jumlah Pelatihan



Dari total 162 pelatihan yang terselenggara, jumlah total peserta pelatihan pada tahun 2021 sebanyak 50.927 peserta. Jumlah peserta tersebut terbagi menjadi 22 peserta

klasikal, 1.886 peserta PJJ, 42.596 peserta *e-learning*, 3.097 peserta *open access*, 956 peserta di Balai Diklat Keuangan, 519 peserta IHT, dan 1.851 peserta seminar.

### Data Jumlah Peserta Pelatihan



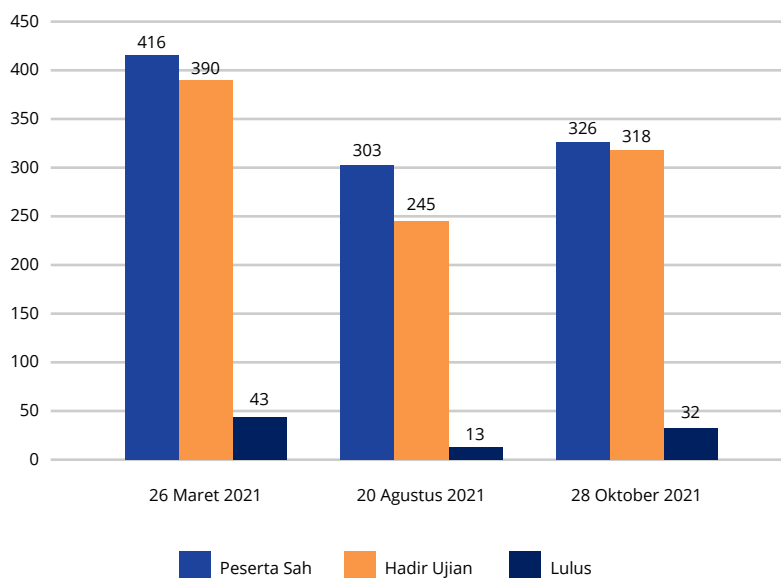


### 3. Sertifikasi Ahli Kepabeanan

Selain menyelenggarakan pelatihan, Pusdiklat Bea dan Cukai juga melaksanakan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan sebagai bentuk sertifikasi bagi ahli pabean sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK 219/PMK.04/2019 tentang Penyederhanaan Registrasi Kepabeanan. Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan (SAK) diselenggarakan sebanyak tiga kali dalam satu tahun anggaran. Jumlah peserta ujian terdaftar pada tahun 2021

sebanyak 1.045 (seribu empat puluh lima) orang, jumlah peserta hadir ujian sebanyak 953 (sembilan ratus lima puluh tiga) orang, dan jumlah peserta yang lulus ujian sebanyak 88 orang (9,41% dari total peserta yang mengikuti ujian). Mengingat kondisi pandemi COVID-19, pelaksanaan ujian SAK yang dilaksanakan secara klasikal tersebut pelaksanaannya dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Data infografis ujian SAK pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

#### Data Ujian SAK 2021



### 4. Kajian Akademis di bidang Kepabeanan dan Cukai

Pusdiklat Bea dan Cukai sebagai salah satu unit eselon II di BPPK turut serta mengimplementasikan kegiatan penelitian, khususnya di bidang kepabeanan dan cukai. Kegiatan penelitian tersebut diharapkan mampu menjadi bahan masukan terhadap kebijakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selain itu, penulisan kajian akademis ini juga dimaksudkan sebagai sarana *continuous learning* para widyaiswara di lingkungan Pusdiklat Bea dan Cukai. Pada tahun 2021, telah berhasil disusun 2 kajian akademis oleh peneliti dari widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai dengan judul:

- a. Evaluasi Penerapan Nilai De Minimis Barang Kiriman di Indonesia (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta).

- b. Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Melalui Inovasi dan Komunikasi Organisasi: Suatu Studi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Kajian akademis ini telah melalui beberapa tahapan, yaitu seminar proposal bimbingan, dan penilaian seminar hasil akhir kajian. Laporan hasil kajian akademis akan diuji oleh para penguji yang memiliki kompetensi ahli terkait substansi maupun metodologi. Seminar Hasil Kajian Akademis merupakan sarana untuk memastikan kajian akademis yang telah dilaksanakan merupakan kajian bermanfaat yang dapat diandalkan hasilnya bagi para pemilik kepentingan.

## 04.2.4

## Pembelajaran di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

### 1. Program Pembelajaran Unggulan di Bidang Perimbangan Keuangan

Dalam rangka mendukung salah satu misi Kementerian Keuangan, yaitu “Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif”, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan melalui Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (KNPK) menyelenggarakan berbagai bentuk kegiatan pembelajaran di bidang perimbangan keuangan. Pembelajaran di bidang perimbangan keuangan diarahkan untuk membangun bidang kompetensi sebagai berikut:

- a. Kompetensi Analis Keuangan Pusat dan Daerah
- b. Kompetensi Keuangan Daerah
- c. Kompetensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- d. Kompetensi Pembiayaan Daerah
- e. Kompetensi Transfer ke Daerah
- f. Kompetensi Umum Perimbangan Keuangan

Pada bidang perimbangan keuangan, pada tahun 2021, Pusdiklat KNPK memiliki 2 (dua) program pembelajaran unggulan, yaitu Pelatihan Jarak Jauh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pelatihan Jarak Jauh Evaluasi Dampak Pandemi terhadap Perekonomian Daerah.

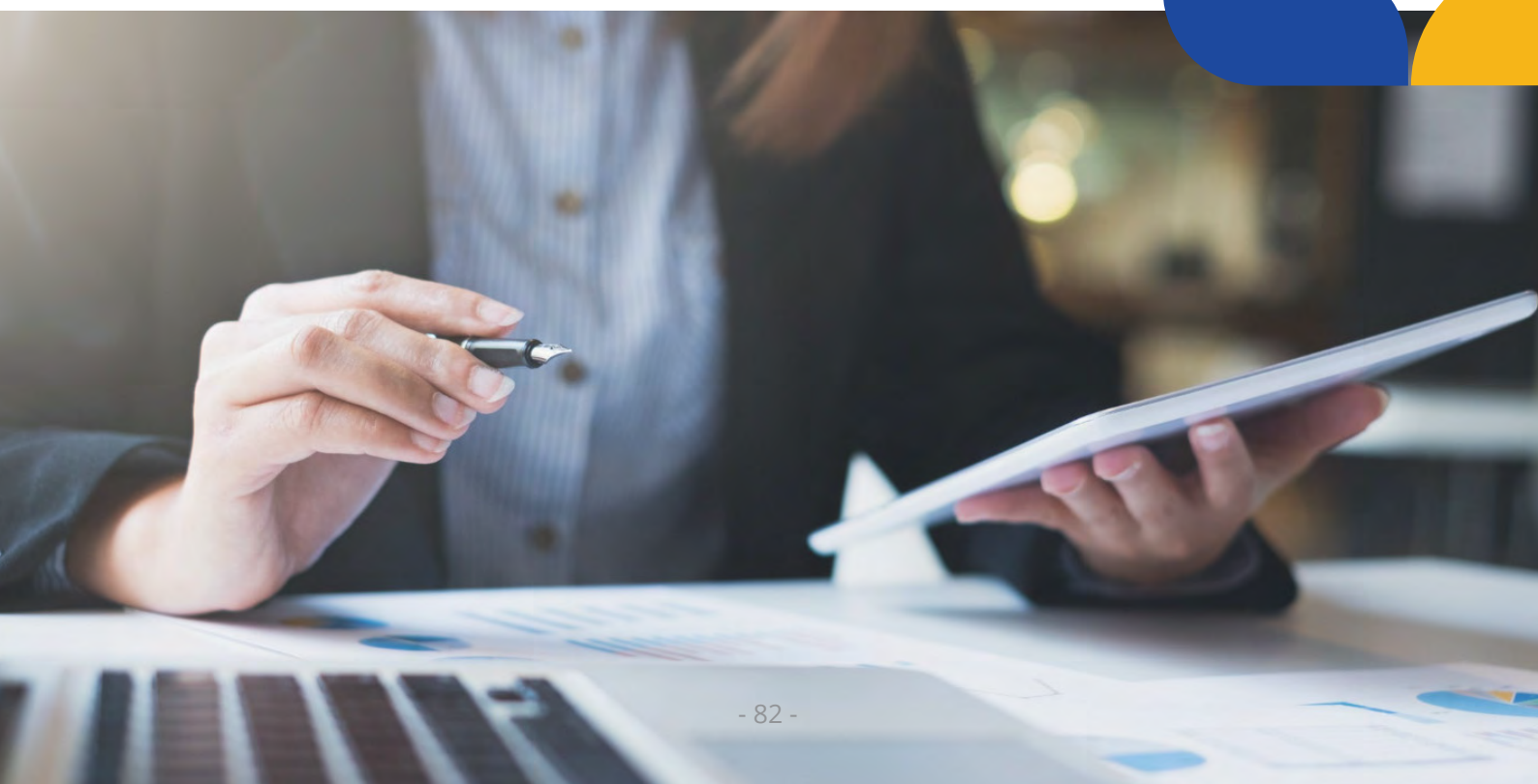
### ■ Pelatihan Jarak Jauh Pengelolaan Keuangan Daerah

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) merupakan salah satu unit Eselon I di Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah, DJPK mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pegawai di DJPK memiliki kebutuhan strategis terkait pemahaman atas pengelolaan keuangan daerah terutama mengenai siklus penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan jenis-jenis Informasi Keuangan Daerah (IKD) yang akan digunakan untuk melakukan analisis dan evaluasi keuangan daerah. Untuk memenuhi kompetensi tersebut, maka Pusdiklat KNPK menyelenggarakan Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pelatihan ini bertujuan agar peserta dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis terkait metodologi penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Informasi Keuangan Daerah, serta Struktur Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Sasaran atau target pelatihan ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Keuangan, terutama yang bekerja di DJPK serta Aparatur Sipil Negara. Pemerintah Daerah yang memiliki tugas untuk melakukan pemantauan dan evaluasi keuangan daerah, pendapatan daerah, belanja daerah serta pembiayaan daerah.



No	Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi	Asal Peserta	Realisasi Peserta	Realisasi Jamlator
1	Pelatihan Jarak Jauh Pengelolaan Keuangan Daerah Angkatan I	1 s.d. 5 Februari 2021	PJJ Pusdiklat KNPK	ITJEN	26	1092
2	Pelatihan Jarak Jauh Pengelolaan Keuangan Daerah Angkatan II	7 s.d. 11 Juni 2021	PJJ Pusdiklat KNPK	ITJEN	16	672
3	Pelatihan Jarak Jauh Pengelolaan Keuangan Daerah Angkatan III	15 s.d. 19 November 2021	PJJ Pusdiklat KNPK	DJPK, BPPK	19	798



Atas program pembelajaran ini dilakukan evaluasi pembelajaran sampai dengan Level 2 yang terdiri dari Evaluasi Level 1, yaitu: Evaluasi Penyelenggaraan dan Pengajar melalui Semantik; dan Evaluasi Level 2, yaitu Ujian Presentasi Penyusunan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara berkelompok (masing-masing kelompok per jenis laporan) dengan waktu maksimal 20 menit per kelompok. Adapun rincian hasil evaluasi dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2. Evaluasi PJJ Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021**

No.	Pelatihan	Rata-Rata Hasil Evaluasi Penyelenggaraan	Rata-Rata Hasil Evaluasi Pengajar	Jumlah Kelulusan Peserta	% Minimal Baik
1	Pelatihan Jarak Jauh Pengelolaan Keuangan Daerah Angkatan I	4,67	4,78	26	100%
2	Pelatihan Jarak Jauh Pengelolaan Keuangan Daerah Angkatan II	4,77	4,95	16	100%
3	Pelatihan Jarak Jauh Pengelolaan Keuangan Daerah Angkatan III	4,77	4,79	19	100%

### **Pelatihan Jarak Jauh Pengelolaan Keuangan Daerah**

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) merupakan unit eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi strategis dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya serta pajak daerah dan retribusi daerah. Pada masa pandemi, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi dan mengurangi penyebaran pandemi, seperti pembatasan perjalanan, *social distancing*, pemberlakuan jam malam, dan pembatasan/penutupan unit usaha. Kebijakan tersebut tentunya akan mengubah perilaku ekonomi masyarakat, termasuk juga di daerah. Oleh karena itu,

peningkatan kompetensi teknis para pembuat kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dan keuangan daerah untuk melakukan evaluasi dampak pandemi terhadap pemulihan ekonomi dan kemampuan keuangan daerah menjadi kebutuhan strategis bagi DJPK. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pusdiklat KNPK menyelenggarakan Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) Evaluasi Dampak Pandemi terhadap Perekonomian Daerah.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi bagi Pejabat Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) dalam melakukan evaluasi dampak TKDD terhadap dukungan pemulihan ekonomi dan pembangunan di daerah di masa pandemi. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis para pembuat/penyusun kebijakan terkait TKDD dan keuangan daerah.

Sasaran atau target peserta terdiri dari pejabat fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah, Pegawai Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer (KPT) dan Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi (ESI),

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Pada tahun 2021, PJJ Evaluasi Dampak Pandemi terhadap Perekonomian Daerah diselenggarakan sebanyak 1 angkatan dengan rincian yang dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3. Realisasi PJJ Evaluasi Dampak Pandemi terhadap Perekonomian Daerah Tahun 2021.**

No	Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi	Asal Peserta	Realisasi Peserta	Realisasi Jamlator
1	PJJ Evaluasi Dampak Pandemi terhadap Perekonomian Daerah	15 s.d. 19 Maret 2021	PJJ Pusdiklat KNPK	DJPK	11	374

Atas program pembelajaran ini, dilakukan evaluasi pembelajaran sampai dengan level 2 yang terdiri dari evaluasi level 1, yaitu: evaluasi penyelenggaraan dan pengajar tertulis, evaluasi tatap muka; dan

evaluasi level 2, yaitu ujian dalam bentuk presentasi kelompok melekat pada mata pelajaran studi kasus. Adapun rincian hasil evaluasi dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4. Evaluasi PJJ Evaluasi Dampak Pandemi terhadap Perekonomian Daerah Tahun 2021**

No.	Pelatihan	Rata-Rata Hasil Evaluasi Penyelenggaraan	Rata-Rata Hasil Evaluasi Pengajar	Jumlah Kelulusan Peserta	% Minimal Baik
1	PJJ Evaluasi Dampak Pandemi terhadap Perekonomian Daerah	4,56	4,71	11	100%

## 2. Program Pembelajaran Unggulan di Bidang Kekayaan Negara

Dalam rangka mendukung salah satu misi Kementerian Keuangan, yaitu “mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum”, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan melalui Pusdiklat Kekayaan

Negara dan Perimbangan Keuangan (Pusdiklat KNPK) menyelenggarakan berbagai bentuk kegiatan pembelajaran di bidang kekayaan negara. Pembelajaran di bidang kekayaan negara diarahkan untuk membangun bidang kompetensi sebagai berikut:

- Kompetensi Barang Milik Negara
- Kompetensi Hukum
- Kompetensi Lelang
- Kompetensi Penilaian
- Kompetensi Piutang
- Kompetensi Kekayaan Negara Dipisahkan
- Kompetensi Kekayaan Negara Lain-lain
- Kompetensi Umum Kekayaan Negara

### ■ Pelatihan Jarak Jauh Optimalisasi Barang Milik Negara

Dalam rangka lebih mendayagunakan BMN dan untuk mendukung peran baru DJKN sebagai *Revenue Center*, perlu adanya akselerasi menciptakan mekanisme peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Untuk itu, diperlukan strategi pengelolaan BMN, baik di sisi pengelola barang maupun di sisi pengguna barang. Strategi pendayagunaan BMN menjadi pemicu optimalisasi BMN untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi sekaligus menjadi sumber PNBP. Optimalisasi BMN dilakukan beriringan antara penggunaan dengan proses bisnis pengelolaan BMN lain dalam bentuk pemanfaatan BMN. Untuk mendukung pelaksanaan optimalisasi BMN, diperlukan pelatihan untuk mempersiapkan pegawai yang memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis dalam mengoptimalkan

Pada bidang kekayaan negara, pada tahun 2021, Pusdiklat KNPK memiliki dua program pembelajaran unggulan, yaitu Pelatihan Jarak Jauh Optimalisasi Barang Milik Negara dan Pelatihan Jarak Jauh Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Pelaporan Transaksi Lelang.

pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) melalui pemanfaatan BMN.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis dalam mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) melalui pemanfaatan BMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sasaran atau target peserta pelatihan adalah Aparatur Sipil Negara yang terkait bidang tugas pengelolaan BMN, di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Pengelola Barang).

Pada tahun 2021, PJJ Optimalisasi Barang Milik Negara diselenggarakan sebanyak 1 angkatan dengan rincian yang dapat dilihat pada Tabel 5.

**Tabel 5. Realisasi PJJ Optimalisasi Barang Milik Negara Tahun 2021**

No.	Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi	Asal Peserta	Realisasi Peserta	Realisasi Jamlator
1	PJJ Optimalisasi Barang Milik Negara	5 s.d. 14 April 2021	PJJ Pusdiklat KNPK	DJKN	22	1232

Atas program pembelajaran ini, dilakukan evaluasi pembelajaran sampai dengan level 2 yang terdiri dari evaluasi level 1, yaitu: evaluasi penyelenggaraan dan pengajar melalui Semantik; dan evaluasi level 2, yaitu evaluasi hasil pembelajaran berupa ujian komprehensif dalam bentuk

penyelesaian studi kasus terkait optimalisasi BMN dilaksanakan dalam waktu 120 menit s.d. 180 menit yang dilaksanakan setelah seluruh mata pelatihan selesai dilaksanakan. Adapun rincian hasil evaluasi dapat dilihat pada Tabel 6.

**Tabel 6. Evaluasi PJJ Optimalisasi Barang Milik Negara Tahun 2021**

No.	Pelatihan	Rata-Rata Hasil Evaluasi Penyelenggaraan	Rata-Rata Hasil Evaluasi Pengajar	Jumlah Kelulusan Peserta	% Minimal Baik
1	PJJ Optimalisasi Barang Milik Negara	4,78	4,77	22	100%

### **Pelatihan Jarak Jauh Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Pelaporan Transaksi Lelang**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terkait lelang, harus dilakukan kegiatan mengenali pengguna jasa, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan kewajiban pelaporan Transaksi Lelang kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sesuai dengan ketentuan. Agar dapat melaksanakan kegiatan tersebut secara benar, dibutuhkan kompetensi untuk mampu menerapkan konsep umum dan ketentuan PMPJ yang berlaku pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II. Untuk memenuhi kompetensi tersebut, perlu diselenggarakan Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Pelaporan Transaksi Lelang.

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam melaksanakan prinsip mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) pada KPKNL, Balai Lelang, dan Pejabat Lelang Kelas II secara benar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sasaran atau target peserta pelatihan terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) DJKN, diutamakan yang berkedudukan sebagai Pengawas/Superintenden pada Kanwil, Petugas Khusus PMPJ KPKNL, Pejabat Lelang Kelas I / Pelelang pada KPKNL.

Program pembelajaran PJJ Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Pelaporan Transaksi Lelang merupakan pembelajaran terintegrasi yang diselenggarakan dengan model 10:20:70 di mana 10% dilakukan dengan pembelajaran Pelatihan Jarak Jauh melalui Zoom Meeting, 20% dengan *Focus Group Discussion* (FGD) dan *Community of Practice* (CoP), dan 70% dengan penugasan atasan langsung di kantor masing-masing.

Pada tahun 2021, PJJ Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Pelaporan Transaksi Lelang diselenggarakan sebanyak 2 angkatan dengan rincian yang dapat dilihat pada Tabel 7.

**Tabel 7. Realisasi PJJ Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Pelaporan Transaksi Lelang Tahun 2021**

No.	Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi	Asal Peserta	Realisasi Peserta	Realisasi Jamlator
1	PJJ Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Pelaporan Transaksi Lelang Angkatan I	22 s.d. 26 Februari 2021	PJJ Pusdiklat KNPK	DJKN	34	1428
2	PJJ Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Pelaporan Transaksi Lelang Angkatan II	1 s.d. 5 November 2021	PJJ Pusdiklat KNPK	DJKN	33	1386

Atas program pembelajaran ini dilakukan evaluasi pembelajaran sampai dengan Level 4 yang terdiri dari:

- Evaluasi level 1, yaitu: evaluasi penyelenggaraan dan pengajar melalui KLC2/Semantik;
- Evaluasi level 2, yaitu ujian gabungan untuk MP 1, 2 dan 5 dengan alokasi waktu 90 menit dan ujian praktik untuk MP 3, 4, 6 menggunakan alokasi waktu tatap muka;
- Evaluasi level 3, untuk mengukur apakah telah terjadi perubahan perilaku pada diri peserta setelah kembali ke pekerjaan sehari-hari;
- Evaluasi level 4, yaitu menilai kinerja peserta setelah kembali ke tempat kerja dan melaksanakan tugas terkait dengan materi yang diajarkan dalam pelatihan dengan memenuhi/menyelesaikan minimal satu *leading indicator* atau lebih.

*Leading indicator* untuk program ini adalah sebagai berikut:

- Ketepatan waktu penyampaian laporan ke PPATK;
- Registrasi di aplikasi pelaporan (goAML);
- Penyampaian laporan transaksi lelang melalui aplikasi pelaporan (goAML);
- Pelaksanaan evaluasi kepatuhan penyampaian laporan oleh Kanwil DJKN.



**Tabel 8. Evaluasi PJJ Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Pelaporan Transaksi Lelang Tahun 2021**

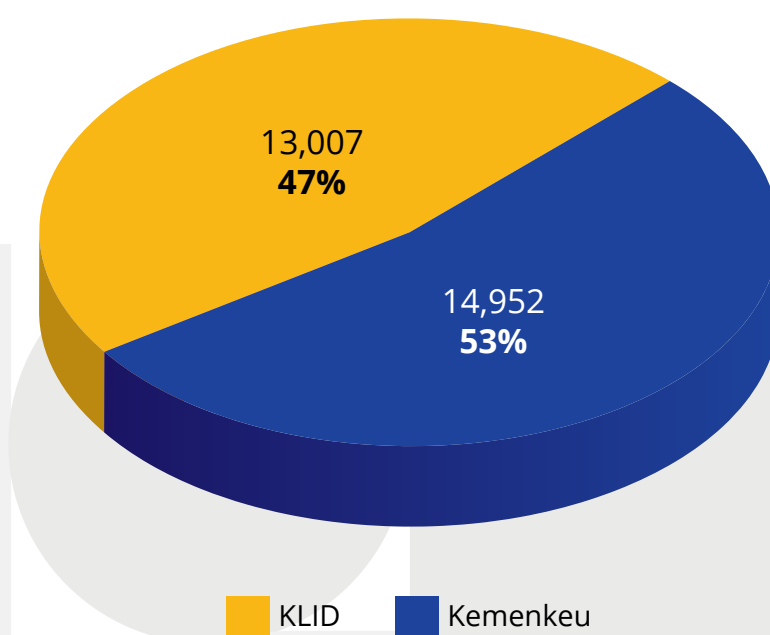
No	Angkatan Pelatihan	Rata-Rata Hasil Evagara	Rata-Rata Hasil Evajar	Jumlah Kelulusan Peserta	% Minimal Baik	Jumlah Responden Level 3	Jumlah Responden Level 4	Peserta yang Terdapat Bukti Kinerja	Peserta yang Meningkatkan Kinerjanya
1	Angkatan I	4,72	4,86	34	32 (94,12%)	25	24	18	16 (88,89%)
2	Angkatan II	4,74	4,82	33	26 (78,79%)	20	20	18	17 (94,44%)

### 3. Capaian Pembelajaran di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

Realisasi peserta yang mengikuti pembelajaran program Pusdiklat KNPK, baik yang diselenggarakan langsung oleh Pusdiklat KNPK maupun oleh BDK pada tahun anggaran 2021 sebanyak 27.959 peserta. Dar jumlah

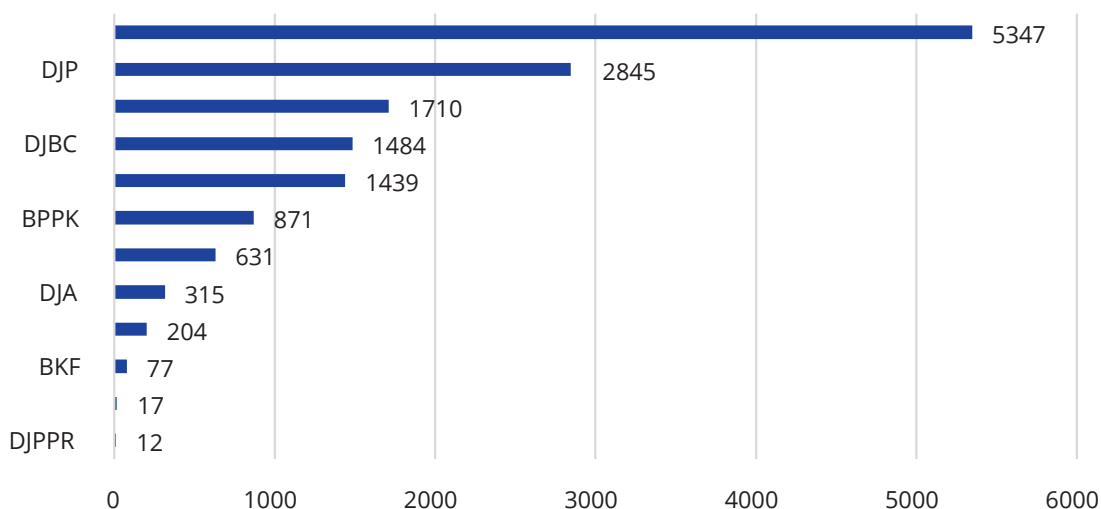
tersebut, 14.952 peserta berasal dari Kementerian Keuangan dan 13.007 berasal dari luar Kementerian Keuangan seperti terlihat pada Gambar 1. Adapun rincian jumlah peserta Kemenkeu berdasarkan Unit Eselon I disajikan pada Gambar 2.

**Gambar 1. Realisasi Peserta Pelatihan Pusdiklat KNPK TA 2021 Berdasarkan Unit Peserta**





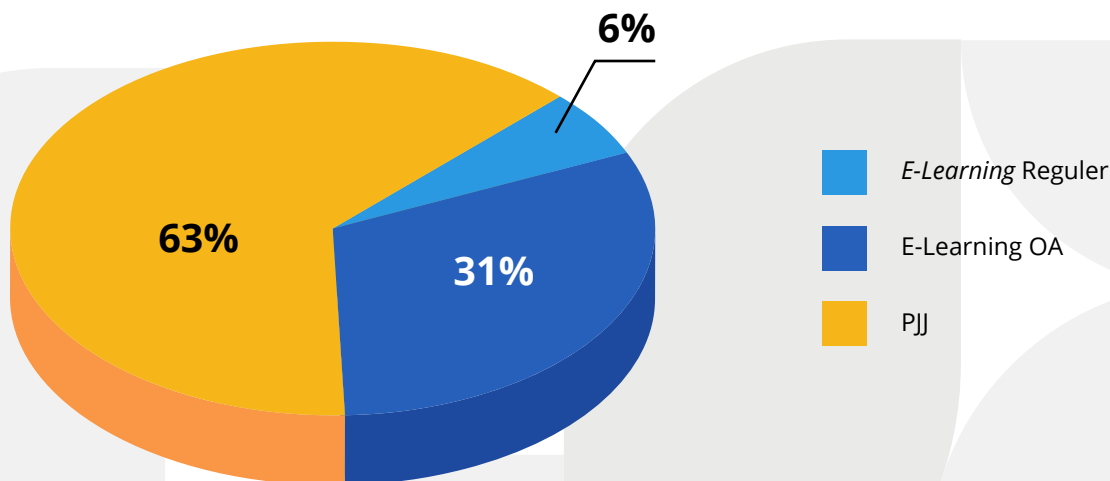
**Gambar 2. Realisasi Peserta Kemenkeu Pelatihan Pusdiklat KNPK TA 2021 Berdasarkan Unit Eselon I Kemenkeu**



Dapat dilihat dari Gambar 2 bahwa dari internal Kementerian Keuangan, DJKN, DJP, dan DJPK merupakan 3 unit teratas yang mengirimkan peserta pelatihan di Pusdiklat KNPK. Hal ini dikarenakan DJKN dan DJPK merupakan mitra utama Pusdiklat KNPK yang menyelenggarakan pelatihan di bidang perimbangan keuangan dan pengelolaan kekayaan negara, sedangkan DJP merupakan unit yang memiliki jumlah pegawai yang besar dan salah satu kompetensi yang dibutuhkan adalah penilaian yang merupakan kompetensi pembelajaran

yang juga diselenggarakan oleh Pusdiklat KNPK. Pada tahun 2021, seluruh program yang diselenggarakan Pusdiklat KNPK merupakan pembelajaran digital dikarenakan kondisi pandemi belum memungkinkan penyelenggaraan pembelajaran klasikal. Selama tahun anggaran 2021, Pusdiklat KNPK menyelenggarakan 212 program yang terdiri dari 13 program *e-learning* reguler, 65 program *e-learning open access*, dan 134 program pelatihan jarak jauh (PJJ) sehingga proporsi jenis program TA 2021 dapat dilihat pada Gambar 3.

**Gambar 3. Realisasi Jumlah Program Pelatihan Pusdiklat KNPK TA 2021**

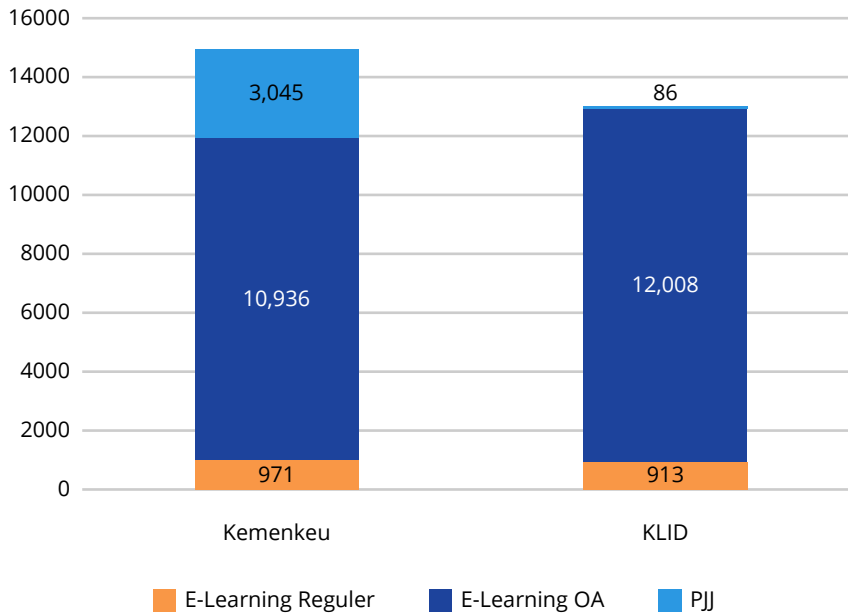




Dari ketiga jenis program tersebut, *e-learning open access* menyumbang jumlah peserta paling banyak dibandingkan *e-learning reguler*, baik peserta dari internal Kemenkeu maupun KLID. Hal ini dikarenakan untuk mengikuti *e-learning open access*, peserta tidak

membutuhkan penugasan khusus dari instansi dan pelatihan dibuka sepanjang tahun. Adapun rincian realisasi peserta berdasarkan jenis program dapat dilihat pada Gambar 4.

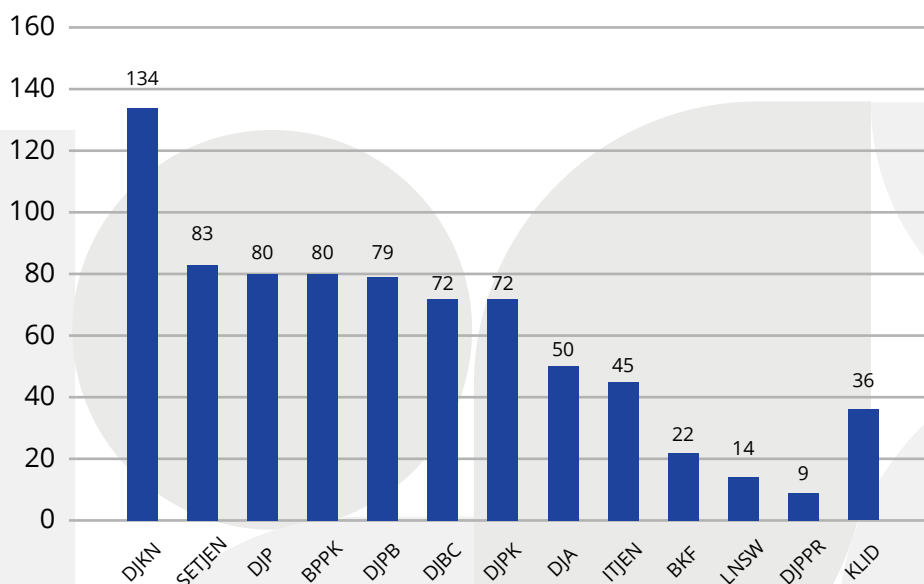
**Gambar 4. Realisasi Jumlah Peserta Pelatihan Pusdiklat KNPK TA 2021 Berdasarkan Jenis Program.**



Adapun rincian jumlah program yang diikuti oleh peserta dari masing-masing unit Eselon I diKementerian Keuangan dan KLID dapat dilihat pada Gambar 5.

Berdasarkan jumlah program, DJKN menempati urutan pertama dengan 134 program Pusdiklat KNPK yang diikuti oleh pegawainya pada tahun 2021.

**Gambar 5. Jumlah Program Pelatihan Pusdiklat KNPK TA 2021 yang Diikuti Berdasarkan Unit Peserta**



#### 4. Kerja Sama Program Pembelajaran di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

Selama tahun anggaran 2021, Pusdiklat KNPK juga melaksanakan Kerja Sama Program Pembelajaran (KSPP) sebanyak 5 (lima) kegiatan. Adapun rincian pelaksanaan KSPP dapat dilihat pada tabel 9.

**Tabel 9. Rincian Realisasi Kegiatan Kerja Sama Program Pembelajaran Tahun 2021**

No	Nama Pelatihan	Unit Peserta	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Lokasi KCT	Rencana	Peserta Realisasi Kemenkeu	Realisasi Kelulusan
1	PJJ Pengelolaan BMN bagi Pengguna Barang Angkatan I KSPP Pusdiklat KNPK dengan Setjen Bawaslu	Bawaslu	22 Maret 2021	12 April 2021	Zoom Meeting	30	29	20
2	PJJ Penatausahaan BMN bagi Pengguna Barang KSPP dengan Biro Umum BPPT	BPPT	13 September 2021	21 September 2021	Zoom Meeting	30	32	24
3	PJJ Pengelolaan BMN bagi Pengguna Barang Angkatan II KSPP Pusdiklat KNPK dengan Setjen Bawaslu	Bawaslu	27 September 2021	15 Oktober 2021	Zoom Meeting	30	27	21
4	PJJ Penatausahaan BMN bagi Pengguna Barang KSPP dengan Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan	Kemenhub	18 Oktober 2021	27 Oktober 2021	Zoom Meeting	30	30	21
5	PJJ Pengelolaan BMN bagi Pengguna Barang Angkatan II KSPP Pusdiklat KNPK dengan Setjen Bawaslu	Bawaslu	06 Desember 2021	24 Desember 2021	Zoom Meeting	30	32	32
<b>TOTAL</b>						<b>150</b>	<b>150</b>	<b>118</b>

## 5. Sertifikasi Kompetensi di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

Pada tahun 2021 juga diselenggarakan 4 (empat) kegiatan sertifikasi/uji kompetensi yang dirinci pada tabel 10.

**Tabel 10. Rincian Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tahun 2021**

Sertifikasi	Waktu Pelaksanaan	Lokasi	Mekanisme	Jumlah Peserta
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	23 April 2021	Sekretariat BPPK	LSP-BNSP	7
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	16 s.d. 17 Juni 2021	Zoom Meeting	Mandiri	72
Jabatan Fungsional Pelelang	26 s.d. 27 Oktober 2021	Zoom Meeting	Mandiri	34
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	3 November 2021	Sekretariat BPPK	LSP-BNSP	9
<b>Total Peserta</b>				<b>125</b>

Selain kompetensi teknis, Pusdiklat KNPK bekerja sama dengan Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial menyelenggarakan

uji kompetensi manajerial sosiokultural (mansoskul), yang disajikan pada tabel 11.

**Tabel 11. Rincian Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Uji Mansoskul Tahun 2021**

Sertifikasi	Waktu Pelaksanaan	Lokasi	Jumlah Peserta
Jabatan Fungsional Pelelang	2, 8, dan 15 November 2021	Zoom Meeting	48
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	4 dan 5 November 2021	Zoom Meeting	9
<b>Total Peserta</b>			<b>57</b>

Pusdiklat KNPK juga menyelenggarakan sertifikasi mahasiswa PKN STAN untuk Jurusan DIII Penilai Alih Program, DIII Penilai, dan DIII Manajemen Aset pada tanggal 7 Oktober 2021, dengan peserta sebanyak 447 orang, dan terdapat 1 orang peserta tidak hadir. Peserta yg dinyatakan lulus dalam sertifikasi tersebut sebanyak 324 orang.

## 6. Pembelajaran Lainnya di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

Selain pembelajaran berupa pelatihan pada periode ini, Pusdiklat KNPK juga menyelenggarakan Kemenkeu *Corpu Talk* (KCT) yang sebanyak 8 (delapan) kali pada tahun anggaran 2021. Adapun rincian pelaksanaan KCT dapat dilihat pada Tabel 12.

**Tabel 11. Rincian Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Uji Mansoskul Tahun 2021**

No	Nama Pelatihan	Unit Peserta	Tanggal	Lokasi KCT	Peserta		
					Rencana	Realisasi Kemenkeu	Realisasi KLID
1	Menuju Jabatan Fungsional Penatalaksana Barang	Kemenkeu K/L Non Kemenkeu Pemda Umum	25 Februari 2021	Zoom Meeting YouTube Podcast	500	250	512
2	Paradigma Baru Penyelesaian Piutang Negara	Kemenkeu K/L Non Kemenkeu Pemda Umum	18 Maret 2021	Zoom Meeting YouTube Podcast	500	171	1019
3	Pembaharuan Ketentuan Lelang	Kemenkeu K/L Non Kemenkeu Pemda Umum	01 April 2021	Zoom Meeting YouTube Podcast	500	218	982
4	Crash Program Keringanan Utang	Kemenkeu K/L Non Kemenkeu Pemda Umum	19 April 2021	Zoom Meeting YouTube Podcast	500	233	900
5	Kompetisi dan Inovasi Lelang Produk UMKM Guna Penguatan Ekonomi Masyarakat	Kemenkeu K/L Non Kemenkeu Pemda Umum	04 Mei 2021	Zoom Meeting YouTube	500	307	606
6	BLT Desa dan Bagaimana Desa Memenuhi Syarat Penyaluran	Kemenkeu K/L Non Kemenkeu Pemda Umum	10 Juni 2021	Zoom Meeting YouTube	500	288	1592

No	Nama Pelatihan	Unit Peserta	Tanggal	Lokasi KCT	Peserta		
					Rencana	Realisasi Kemenkeu	Realisasi KLID
7	Hubungan UU Cipta Kerja dengan Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kemenkeu K/L Non Kemenkeu Pemda Umum	15 Juli 2021	Zoom Meeting YouTube	500	193	1453
8	UU HKPD: Menuju Penguatan Desentralisasi Fiskal untuk Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Kemenkeu K/L Non Kemenkeu Pemda Umum	22 Desember 2021	Zoom Meeting YouTube	500	439	588
<b>Total</b>					<b>4.000</b>	<b>2.099</b>	<b>7.652</b>

## 04.2.5

### Pembelajaran di Bidang Kepemimpinan dan Manajerial

Dalam rangka mendukung salah satu misi Kementerian Keuangan, yaitu “mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan sumber daya manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi”, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan melalui Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia (Pusdiklat PSDM) menyelenggarakan berbagai program pembelajaran di bidang kepemimpinan dan manajerial bagi para pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Dengan berbagai program pembelajaran tersebut, diharapkan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Keuangan semakin memiliki kompetensi manajerial dan sosiokultural yang tinggi. Pada tahun 2021, terdapat 4 (empat) program pembelajaran unggulan, yang diselenggarakan oleh Pusdiklat PSDM yaitu

Pelatihan Dasar CPNS Pelatihan *Effective Coaching, Mentoring, and Counseling Skills Level Intermediate, E-Learning* Pelatihan Peningkatan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural bagi Pelaksana, dan *Executive Training For The Winner*.

#### 1. Pelatihan Dasar CPNS

Pelatihan Dasar CPNS diselenggarakan untuk membentuk PNS profesional yang berkarakter, yaitu PNS yang karakternya dibentuk oleh sikap bela negara, nilai-nilai dasar PNS, dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, serta menguasai bidang tugasnya sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Sasaran atau target peserta pembelajaran meliputi CPNS di lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau kementerian/lembaga lainnya. Mengingat kondisi pada tahun 2021 yang masih dalam masa pandemi *COVID-19*, program pembelajaran ini diselenggarakan dengan model pembelajaran pelatihan jarak jauh melalui Zoom Meeting. Pelatihan Dasar CPNS pada tahun 2021 diselenggarakan sebanyak 3 angkatan dengan realisasi peserta mencapai 498 orang.

Evaluasi pembelajaran pada Pelatihan Dasar CPNS dilakukan sampai dengan evaluasi level 3. Evaluasi level 1 yaitu evaluasi penyelenggaraan dan pengajar melalui aplikasi Semantik.

Berdasarkan hasil evaluasi level 1 pada Pelatihan Dasar CPNS, diperoleh hasil sebagai berikut:

No.	Pelatihan	Rata-Rata Hasil Evaluasi Penyelenggaraan	Rata-Rata Hasil Evaluasi Pengajar	Jumlah Kelulusan Peserta	% Minimal Baik
1	Pelatihan Dasar CPNS Angkatan I	4,58	4,67	54	100%
2	Pelatihan Jarak Jauh Pelatihan Dasar CPNS Angkatan II	4,55	4,74	244	100%
3	Pelatihan Jarak Jauh Pelatihan Dasar CPNS Angkatan III	4,56	4,75	200	100%

Evaluasi level 2 terdiri dari evaluasi akademik, evaluasi rancangan aktualisasi, evaluasi pelaksanaan aktualisasi, evaluasi sikap dan perilaku, dan evaluasi penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Sedangkan evaluasi level 3 mengukur penerapan materi pembelajaran dalam:

- Melakukan praktik yang mencerminkan kesiapsiagaan fisik dan mental dalam suatu kegiatan yang melatih kedisiplinan, kepemimpinan, kerja sama, dan prakarsa agar dapat mewujudkan kesiapsiagaan bela negara.
- Menerapkan aneka (akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi).
- Mengaktualisasikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai jabatannya kepada masyarakat/*stakeholders* yang dilayaninya.
- Mengaktualisasikan konsep, penerapan *whole of government*, dan *best practice* penerapan *Whole of Government* dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi.

## 2. Pelatihan *Effective Coaching, Mentoring, and Counseling Skills Level Intermediate* (Pelatihan Jarak Jauh)

Pelatihan ini didesain untuk menghasilkan peserta yang mampu mempraktikkan

*coaching, mentoring* dan *counseling* secara efektif di tempat kerja. Sasaran atau target peserta meliputi pejabat administrator (eselon III), pejabat pengawas (eselon IV) dan pejabat fungsional ahli utama, madya dan muda, para mentor atau para *talent* di lingkungan Kementerian Keuangan untuk menunjang fungsi kepemimpinan dan manajerial di unitnya masing-masing. Program pembelajaran ini diselenggarakan dengan model pembelajaran Pelatihan Jarak Jauh melalui Zoom Meeting. Pelatihan *Effective Coaching, Mentoring, and Counseling Skills Level Intermediate* (pelatihan jarak jauh) pada tahun 2021 diselenggarakan sebanyak 12 angkatan dengan realisasi peserta mencapai 206 orang.

Pelatihan *Effective Coaching, Mentoring, and Counseling Skills Level Intermediate* (pelatihan jarak jauh) ini dilakukan evaluasi pembelajaran sampai dengan level 3. Evaluasi level 1 meliputi evaluasi penyelenggaraan dan evaluasi pengajar yang dilakukan melalui Semantik. Dari evaluasi level 1, pelatihan ini memperoleh rata-rata indeks 4,81 (skala 5) untuk evaluasi penyelenggaraan dan rata-rata indeks 4,91 (skala 5) untuk evaluasi pengajar. Dari hasil evaluasi level 1 ini, dapat disimpulkan bahwa pelatihan ini telah diselenggarakan dengan baik sehingga tingkat kepuasan peserta tinggi.

Evaluasi level 2 dilakukan untuk menilai kemampuan peserta dalam memahami materi pelatihan. Evaluasi level 2 yang dilakukan untuk pelatihan ini meliputi penilaian aktivitas peserta dalam kelas dan penilaian *action learning* di tempat kerja. Penilaian aktivitas dalam kelas terdiri dari aspek kehadiran, partisipasi, dan penugasan. Kegiatan *action learning* terdiri dari penyusunan laporan pelaksanaan *coaching/mentoring/counseling plan* dan pembuatan video praktik *coaching/mentoring/counseling*.

Evaluasi level 3 dilakukan untuk menilai implementasi materi pelatihan yang ditunjukkan dengan adanya perubahan sikap dan perilaku alumni pelatihan. Adapun aspek-aspek yang dinilai pada evaluasi level 3 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan *knowledge sharing* di unit kerjanya tentang *coaching, mentoring* dan *counseling*;
2. Menunjukkan perilaku mempraktikkan interaksi komunikasi dengan baik dengan atasan, rekan kerja dan bawahannya;
3. Menunjukkan perilaku dapat mendengarkan dengan efektif ucapan dari atasan, rekan dan bawahan dengan baik;
4. Menunjukkan perilaku merespon dan bertanya dengan baik;
5. Melakukan *coaching, mentoring* dan *counseling* dengan rutin dalam rangka pembinaan kinerja;
6. Menunjukkan perilaku membimbing bawahan/anggota timnya dalam menyusun *action plan/individual development plan* bawahan/anggota timnya dengan baik;
7. Menunjukkan perilaku memberikan *feedback* terhadap *coachee/ mentee/ counselee* dengan baik dan terarah.

### 3. E-Learning Pelatihan Peningkatan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural bagi Pelaksana

Pelatihan Peningkatan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Bagi Pelaksana ini dimaksudkan untuk mencapai persyaratan kompetensi pegawai yang sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) pelaksana dan peserta mampu mengaktualisasikan materi

dalam pekerjaannya agar dapat melaksanakan tugas fungsinya dengan efektif. Sasaran atau target peserta pelatihan terdiri dari para pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan. Program pembelajaran ini diselenggarakan dengan model pembelajaran *e-learning* melalui KLC2. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Bagi Pelaksana pada tahun 2021 diselenggarakan sebanyak 2 angkatan dengan jumlah peserta mencapai 302 orang.

Pelatihan Peningkatan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Bagi Pelaksana ini dilakukan evaluasi pembelajaran sampai dengan level 2, yang terdiri dari evaluasi level 1, yaitu peserta mereview program *e-learning* yang diselesaikan melalui *course reviews* di Kemenkeu *Learning Center* (KLC). Sedangkan evaluasi level 2 dilakukan dengan memberikan soal *quiz* untuk dikerjakan oleh peserta pelatihan.

### 4. Executive Training for The Winner

Kegiatan *Executive Training for The Winners (ET for The Winners)* merupakan pelatihan yang ditujukan khusus bagi pimpinan unit-unit vertikal (pejabat administrator) di lingkungan Kementerian Keuangan yang memperoleh penghargaan penilaian Kantor Wilayah Terbaik dan Kantor Pelayanan Terbaik (KWT/KPT), serta ZI-WBBM. Kegiatan tersebut merupakan bentuk apresiasi sekaligus bagian dari pengembangan kompetensi bagi para pemimpin terbaik di lingkungan Kementerian Keuangan. Selain itu, kegiatan *Executive Training for The Winners (ET for The Winners)* menghadirkan para pembicara yang inspiratif dan kompeten di bidangnya.

*ET for The Winners* tahun 2021 diselenggarakan secara daring pada tanggal 8 s.d. 11 November 2021 yang diikuti sebanyak 40 peserta dari berbagai unit eselon I Kementerian Keuangan. Narasumber pada acara ini adalah Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti; Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Heru Pambudi; dan juga *President Director Lead+ Beyond*, Wiweco Adi Nugroho.

### 5. Kajian Akademis di Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Selain menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di bidang kepemimpinan dan manajerial, Pusdiklat PSDM juga aktif berkontribusi dalam kegiatan kajian akademis. Melalui kegiatan kajian akademis ini, diharapkan Pusdiklat PSDM

dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang bermanfaat bagi Kementerian Keuangan dalam melaksanakan pengelolaan organisasi dan SDM serta membangun

kompetensi manajerial dan sosiokultural. Pada tahun 2021, terdapat 4 (empat) kajian akademis yang disusun oleh Pusdiklat PSDM, yaitu sebagai berikut:

No	Penyusun Kajian Akademis	Judul Kajian Akademis
1	Bjardianto Pudjiono	Peran Komitmen Organisasi dan Perilaku Kerja dalam Memediasi Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai pada Pusdiklat Lingkup BPPK Kementerian Keuangan
2	Hindri Asmoko & Hari Sugiharto	Pengaruh Kualitas Pelatihan Peningkatan Kompetensi <i>Interpersonal Skills</i> sebagai Variabel Pemoderasi
3	Daniel Pangaribuan	Persepsi Pegawai tentang Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Mediasi Studi Kasus pada Pegawai PPSDM
4	T.R. Taufiqurrahman & Leliantika H.D	Fleksibilitas Kerja, Kepuasan Kerja, dan <i>Work Life Balance</i> dengan Pendekatan Karakteristik Pegawai Pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia

## 04.2.6

### Pembelajaran di Bidang Keuangan Negara Lainnya

Selain program pembelajaran di bidang anggaran, perbendaharaan, pajak, bea dan cukai, kekayaan negara, perimbangan keuangan, kepemimpinan, dan manajerial, BPPK melalui Pusdiklat Keuangan Umum (Pusdiklat KU) menyelenggarakan berbagai program pembelajaran dalam rangka mendukung beberapa misi Kementerian Keuangan. Beberapa misi Kementerian Keuangan yang didukung oleh program pembelajaran pada Pusdiklat KU yaitu:

- Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.

- Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
- Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
- Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan sumber daya manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Terdapat 9 (sembilan) rumpun pembelajaran yang dikelola oleh Pusdiklat KU, yaitu akuntansi, bahasa, hukum, kebijakan fiskal dan ekonomi makro, manajemen SDM, pengawasan keuangan, penulisan ilmiah, sistem informasi, dan manajemen organisasi. Pada tahun 2021, terdapat 4 (empat) program pembelajaran unggulan pada Pusdiklat Keuangan Umum, yaitu:

- a. PJJ Penguatan Quasi *Sovereign Instrument* Berbasis CWLS: Konsep, Implementasi, dan Teknik Komunikasi;
- b. *E-learning Data Driven Decision Making*;
- c. PJJ *Data Analytics Specialist*;
- d. PJJ Pengolahan Data dan Visualisasi Pelaporan;
- e. *E-learning* Dasar-Dasar Multimedia dan Desain Grafis;
- f. PJJ Multimedia dan Desain Grafis.

### 1. PJJ Penguatan Quasi *Sovereign Instrument* Berbasis CWLS: Konsep, Implementasi, dan Teknik Komunikasi

Masyarakat mulai semakin paham dan tertarik pada jenis pembiayaan yang ada di Indonesia, termasuk salah satunya adalah sukuk. Sebagai unit organisasi yang mempunyai tugas terkait pembiayaan dan risiko, diperlukan peningkatan pemahaman dan kompetensi bagi SDM Keuangan Negara untuk dapat menyebarkan informasi dengan baik dan benar terkait pengelolaan sukuk termasuk *cash waqf linked* sukuk. Pusdiklat Keuangan Umum berupaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan menyusun dan mendesain program pembelajaran PJJ Penguatan Quasi *Sovereign Instrument* Berbasis CWLS: Konsep, Implementasi, dan Teknik Komunikasi.

Pelatihan Jarak Jauh Penguatan Quasi *Sovereign Instrument* Berbasis CWLS: Konsep, Implementasi Dan Teknik Komunikasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko terkait *Cash Waqf Linked* Sukuk (CWLS) dan metode komunikasinya kepada publik. Sasaran atau target peserta meliputi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko yang diproyeksikan akan menjadi agen sosialisasi.

PJJ Penguatan Quasi *Sovereign Instrument* Berbasis CWLS: Konsep, Implementasi, dan Teknik Komunikasi telah diselenggarakan pada tanggal 31 Maret-11 Mei 2021 dengan jumlah peserta 10 orang.

Program pembelajaran ini dilakukan evaluasi pembelajaran sampai dengan level 2 yang terdiri dari evaluasi level 1, yaitu evaluasi penyelenggaraan dan pengajar melalui Semantik, dan evaluasi level 2 dengan *action learning* menyusun *capstone project: Knowledge Capture* CWLS.

### 2. *E-Learning Data Driven Decision Making*

Perkembangan teknologi informasi serta pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan banyak dibutuhkan di era digital saat ini. Pemanfaatan data harus dilakukan secara maksimal dan optimal sehingga mampu memberikan insight dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan secara lebih objektif. Untuk itu, dibutuhkan kemampuan *data analytics* bagi pada pegawai Kementerian Keuangan agar mampu merumuskan kebijakan dan memberikan insight bagi para pimpinan untuk dapat mengambil kebijakan berbasis *data analytics*. Pusdiklat Keuangan Umum berupaya untuk meningkatkan kompetensi *data analytics* bagi para ASN di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program *E-learning Data Driven Decision Making*.

*E-Learning Data Driven Decision Making* merupakan bagian pertama dari serial pelatihan *data analytics*, sedangkan bagian kedua, yaitu Pelatihan Jarak Jauh *Data Analytics Specialist*. *E-Learning* ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya pegawai yang bertugas atau diproyeksikan mengimplementasikan pengambilan keputusan berbasis data melalui pengembangan proyek *data analytics* guna pengembangan organisasi yang adaptif dan *agile*. Setelah mengikuti *e-learning ini*, peserta diharapkan dapat melakukan penerapan pengambilan keputusan berbasis data melalui penyusunan kerangka proyek *data analytics* sederhana. Sasaran atau target peserta meliputi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya yang bertugas atau diproyeksikan di bidang/bagian yang membutuhkan pengolahan, analisis, dan visualisasi data untuk pengambilan keputusan/kebijakan.

Program pembelajaran dilaksanakan dengan model pembelajaran non tatap muka yaitu menggunakan metode *e-learning (full synchronous)* dan pendampingan (*mentoring*). *E-learning Data Driven Decision Making* diselenggarakan sebanyak 2 (dua) angkatan dengan jumlah peserta mencapai 164 orang.

Terhadap program pembelajaran ini, dilakukan evaluasi pembelajaran sampai dengan level 2 yang terdiri dari evaluasi level 1 yaitu evaluasi penyelenggaraan dan pengajar melalui Semantik, dan evaluasi level 2 dengan

*action learning* menyusun *capstone project: Data Analytics Project Proposal*. Berikut adalah hasil evaluasi pembelajaran *E-learning Data Driven Decision Making* penyelenggaraan tahun 2021.

No	Nama Pelatihan	Evaluasi Penyelenggaraan	Evaluasi Pengajar	Evaluasi Hasil Pembelajaran	
				Peserta Lulus	Peserta min. baik
1	<i>E-learning Data Driven Decision Making</i> Angkatan I	4,57	4,66	72	72 (100%)
2	<i>E-learning Data Driven Decision Making</i> Angkatan II	4,59	4,73	92	92 (100%)

### 3. PJJ Data Analytics Specialist

*PJJ Data Analytics Specialist* ini merupakan bagian kedua dari serial pelatihan *data analytics*, sedangkan bagian pertama yaitu *E-Learning Data-Driven Decision-Making*. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya pegawai yang bertugas atau diproyeksikan mengimplementasikan pengambilan keputusan berbasis data melalui pengembangan proyek *data analytics* guna pengembangan organisasi yang adaptif dan *agile*. Setelah mengikuti PJJ ini, peserta diharapkan dapat menggunakan teknik-teknik serta metode analisis yang dibutuhkan untuk mengembangkan proyek *data analytics* agar proses bisnis dapat berjalan dengan lebih efisien dan/atau meningkatkan kinerja di lingkungan unitnya. Sasaran atau target peserta meliputi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya yang bertugas atau diproyeksikan di bidang/bagian yang membutuhkan pengolahan, analisis, dan visualisasi data untuk pengambilan keputusan/kebijakan.

*PJJ Data Analytics Specialist* diselenggarakan dengan model pembelajaran non tatap muka dan menggunakan beberapa metode diantaranya pelatihan jarak jauh, bimbingan di tempat kerja (*mentoring*) dan *coaching*. Pada tahun 2021, pelatihan ini diselenggarakan sebanyak 4 (empat) angkatan dengan jumlah peserta mencapai 132 orang.

Atas program pembelajaran ini dilakukan evaluasi pembelajaran sampai dengan level 2 yang terdiri dari evaluasi level 1 yaitu evaluasi penyelenggaraan dan pengajar melalui Semantik, dan evaluasi level 2 dengan *action learning* menyusun *capstone project: Data Analytics Project Proposal*. Berikut adalah hasil evaluasi pembelajaran *E-learning Data Driven Decision Making* penyelenggaraan tahun 2021.

No	Nama Pelatihan	Evaluasi Penyelenggaraan	Evaluasi Pengajar	Evaluasi Hasil Pembelajaran	
				Peserta Lulus	Peserta min. baik
1	PJJ <i>Data Analytics Specialist</i> Angkatan I	4,33	4,73	35	35 (100%)
2	PJJ <i>Data Analytics Specialist</i> Angkatan II	4,37	4,48	29	29 (100%)
3	PJJ <i>Data Analytics Specialist</i> Angkatan III	4,48	4,58	37	37 (100%)
4	PJJ <i>Data Analytics Specialist</i> Angkatan IV	4,37	4,67	31	31 (100%)

#### 4. PJJ Pengolahan Data dan Visualisasi Pelaporan

Pengolahan dan analisis data merupakan hal utama dan mendasar yang harus dilakukan agar data yang dimiliki dapat dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Kerap kali, hasil pengolahan dan analisis data tersebut sulit dimengerti apabila tidak disajikan secara tepat. Diperlukan teknik khusus untuk melakukan visualisasi hasil dari pengolahan dan analisis data.

Pusdiklat Keuangan Umum berupaya memenuhi kebutuhan tersebut melalui program pembelajaran PJJ Pengolahan Data dan Visualisasi Pelaporan. Program ini didesain untuk membekali para pegawai Kementerian Keuangan dalam mengolah data dan informasi serta melakukan analisis untuk visualisasi laporan.

Untuk dapat mengikuti pelatihan ini, peserta harus terlebih dahulu mengikuti dan menyelesaikan 7 *microlearning* sebagai berikut:

- *Microlearning* Pengetahuan tentang Data
- *Microlearning* Konsep Pengolahan Data

- *Microlearning* Pengenalan *Pivot Table & Chart*
- *Microlearning* Konteks dalam Visualisasi Pelaporan
- *Microlearning* Pendekatan Visualisasi Data
- *Microlearning* *Story Telling* dalam Visualisasi Data
- *Microlearning* Implementasi Visualisasi Data

Pelatihan ini didesain untuk membekali para pegawai Kementerian Keuangan dalam mengolah data dan informasi serta melakukan analisis untuk visualisasi laporan. Desain pelatihan dirancang untuk mencakup pengolahan dan analisis data, *pivot table*, *chart* dan grafik, serta visualisasi laporan untuk menunjang tugas dan fungsi di unitnya masing-masing. Sasaran atau target peserta pelatihan meliputi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Keuangan, yang memiliki tugas dan fungsi terkait penggunaan data dan informasi sebagai alat analisis untuk visualisasi laporan.

PJJ Pengolahan Data dan Visualisasi Pelaporan diselenggarakan dengan menggunakan model pembelajaran non tatap muka.

Pada tahun 2021, program pembelajaran PJJ Pengolahan Data dan Visualisasi Pelaporan diselenggarakan sebanyak 5 angkatan dengan jumlah peserta mencapai 151 orang.

Pelatihan Pengolahan Data dan Visualisasi Pelaporan dan PJJ Pengolahan Data dan Visualisasi Pelaporan merupakan program pembelajaran yang didesain untuk diukur evaluasinya sampai dengan level 3 yang terdiri dari evaluasi level 1, yaitu evaluasi penyelenggaraan dan pengajar melalui Semantik, evaluasi level 2 dengan *action learning* menyusun visualisasi pelaporan, dan evaluasi level 3 yaitu evaluasi implementasi hasil pembelajaran dengan menggunakan teknik pengumpulan data peningkatan kompetensi para alumni pelatihan pada kegiatan evaluasi pascapembelajaran.

Dari evaluasi level 1, diperoleh rata-rata indeks 4,64 (skala 5) untuk evaluasi penyelenggaraan dan 4,83 (skala 5) untuk evaluasi pengajar. Sedangkan dari evaluasi level 2, seluruh peserta berhasil lulus dengan predikat minimal baik (nilai  $\geq 76$ ). Pada evaluasi level 3, terdapat 49 alumni peserta yang memenuhi kriteria sebagai responden (ditempatkan pada unit yang memiliki bidang tugas yang sesuai dengan materi pelatihan). Dari jumlah tersebut, 44 orang (89,80%) di antaranya telah menunjukkan perubahan sikap dan perilaku dengan mengimplementasikan materi pelatihan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

## 5. *E-learning* Dasar-Dasar Multimedia dan Desain Grafis

Pada era digital seperti saat ini, penyampaian informasi dalam bentuk digital berupa infografis, poster, pamflet maupun video sangat efektif untuk digunakan. Dalam penyusunan desain grafis, diperlukan kemampuan dan kreativitas dalam mendesain berbagai macam bentuk grafis (foto, teks, ikon, dll) agar dapat memuat satu kesatuan informasi digital yang menarik dan informatif. Pembuatan video juga memerlukan teknik-teknik tertentu dalam pengambilan gambar, pencahayaan, perekaman suara/narasi, serta editing video agar video yang dihasilkan menarik, informatif, dan tidak membosankan.

Pusdiklat Keuangan Umum menangkap kebutuhan akan desain grafis dan multimedia tersebut dengan mengembangkan rangkaian

program pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para pegawai Kementerian Keuangan dalam membuat desain grafis (dengan menggunakan *software* Adobe Photoshop, CorelDRAW, dan Adobe Illustrator) dan desain multimedia (diantaranya menggunakan kamera digital, kamera perekam, *software* multimedia, dll) guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja masing-masing.

*E-learning* Dasar-Dasar Multimedia dan Desain Grafis merupakan bagian pertama dari rangkaian program pembelajaran di bidang multimedia dan desain grafis, sedangkan bagian kedua adalah Pelatihan Jarak Jauh Multimedia dan Desain Grafis. *E-learning* Dasar-Dasar Multimedia dan Desain Grafis didesain untuk meningkatkan kompetensi para pegawai Kementerian Keuangan terkait dasar-dasar pembuatan materi multimedia dasar (fotografi dan videografi) dan desain grafis guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja masing-masing. Sasaran atau target peserta meliputi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Keuangan, yang ditugaskan oleh instansi yang bersangkutan. Peserta direkomendasikan sudah pernah ditugaskan dan/atau diproyeksikan untuk melakukan pekerjaan terkait multimedia dan desain grafis.

Pada tahun 2021, sebanyak 9 angkatan *E-learning* Dasar-Dasar Multimedia dan Desain Grafis telah diselenggarakan Pusdiklat Keuangan Umum dengan capaian peserta sejumlah 875 orang.

*E-learning* Dasar-Dasar Multimedia dan Desain Grafis adalah program pembelajaran yang didesain untuk diukur evaluasinya sampai dengan level 2 namun bersifat non kelulusan yang terdiri dari evaluasi level 1, yaitu evaluasi penyelenggaraan dan pengajar melalui Semantik, evaluasi level 2 dengan tes formatif untuk setiap mata pelajaran melalui KLC. Dari evaluasi level 1, diperoleh rata-rata indeks 4,71 (skala 5) untuk evaluasi penyelenggaraan dan 4,80 (skala 5) untuk evaluasi pengajar.

## 6. PJJ Multimedia dan Desain Grafis

Pelatihan ini merupakan bagian kedua dari serial pelatihan terkait multimedia dan desain grafis. Peserta PJJ Multimedia dan Desain Grafis harus telah menyelesaikan *E-learning* Dasar-Dasar Multimedia dan Desain Grafis sebagai prasyarat untuk mengikuti PJJ ini.



PJJ ini didesain untuk meningkatkan kompetensi para pegawai Kementerian Keuangan dalam membuat materi multimedia dasar (fotografi dan videografi) dan desain grafis guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja masing-masing. Sasaran atau target peserta adalah aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Keuangan, yang ditunjuk atau ditugaskan oleh instansi yang bersangkutan. Peserta yang ditugaskan direkomendasikan sudah pernah melakukan pekerjaan terkait multimedia dan desain grafis.

Pelatihan ini diselenggarakan dengan model pembelajaran non tatap muka dan metode pembelajaran yang digunakan adalah pelatihan jarak jauh serta *coaching* dan *mentoring*. Pada tahun 2021, sebanyak 3 angkatan PJJ Multimedia dan Desain Grafis telah diselenggarakan Pusdiklat Keuangan Umum dan 4 angkatan diselenggarakan oleh Balai Diklat Keuangan (BDK) dengan jumlah peserta mencapai 125 orang.

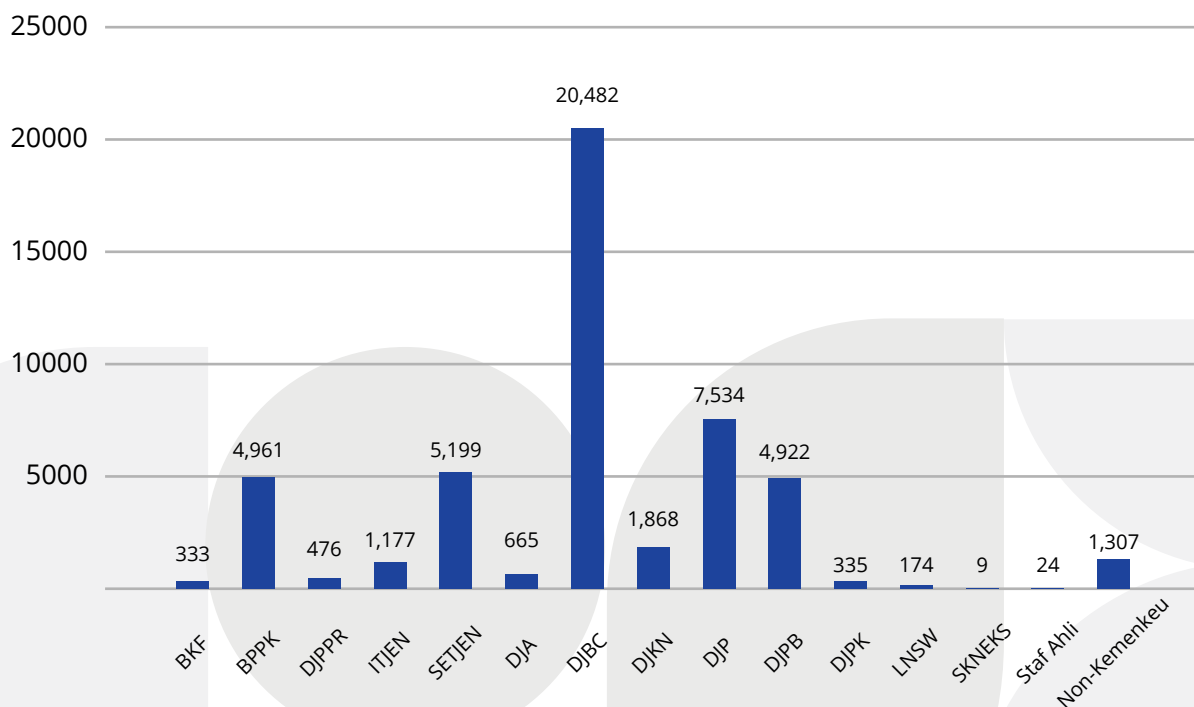
PJJ Multimedia dan Desain Grafis adalah program pembelajaran yang didesain untuk diukur evaluasinya sampai dengan level 2 yang terdiri dari evaluasi level 1, yaitu evaluasi penyelenggaraan dan pengajar melalui Semantik, evaluasi level 2 dengan *action learning*

melakukan simulasi atau praktik mandiri. Dari evaluasi level 1, diperoleh rata-rata indeks 4,76 (skala 5) untuk evaluasi penyelenggaraan dan 4,88 (skala 5) untuk evaluasi pengajar. Sedangkan dari evaluasi level 2, 100% peserta lulus dengan predikat minimal baik (nilai  $\geq 76$ ).

## 7. Capaian Pembelajaran Pusdiklat Keuangan Umum

Pada tahun 2021, Pusdiklat Keuangan Umum menyelenggarakan 379 kelas pelatihan dan terdapat 38 kelas pelatihan program pembelajaran Pusdiklat Keuangan Umum diselenggarakan oleh Balai Diklat Keuangan. Penyelenggaraan program pembelajaran Pusdiklat Keuangan Umum dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Mandatori, program pembelajaran yang harus diikuti oleh unit atau jabatan tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya oleh pengusul program.
2. AKP Reguler, program pembelajaran hasil dari kegiatan AKP.
3. *Open Access*, program pembelajaran yang dapat diikuti oleh seluruh pegawai Kemenkeu tanpa melalui proses AKP. Program ini terdapat pada aplikasi KLC.



Selain dalam bentuk program pembelajaran, Pusdiklat Keuangan Umum juga menyelenggarakan kegiatan yang dapat memberikan informasi dan peningkatan pemahaman para target peserta melalui kegiatan *Kemenkeu Kemenkeu Corpu Talk* (KCT) dengan tema yang beragam.

Berikut ini adalah seri KCT yang diselenggarakan oleh Pusdiklat KU selama tahun 2021:

Eps / Tanggal	Tema	Narasumber	Peserta
Eps. 27 (31 Maret 2021)	Membangun <i>Knowledge Institution</i> melalui <i>Learning Organization Implementasi</i> pada Kementerian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iqbal Islami</li> <li>• Ayu Sukorini</li> <li>• Heni Kartikawati</li> </ul>	Viewer Youtube : 6100 Sertifikat : 1537 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemenkeu : 843</li> <li>• Non Kemenkeu: 694</li> </ul>
Eps. 33 (2 Juni 2021)	Peran <i>Financial Programming &amp; Policies</i> Rekomendasi Kebijakan Makro Fiskal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Andin Hadiyanto</li> <li>• Hidayat Amir</li> <li>• Reza Siregar</li> </ul>	Viewer Youtube : 4590 Sertifikat : 1248 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemenkeu : 564</li> <li>• Non Kemenkeu: 684</li> </ul>
Eps. 37 (12 Agustus 2021)	Implementasi <i>Data Analytics</i> untuk <i>Joint Program</i> Penerimaan Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurnia Chairi</li> <li>• Oza Olavia</li> <li>• Dasto Ledyanto</li> <li>• Agus Sudarmadi</li> </ul>	Sertifikat : 746 Seluruhnya adalah pegawai Kemenkeu
Eps. 41 (30 November 2021)	Peningkatan Peran Lini Pertama dalam rangka Penguatan Sistem Pengendalian Intern dan Integritas Kementerian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alexander Zulkarnain</li> <li>• Mochammad Dody Fachrudin</li> <li>• R. Wiwin Istanti</li> </ul>	Viewer Youtube : 24.787 Sertifikat : 1678 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemenkeu :1.337</li> <li>• Non Kemenkeu: 341</li> </ul>

## 04.3

## Pengelolaan Sertifikasi Kompetensi

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan memiliki tugas dan fungsi melaksanakan sertifikasi kompetensi yang tertuang dalam Perpres 57 Tahun 2020 dan PMK 118/PMK.01/ 2021. Sampai tahun 2021 terdapat 3 (tiga) sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, yaitu:

### 1. Sertifikasi Ahli Kepabeanan oleh Pusdiklat Bea dan Cukai

Sertifikasi Ahli Kepabeanan yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Bea dan Cukai yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-5/PP/2021 tentang Pedoman Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan. Pada tahun 2021 Pusdiklat Bea dan Cukai telah menyelenggarakan Sertifikasi Ahli Kepabeanan sebanyak 3 (tiga) periode yakni Februari, Juni, dan Oktober yang diikuti oleh 953 peserta.

### 2. Sertifikasi Kompetensi Keuangan Negara di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan oleh Pusdiklat KNPK

Sertifikasi Kompetensi Keuangan Negara di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan oleh Pusdiklat KNPK yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-2/PP/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Keuangan Negara di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan di Lingkungan BPPK. Adapun dalam mengakomodasi kebutuhan sertifikasi keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan, penyelenggaraan sertifikasi dapat dilakukan secara mandiri, melalui LSP KNPK atau melalui mekanisme lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2021, Pusdiklat KNPK menyelenggarakan beberapa sertifikasi uji kompetensi yaitu:

- a. Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Skema BNSP/LSP KNPK) yang diikuti oleh 7 Peserta.
- b. Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Skema Mandiri) yang diikuti oleh 72 Peserta.
- c. Uji Kompetensi dalam Rangka Sertifikasi Penilai Properti Dasar bagi Mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN (Skema Mandiri) yang diikuti oleh 447 Peserta.
- d. Uji Kompetensi Teknis Jafung Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Skema BNSP/LSP KNPK) yang diikuti oleh 9 Peserta.
- e. Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Jafung Analis Keuangan Pusat dan Daerah yang diikuti oleh 9 Peserta.
- f. Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Pelelang (Skema Mandiri) yang diikuti oleh 34 Peserta.
- g. Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Pelelang yang diikuti oleh 48 Peserta.

### 3. Sertifikasi Jabatan Fungsional Analis APBN oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Sertifikasi Kompetensi Jabatan Fungsional Analis APBN oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan diselenggarakan dalam rangka mengakomodasi kebutuhan sertifikasi keuangan negara di bidang anggaran dan perbendaharaan.

Adapun pada tahun 2021, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan melakukan moratorium penyelenggaraan Sertifikasi Jabatan Fungsional Analis APBN, namun pada tahun sebelumnya telah menyelenggarakan Sertifikasi Jabatan Fungsional Analis APBN yang diikuti oleh 143 Peserta.

## 04.4

# Pengelolaan Akreditasi

Sebagai unit di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh BPPK tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan kegiatan tetapi juga mencakup penyusunan kebijakan teknis dan rencana program pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara.

Lebih lanjut, ruang lingkup pengelolaan keuangan negara juga memiliki dimensi yang luas, baik di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Artinya, pengelolaan dan penyelenggaraan pelatihan di bidang keuangan negara yang diampu oleh BPPK tidak hanya terbatas di lingkungan Kementerian Keuangan tetapi juga mencakup kementerian/lembaga lain dan bahkan pemerintah daerah.

BPPK sadar bahwa dengan besarnya jangkauan *stakeholders* tersebut, BPPK tidak akan dapat sepenuhnya melayani kebutuhan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara tersebut melalui kegiatan konvensional. Untuk itu, selain mengembangkan berbagai pembelajaran secara daring, termasuk melalui kegiatan *open access* yang dapat dengan mudah dijangkau dan diikuti oleh berbagai pihak, BPPK juga melaksanakan kegiatan Akreditasi Program bagi berbagai program pelatihan teknis di bidang keuangan negara yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan pemerintah, baik di pusat dan daerah, berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/K.1/PDP.09/2017 tentang Penetapan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pengakreditasi Pendidikan dan Pelatihan Teknis.



## 04.5

## Pengelolaan Beasiswa Kementerian Keuangan

Selain melalui program pelatihan, pengembangan kompetensi SDM Kementerian Keuangan juga dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan gelar. BPPK melalui Pusdiklat PSDM bertugas untuk mengelola program beasiswa bagi seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Pengelolaan Beasiswa Pusdiklat PSDM tidak terbatas pada pengelolaan beasiswa *Financial Education and Training Agency (FETA)* yang kemudian diubah menjadi *Ministerial Scholarship (MINTS)*, tetapi juga meliputi pengelolaan beasiswa institusional dari berbagai lembaga, baik nasional maupun internasional.

MINTS merupakan program beasiswa bagi kader pemimpin atau talenta terbaik Kementerian Keuangan untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana di luar negeri. Program beasiswa ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi SDM Kementerian Keuangan dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis Kementerian Keuangan. Para alumni *Ministerial Scholarship* diharapkan memiliki keunggulan kompetitif sehingga lebih siap untuk memimpin Kementerian Keuangan masa depan. Salah satu ketentuan calon peserta yang membedakan beasiswa *Ministerial Scholarship* ini dengan program beasiswa yang lain adalah adanya ketentuan bahwa calon peserta merupakan Kelompok Pegawai Potensial (KPP) yaitu talent sesuai ketentuan manajemen talenta Kementerian Keuangan, pegawai teladan/berprestasi/terbaik, pegawai yang aktif dalam penelitian/publikasi ilmiah, pegawai dengan prestasi khusus, dan/atau pegawai kreatif/inovatif yang dibuktikan dengan pernyataan dari pejabat minimal eselon II.

Dari rangkaian kegiatan seleksi yang dilakukan untuk beasiswa MINTS, dihasilkan 47 peserta pilihan yang telah lulus seleksi dan berhak mendapatkan beasiswa MINTS yang bersumber dari APBN (DIPA Pusdiklat Pengembangan SDM Tahun 2021).

Selain itu, Pusdiklat Pengembangan SDM juga mengelola penawaran beasiswa institusional dari berbagai lembaga, baik nasional maupun internasional, seperti Fullbright, GRIPS, LPDP, IsDB, Chevening, KOICA, dan AAS. Selain menyebarkan penawaran beasiswa institusional, Pusdiklat PSDM berperan dalam melakukan verifikasi atas berkas pendaftaran dari para pendaftar beasiswa yang telah diunggah ke dalam aplikasi Semantik. Tujuan dari verifikasi berkas ini adalah memastikan bahwa para pendaftar beasiswa telah memenuhi ketentuan persyaratan tugas belajar yang ada pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 18/PMK.1/2009 tentang Tugas Belajar di Lingkungan Departemen Keuangan. Pada tahun 2021, terdapat 25 Beasiswa Institusional yang dikelola oleh Pusdiklat PSDM.

## 04.5.1

### Persiapan Beasiswa

Program Persiapan (ProPer) adalah kegiatan *pre departure training* dalam rangka persiapan penerima beasiswa untuk menempuh pendidikan tinggi yang dilakukan oleh pengelola. Peserta dari Program Persiapan ini adalah para penerima beasiswa S2 dan S3 luar negeri. Pihak penyelenggara kegiatan ini ada dua, yaitu Pusdiklat Pengembangan SDM melalui Bidang Pengelolaan Beasiswa, dan juga pihak ketiga melalui mekanisme swakelola tipe 2. Di tahun 2021 ini, pihak ketiga yang bekerja sama dalam penyelenggaraan Program Persiapan adalah Lembaga Bahasa Internasional Fakultas Ilmu Bahasa Universitas Indonesia (LBI FIB UI). Selama pandemi, ProPer dilaksanakan secara *online*, sehingga dapat diikuti dari lokasi masing-masing dan peserta dibebastugaskan dari pekerjaan.

Sebelum kegiatan Program Persiapan dilaksanakan, para peserta diwajibkan mengikuti *replacement test*, yang hasilnya akan digunakan sebagai bahan pembagian kelas sesuai dengan kemampuan peserta. Adapun terdapat 3 kelas dalam penyelenggaraan Program Persiapan, yaitu IELTS 2, IELTS 3 dan IELTS 4. Bagi peserta yang hasil *replacement test*-nya mendapatkan IELTS 2, akan melanjutkan pembelajaran ke IELTS 3 dan IELTS 4 setelah menyelesaikan program IELTS 2. Begitu juga dengan peserta yang mendapatkan hasil *replacement test* ke IELTS 3, akan melanjutkan pembelajaran ke IELTS 4, setelah program IELTS 3 selesai dilaksanakan.

Pada tahun 2021, ada dua jenis penerima beasiswa yang mendapatkan pelatihan program persiapan ini, yaitu penerima beasiswa FETA 6 dan MINTS. Program persiapan FETA 6, diberikan untuk penerima beasiswa FETA yang telah lulus seleksi pada tahun 2020 karena adanya pandemi *COVID-19*, maka program persiapan ini baru bisa dilaksanakan pada tahun 2021 secara daring.

Pada rangkaian program persiapan beasiswa, terdapat program pembekalan yang bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan berkomunikasi dan beradaptasi terhadap tantangan baru selama menjalani masa studinya. Adapun pelaksanaan Program Pembekalan ini dilaksanakan oleh praktisi profesional yang merupakan pihak ketiga. Untuk Program Pembekalan Beasiswa MINTS, dilaksanakan pada tanggal 23–27 Agustus 2021, diisi oleh Wakil Menteri Keuangan Bapak Suahasil Nazara serta praktisi dari *Lead & Beyond* oleh Bapak Wiweko Adi Nugroho. Sedangkan untuk Program Pembekalan Beasiswa FETA 6 dilaksanakan pada tanggal 1-4 November 2021, diisi oleh Akademi Trainer yang dikelola oleh motivator andal, Jamil Azzaini. Pelaksanaan program pembekalan ini dilaksanakan secara daring menggunakan media Zoom Meeting.

## 04.5.2

### Pemantauan Karyasiswa

Mengingat pandemi *COVID-19* yang belum berakhir pada tahun 2021, kegiatan pemantauan terhadap karyasiswa dilakukan secara daring. Adapun tujuan dari pemantauan daring ini adalah mengetahui kabar serta perkembangan studi dari karya-siswa. Selain itu, pemantauan ini juga berperan untuk menggali permasalahan yang sedang dialami oleh para penerima beasiswa selama menjalani masa studi. Adapun permasalahan yang ada nantinya akan dikomunikasikan dengan unit terkait untuk menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Selama tahun 2021, Pusdiklat Pengembangan SDM telah melakukan kegiatan pemantauan sebanyak 26 frekuensi baik untuk karyasiswa dari beasiswa FETA/MINTS maupun dari beasiswa institusional lainnya.

## 04.5.3

### Seminar Alumni Beasiswa

Seminar Alumni Program Beasiswa merupakan salah satu bentuk *re-entry* program beasiswa yang juga dikelola oleh Pusdiklat PSDM. Acara ini bertujuan untuk memupuk etos kerja yang tinggi sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan, menyuntikkan semangat, dan arahan kepada para alumni, yang merupakan pegawai yang potensial menduduki posisi strategis Kementerian Keuangan di masa depan.

Adapun acara seminar alumni ini dibagi menjadi 2 sesi, di mana sesi pertama akan menghadirkan para petinggi dari internal Kemenkeu untuk menyuntikkan semangat kepada alumni penerima beasiswa agar lebih memberikan kontribusi kepada Kementerian Keuangan dan juga masyarakat Indonesia. Sedangkan di sesi kedua, merupakan *Inspiring Session* yang diisi oleh para tokoh yang telah banyak berkontribusi kepada masyarakat Indonesia.

Pada tahun 2021, Seminar Alumni ini dilaksanakan sebanyak dua kali. Pembicara yang diundang dalam kegiatan Seminar Alumni ini di antaranya adalah Nufransa Wira Sakti, Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak; Rina Widiyani Wahyuningdyah, Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan, Mariatul Aini Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran dan para pembicara andal lainnya dari internal Kementerian Keuangan. Selain itu, Pusdiklat PSDM mengundang M. Alfatih Timur yang merupakan CEO kitabisa.com dan juga Dharwinah, Pembina UMKM Indramayu untuk memberikan inspirasinya mengenai kontribusi yang telah mereka berikan kepada masyarakat Indonesia.

Adapun peserta dari acara seminar alumni ini, di tahun 2021 mencapai 545 peserta para alumni penerima beasiswa. Diharapkan dengan adanya seminar alumni ini akan muncul tokoh-tokoh penggerak baru untuk Kementerian Keuangan dan juga Indonesia yang berasal dari para alumni penerima beasiswa.

## 04.5.4

### BroSis (Obrolan Beasiswa)

Sebagai bentuk *scholarship sharing session*, Pusdiklat Pengembangan SDM menyelenggarakan kegiatan webinar *online* BroSis (Obrolan Beasiswa). Konsep kegiatan BroSis ini menggabungkan antara informasi yang dapat diberikan kepada peserta kegiatan jika dilihat dari sudut pandang penyedia beasiswa atau pengelola beasiswa dengan pengalaman dari alumni penerima beasiswa. Acara BroSis ini dikemas dalam kemasan yang santai dan merangkul para generasi muda yang sedang bersemangat untuk mencari beasiswa baik dari Kementerian Keuangan maupun dari umum.

Pada tahun 2021 yang lalu, telah dilaksanakan kegiatan BroSis sebanyak 12 episode, yang diselenggarakan dengan tema-tema *up to date* seputar beasiswa dengan menghadirkan narasumber yang andal, baik dari alumni penerima beasiswa maupun pihak penyelenggara beasiswa. Jumlah peserta yang mengikuti acara BroSis ini pada tahun 2021 adalah sebanyak 1,829 peserta dengan komposisi 1,608 merupakan peserta dari Kementerian Keuangan, dan 221 peserta dari kalangan umum.

## 04.6

## Pendidikan Vokasi Politeknik Keuangan Negara STAN

PKN STAN memiliki visi menjadi kampus bagi putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi pemimpin dan agen perubahan yang unggul, beretika, modern, dan profesional dalam pengelolaan keuangan negara untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan sosial.

Untuk mewujudkan visi tersebut, PKN STAN menetapkan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan tridarma yang bermutu tinggi sebagai hasil sintesis pengetahuan dan praktik pengelolaan keuangan negara;
2. Membangun iklim kehidupan akademik yang membangun pola pikir kreatif, kritis, saling menghargai, menjunjung etika, dan berwawasan kebangsaan dalam rangka membentuk pengelola keuangan negara yang memiliki intelektualitas tinggi, mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, dan memegang teguh nilai-nilai Kementerian Keuangan;
3. Memberikan kesempatan yang adil dan akses pendidikan dan pengajaran yang berkualitas bagi putra-putri terbaik bangsa dalam membangun keberagaman sumber daya pengelola keuangan negara;
4. Mengembangkan sistem tata kelola pendidikan tinggi berbasis digital dan manajemen sumber daya yang optimal.

Dalam menjalankan misi yang telah ditetapkan, PKN STAN berkomitmen untuk melakukan:

1. Pembentukan dan pembangunan karakter mahasiswa;
2. Pembentukan semangat kebangsaan, toleransi dan kebhinekaan;

3. Pembinaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan minat bakat;
4. Pelestarian, pemeliharaan, dan pengembangan secara ilmiah dan keseluruhan kebudayaan Indonesia serta lingkungan hidup dan lingkungan alamnya.

Komitmen tersebut dilaksanakan dalam rangka pembangunan bangsa dan negara, sebagai penjelmaan dan pelaksanaan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kebijakan pemerintah, serta perwujudan kecintaan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai perguruan tinggi, PKN STAN melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

### 1. Pendidikan dan Pengajaran

Sepanjang tahun 2021 PKN STAN telah melakukan transformasi di bidang pendidikan dan pengajaran antara lain melalui perubahan program studi dan perubahan kurikulum.

Pada perubahan program studi, dilakukan perubahan jenjang pendidikan program studi, dari semula Diploma I dan Diploma III menjadi Diploma IV. Pada Tahun Ajaran 2021/2022, terdapat 3 (tiga) Program Studi Diploma IV dan 6 (enam) Program Studi Diploma III, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Program Studi DIV Akuntansi Sektor Publik;
- b. Program Studi DIV Manajemen Aset Publik;
- c. Program Studi DIV Manajemen Keuangan Negara;
- d. Program Studi DIII Akuntansi;
- e. Program Studi DIII Pajak;
- f. Program Studi DIII Penilai/PBB;
- g. Program Studi DIII Kebendaharaan Negara;
- h. Program Studi DIII Manajemen Aset;
- i. Program Studi DIII Kepabeanaan dan Cukai.

PKN STAN juga melakukan perubahan kurikulum dari semula hanya kurikulum akademik, menjadi kurikulum akademik dan kurikulum pembangunan karakter. Redesain kurikulum juga terlihat dari adanya kurikulum bersama pada tahun pertama, penguatan basis keilmuan pada tahun kedua dan penguatan kurikulum konsentrasi pada tahun ketiga dan keempat. Selain itu, terdapat penerapan kurikulum nonkredit untuk materi teknis. Saat ini, penilaian akademik, penilaian karakter, dan sertifikasi menjadi syarat kelulusan mahasiswa PKN STAN.

PKN STAN juga melakukan peningkatan metode pengajaran melalui *team teaching* dan kuliah umum. *Team teaching* dan kuliah umum dilaksanakan untuk menciptakan kurikulum yang *link and match* serta sesuai dengan dinamika pengelolaan keuangan negara, sehingga kurikulum yang digunakan merupakan sintesa praktik dan kasus pengelolaan keuangan negara. *Team teaching* dan kuliah umum diselenggarakan dengan menghadirkan praktisi di lingkungan Kementerian Keuangan dan industri.

Transformasi ini bertujuan supaya PKN STAN tidak hanya menghasilkan tenaga terampil, melainkan tenaga ahli siap pakai di bidang Keuangan Negara. Proses pendidikan dan layanan yang diberikan juga dibangun dengan berbasis digital dan didukung infrastruktur berwawasan lingkungan (*student livelihood community*).

Hal tersebut dilakukan demi mewujudkan PKN STAN sebagai *talent factory* pengelola keuangan negara yang dapat membawa perbaikan-perbaikan pengelolaan keuangan negara di berbagai instansi pemerintah baik pada kementerian/ lembaga maupun pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, PKN STAN didukung oleh tenaga pengajar yang berkualitas. PKN STAN memiliki 158 dosen NIDN yang berpendidikan S3 dan S2 dari universitas terkemuka, baik dalam maupun luar negeri.

PKN STAN selalu berupaya menjaga kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi "Baik Sekali" dan Akreditasi Program Studi "B". Kualitas penyelenggaraan pendidikan di PKN STAN juga terbukti melalui prestasi mahasiswa PKN STAN pada berbagai perlombaan berskala nasional, di antaranya:

- a. Juara I, II, III, dan *Best Speaker* pada *Tax Competition* Universitas Indonesia 2021;
- b. Juara II pada *Accountax Competition* Universitas Indonesia 2021;
- c. Juara I dan II pada Kompetisi Pajak Universitas Airlangga;
- d. Juara II *Tax Paper Competition* Universitas Padjadjaran 2021;
- e. Juara Umum pada *Accounting and Tax Competition* VIII 2021 yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Bali;
- f. Juara I dan Harapan I pada *Tax Planning Competition* Universitas Brawijaya 2021;
- g. Juara I pada Sumatera *Accounting Competition* yang diselenggarakan oleh Universitas Riau;
- h. Juara I *Economic and Accounting Scientific for Young Competition* Universitas Pendidikan Ganesha 2021;
- i. Juara I dan III pada Cirebon *Tax Festival* 2021 yang diselenggarakan oleh Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon;
- j. Juara I dan III pada *Tax Competition National Accrued 5th* 2021 yang diselenggarakan oleh IAI MUDA Jawa Timur;
- k. Juara II *Accounting Parade* Universitas Lampung 2021;
- l. Juara I pada *Tax Essay Competition* Universitas Mataram 2021.

## 2. Penelitian

Pada dharma penelitian, PKN STAN senantiasa mendorong dosen untuk melaksanakan penelitian dan kolaborasi agar kualitas proses dan hasil penelitian dapat terjaga dan arah penelitian sesuai dengan pencapaian visi misi Kementerian Keuangan sehingga berdaya guna bagi masyarakat secara umum dan Kementerian Keuangan pada khususnya. Peningkatan kualitas penelitian dan publikasi secara berkelanjutan menjadi fokus sehingga penelitian dapat memberikan kontribusi bagi rekomendasi kebijakan dan *novelty* dalam bidang keilmuan. Sepanjang tahun 2021, PKN STAN telah menghasilkan 207 publikasi penelitian di bidang Keuangan Negara, dengan sebaran sebagai berikut:

- a. 16 Penelitian dipublikasikan di jurnal internasional yang bereputasi tinggi (*Scopus, Thomson, & Microsoft Academic Search*);



- b. 4 Penelitian dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi sedang (DOAJ, Ebsco, Proquest atau sejenisnya);
- c. 74 Penelitian dipublikasikan di jurnal nasional yang terakreditasi DIKTI;
- d. 63 Penelitian dipublikasikan di jurnal nasional yang memiliki ISSN; dan
- e. 50 Penelitian diseminarkan dengan melibatkan pihak eksternal.

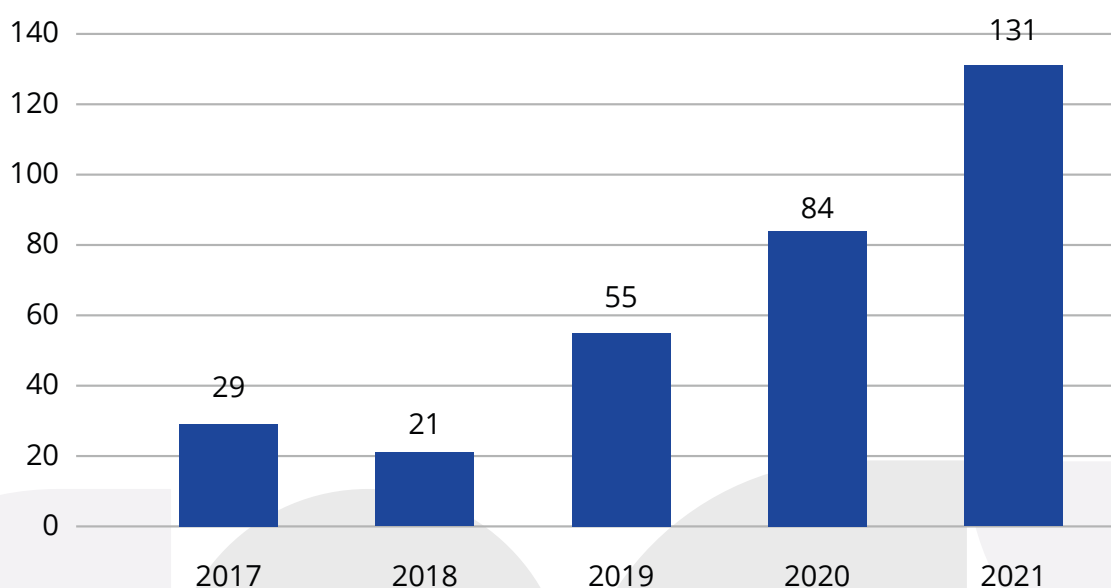
### 3. Pengabdian kepada Masyarakat (Pengmas)

Pengmas yang dilaksanakan PKN STAN merupakan bagian pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas pelaksanaan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Pengmas yang dilakukan terbagi dalam beberapa tema yang terkait dengan kompetensi yang ada di PKN STAN.

Pandemi *COVID-19* tidak menghalangi PKN STAN untuk melaksanakan kegiatan pengmas. Pada awal tahun 2020, dalam rangka menanggulangi efek pembatasan mobilitas dan kegiatan di masa pandemi, PKN STAN segera menetapkan pedoman pelaksanaan program pengmas dalam masa pandemi *COVID-19*, sehingga kuantitas dan kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat bisa tetap terjaga. Pendampingan dan pelatihan dilakukan secara *online*, namun dengan tetap menjaga kualitas program sehingga berdampak sosial tinggi bagi masyarakat. Sepanjang tahun 2021, PKN STAN menyelenggarakan 131 kegiatan pengmas, di mana 40 di antaranya merupakan program pengmas unggulan.

## Pengabdian Kepada Masyarakat 2017-2021

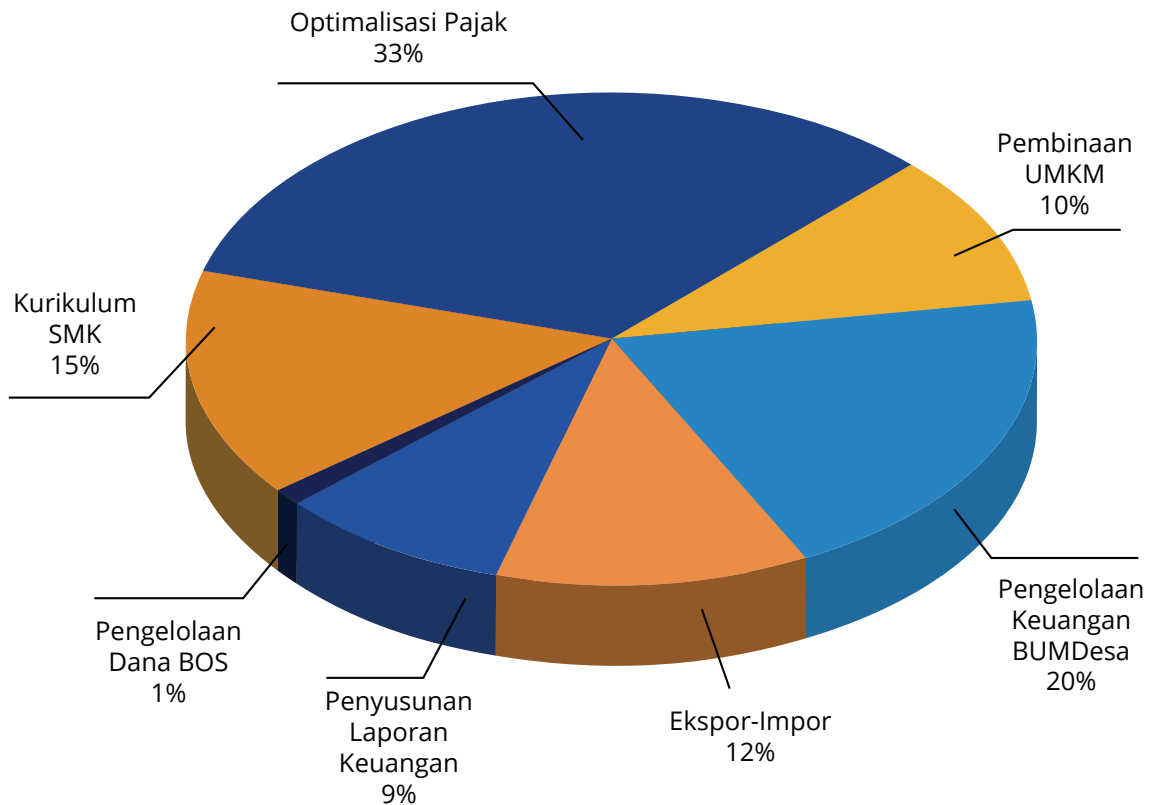




Pengmas unggulan adalah kegiatan dosen yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Jenis program unggulan di antaranya terkait pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan BUMDes, pengelolaan dana BOS, pengelolaan UMKM, dan penyusunan kurikulum SMK.

## Tema Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2021



Mitra pengabdian kepada masyarakat tersebar mulai dari desa dan BUMDes di provinsi Banten dan Jawa Timur; Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di Banten, Jawa Timur, dan Jawa Tengah; serta Pemerintah Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam rangka pendampingan UMKM.

Sedangkan untuk level nasional, PKN STAN melaksanakan kegiatan pengmas berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam program Beli Kreatif Danau Toba dengan tema pemberdayaan UMKM. Program ini telah berlangsung sejak tahun 2019. Pada akhir 2021, PKN STAN juga menandatangani nota kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di mana salah satu rencana tindak lanjutnya adalah pendampingan BUMDes pada tahun 2022.

Sebagai BLU, PKN STAN juga memiliki peran sebagai penyumbang PNBPNBP. Secara umum, realisasi PNBPNBP PKN STAN semakin meningkat setiap tahunnya. Namun pada tahun 2021, terdapat penurunan PNBPNBP yang signifikan terutama dari pelaksanaan kegiatan SPMB. Hal ini dikarenakan PKN STAN menerapkan perubahan mekanisme SPMB dengan memperketat persyaratan calon peserta yang dapat mendaftar, hal ini dilakukan untuk mendukung upaya pemerintah dalam menekan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia.

Dalam rangka mengevaluasi kesesuaian prestasi lulusan dengan kompetensi lulusan di tempat kerja, PKN STAN telah melakukan survei kepuasan pengguna lulusan. Pada survei tersebut, pengguna lulusan PKN STAN menilai bahwa alumni PKN STAN unggul pada aspek etika, keahlian pada bidang ilmu (kompetensi), dan kemampuan kerja sama tim.



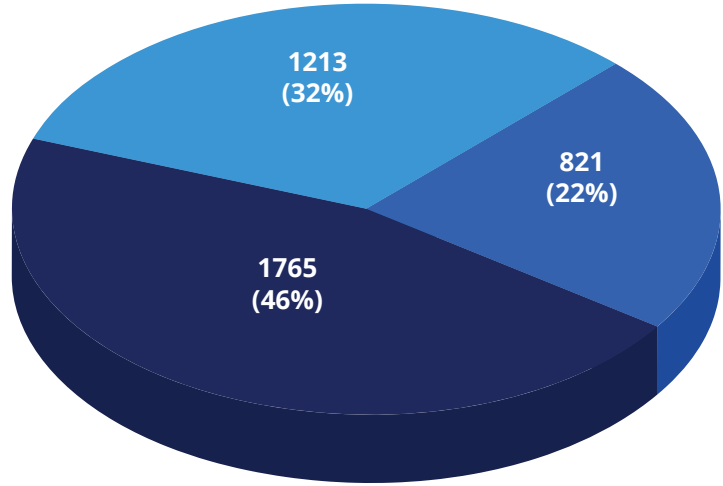
### Sebaran Lulusan

Pada tahun 2021, PKN STAN menghasilkan 3.799 punggawa keuangan negara yang tersebar tidak hanya di Kementerian Keuangan, melainkan juga di kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah.

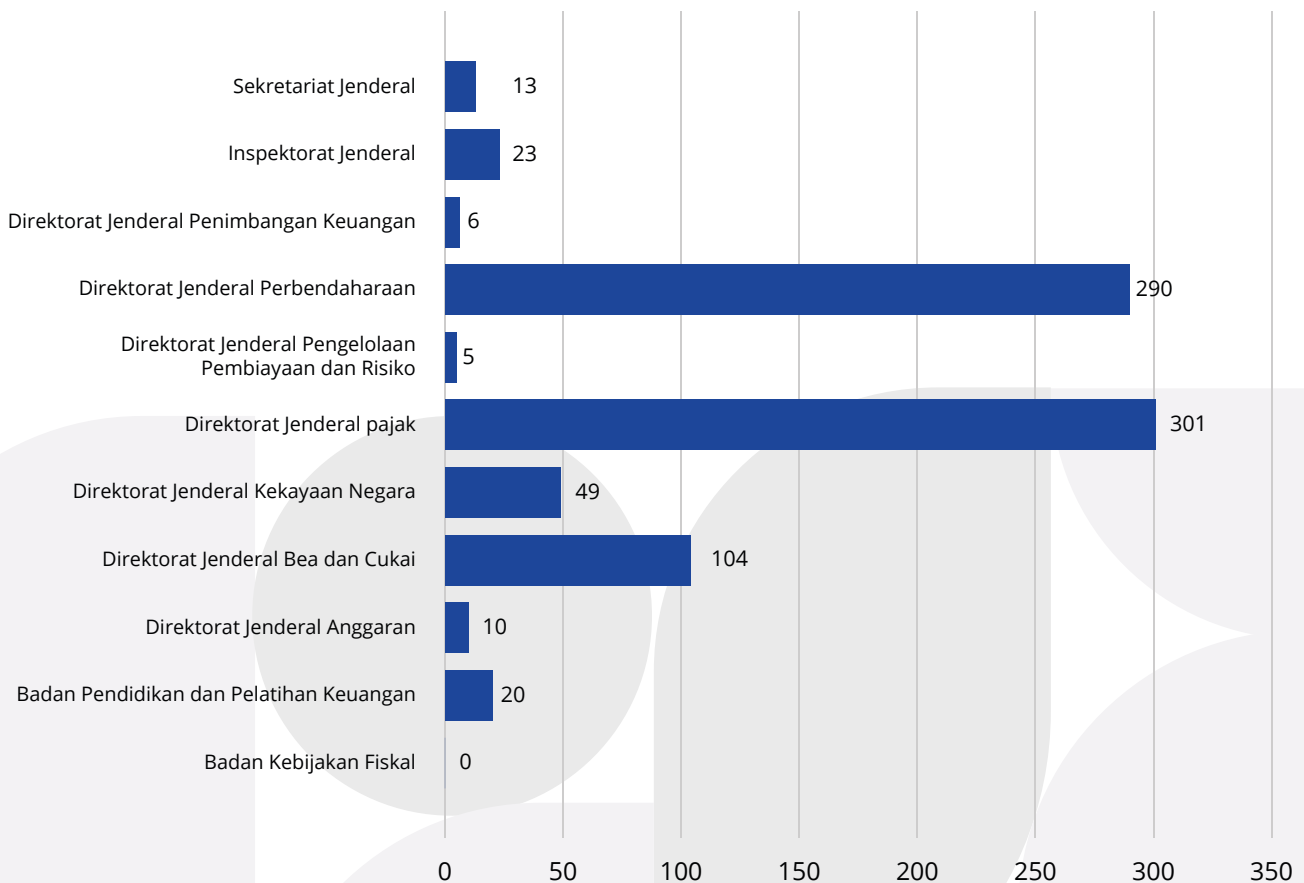
- Kementerian Keuangan
- Mitra Kemenkeu - Kementerian Lembaga
- Mitra Kemenkeu - Pemerintah Daerah

## Data Penempatan 2021

Jumlah Lulusan 3.799



## Data Penempatan Kementerian Keuangan



## Data Penempatan Kementerian Lembaga

<b>538</b>	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	<b>100</b>	Badan Pemeriksa Keuangan
<b>87</b>	Badan Pusat Statistik	<b>85</b>	Badan Pengawas Pemilihan Umum
<b>64</b>	Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertahanan	<b>60</b>	Kementerian Perindustrian
<b>56</b>	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<b>56</b>	Kementerian Komunikasi dan Informatika
<b>55</b>	Komisi Pemilihan Umum	<b>53</b>	Kementerian Perhubungan
<b>50</b>	Kementerian Kesehatan	<b>41</b>	Kementerian Dalam Negeri
<b>37</b>	Kementerian Perencanaan Pembangunan	<b>33</b>	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
<b>32</b>	Kementerian BUMN	<b>29</b>	Badan Keamanan Laut
<b>29</b>	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	<b>29</b>	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
<b>29</b>	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	<b>28</b>	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
<b>28</b>	Kementerian Kelautan dan Perikanan	<b>22</b>	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
<b>21</b>	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	<b>19</b>	Mahkamah Agung
<b>19</b>	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	<b>18</b>	Kementerian Pemuda dan Olahraga
<b>17</b>	Badan Pengawas Obat dan Makanan	<b>16</b>	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
<b>15</b>	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	<b>15</b>	Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal
<b>14</b>	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<b>14</b>	Kementerian Perdagangan
<b>14</b>	Lembaga Administrasi Negara	<b>13</b>	Badan Siber dan Sandi Negara
<b>13</b>	Kementerian Pariwisata	<b>9</b>	Lembaga Ketahanan Nasional
<b>8</b>	Arsip Nasional Republik Indonesia	<b>5</b>	Badan Informasi Geospasial
<b>4</b>	Badan Nasional Penanggulangan Teroris		

# 04.7

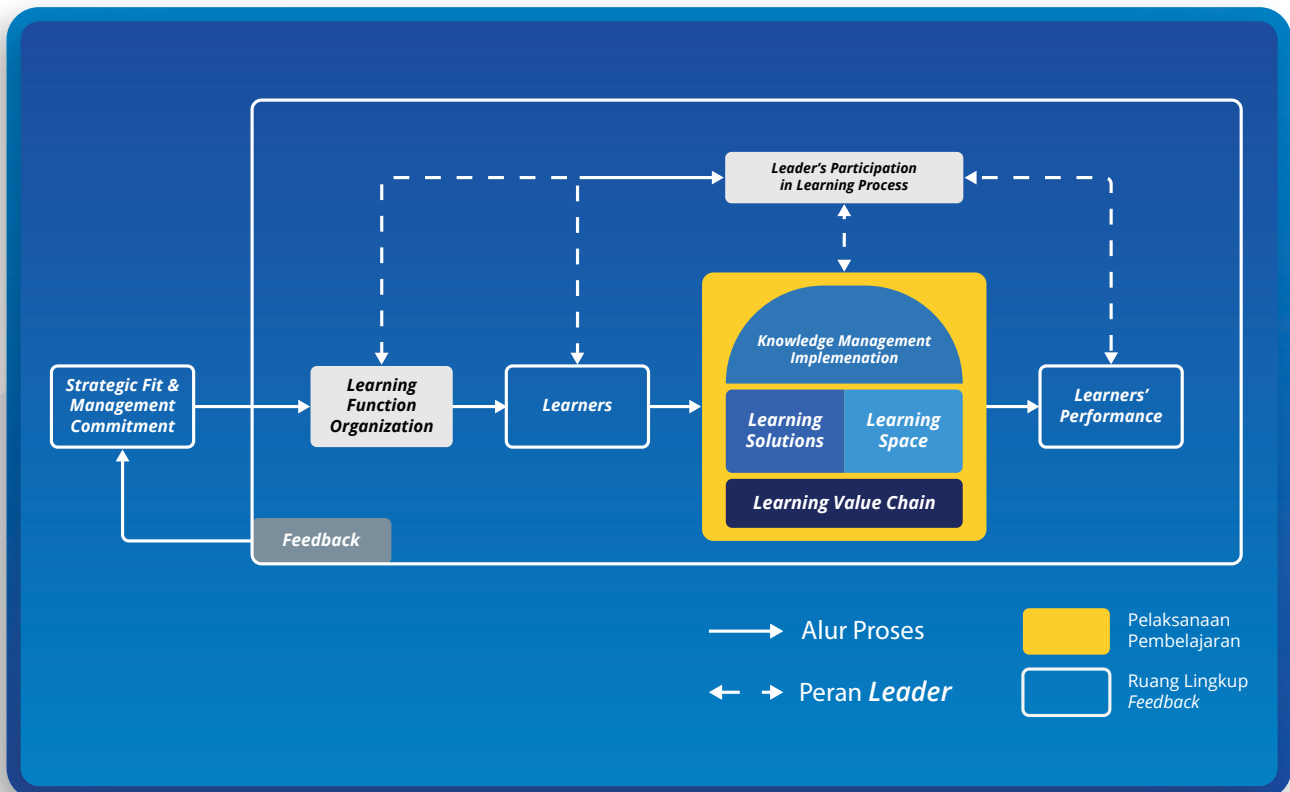
## Learning Organization dan Knowledge Management

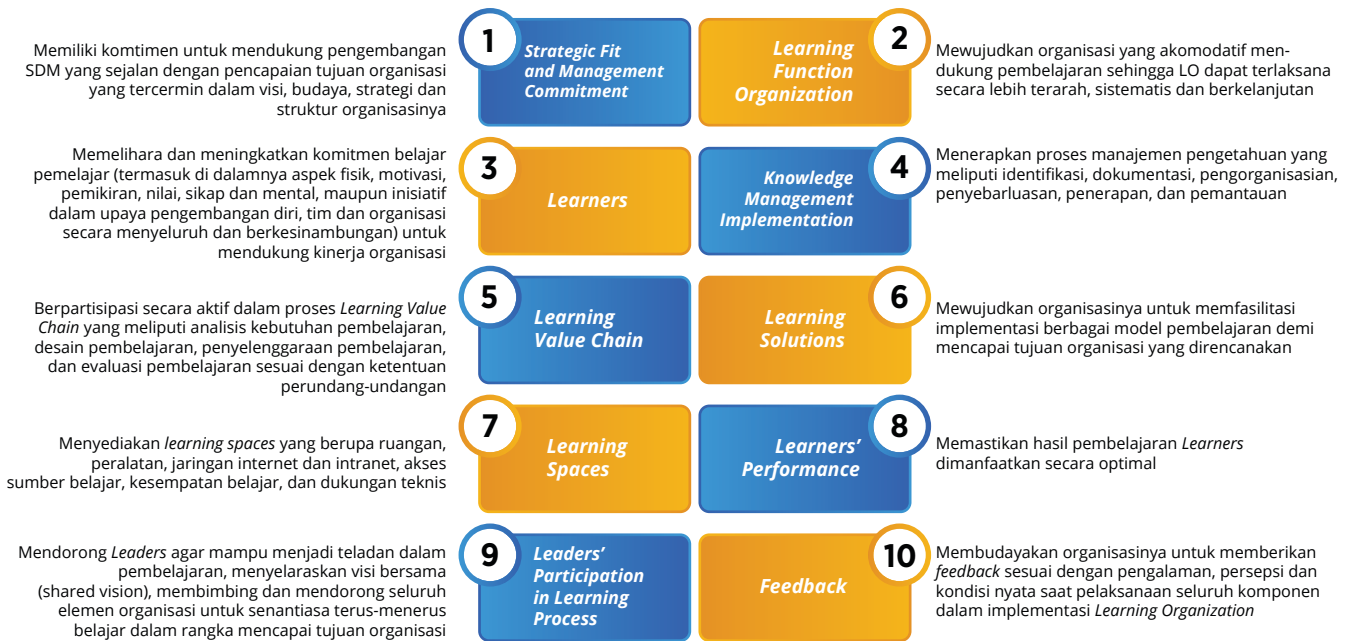
### 04.7.1

#### Learning Organization

Dalam rangka mengantisipasi perubahan yang semakin cepat, disrupsi dan ketidakpastian di tingkat nasional dan global, Kementerian Keuangan menetapkan salah satu tujuan dalam rencana strategis tahun 2020-2024 yaitu birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien. Salah satu sasaran strategis dalam tujuan tersebut adalah organisasi dan SDM yang optimal.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis dimaksud, pada tahun 2021, Kementerian Keuangan menetapkan salah satu indikator kinerja utama, yaitu Tingkat Implementasi *Learning Organization* (LO). *Learning Organization* (organisasi pembelajar) merupakan organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri, baik secara kolektif maupun individual, dalam upaya mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya. Implementasi LO di lingkungan Kementerian Keuangan dilaksanakan dengan menjalankan 10 komponen LO sebagaimana gambar berikut.





Dalam rangka mengimplementasikan LO, BPPK menyelenggarakan berbagai kegiatan yang dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap penerapan, dan tahap *monitoring* dan evaluasi.

Tahap persiapan implementasi LO meliputi:

### 1. Pemetaan Profil LO

Untuk dapat menentukan langkah yang tepat dalam mengimplementasikan LO, organisasi perlu melakukan penilaian (*assessment*) terlebih dahulu mengenai kekuatan dan kelemahan organisasi serta sumber daya yang dimiliki serta gap (kesenjangan) dengan kondisi yang diharapkan. Salah satu *framework* yang dapat digunakan untuk menilai kesiapan organisasi dalam mengimplementasikan LO adalah *The Learning Organization Profile* (LOP) yang dikembangkan oleh Michael J. Marquardt. LOP menilai kesiapan organisasi melalui perspektif 5 (lima) subsistem yang meliputi *learning dynamics* (dinamika pembelajaran), *organization transformation* (transformasi organisasi), *people empowerment* (pemberdayaan SDM), *knowledge management* (manajemen pengetahuan), dan *technology application* (penerapan teknologi).

Dari penilaian (*assessment*) LOP yang dilakukan, BPPK secara keseluruhan mendapatkan nilai 3,37 (skala 4).

Subsistem dengan skor tertinggi yaitu penerapan teknologi yaitu 3,45 (skala 4), sedangkan subsistem dengan skor terendah yaitu dinamika pembelajaran 3,28 (skala 4). Berdasarkan hasil penilaian tersebut, BPPK dapat dikatakan siap untuk dapat mengimplementasikan LO tetapi memerlukan beberapa penguatan, utamanya dalam membangun subsistem dinamika pembelajaran, baik di tingkat individu, tim, maupun organisasi.

### 2. Pembentukan Komite Implementasi LO

Komite Implementasi LO dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan konsep pedoman implementasi LO di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengembangan konsep ini dilakukan dengan terlebih dulu melakukan studi literatur ilmiah dan berbagai forum diskusi dengan ahli terkait LO. Konsep pedoman implementasi LO yang dihasilkan oleh Komite inilah yang kemudian menjadi cikal bakal ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 283/KMK.011/2021 tentang Implementasi Organisasi Pembelajar (*Learning Organization*) di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/KM.11/2021 tentang Pedoman Teknis Implementasi Organisasi Pembelajar (*Learning Organization*) di Lingkungan Kementerian Keuangan.



### 3. Pembentukan Tim Implementasi LO

Tim Implementasi LO merupakan tim lintas unit kerja di lingkungan BPPK yang dibentuk sebagai *task force* dalam mengawal implementasi LO di seluruh unit kerja di lingkungan BPPK. Tim ini bertugas untuk merumuskan berbagai kegiatan dalam rangka menumbuhkan budaya belajar seperti kegiatan sosialisasi LO di masing-masing unit kerja, forum belajar, forum diskusi, dan webinar.

### 4. Penyusunan/Penyesuaian Rencana Kerja

Rencana kerja implementasi LO terdiri dari kegiatan-kegiatan pembangunan budaya belajar. Seluruh unit kerja di lingkungan BPPK menyusun rencana kerja yang ditetapkan oleh Kepala Unit masing-masing. Selain itu, rencana kerja juga disusun di tingkat unit eselon I BPPK yang ditetapkan oleh Sekretaris Badan.

### 5. Showcase Dukungan Pimpinan dan Kick Off Implementasi LO

Komitmen dan dukungan pimpinan sangat penting dalam implementasi LO. Hal ini sesuai dengan amanat salah satu komponen LO yaitu *Leader Participation In Learning Process* (LPLP). Oleh sebab itu, pada tanggal 23 April 2021, BPPK menyelenggarakan *Town Hall Meeting* dengan tema "Building Learning Culture Towards a Learning Organization" yang diikuti oleh seluruh jajaran pimpinan dan seluruh pegawai BPPK. Pada acara *Town Hall Meeting* tersebut, seluruh jajaran pimpinan menyatakan komitmennya untuk mengimplementasikan LO di lingkungan BPPK. Menindaklanjuti acara *Town Hall Meeting* tersebut, masing-masing unit kerja di lingkungan BPPK melaksanakan *kick off meeting* LO.

### 6. Sosialisasi Implementasi LO

Selama tahun 2021, BPPK telah menyelenggarakan berbagai upaya dalam rangka sosialisasi LO di antaranya:

- a. Sosialisasi ke BPPK sebagai UE-1 dalam format LOKeR (*Learning Organization Knowledge Room*);
- b. Sosialisasi tim LO unit di unitnya masing-masing;
- c. Komik LO (Pusdiklat PSDM);
- d. *Morning Call* (BDK Denpasar);
- e. Penyusunan dan penyebarluasan *marketing kit* LO yang meliputi video, booklet, bahan paparan, *landing page*, dan *flyer*.

## Tahap Penerapan LO meliputi:

### 1. Perencanaan Pembelajaran Individu

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka perencanaan pembelajaran individu yaitu:

- a. Sosialisasi dan ketentuan terkait dengan *learning diary* (Pusdiklat KU);
- b. Menyusun rencana pembelajaran individu dan *learning diary reshare* (BDK Pekanbaru);
- c. Setiap pegawai membuat ILP /individual *learning plan* (BDK Pontianak);
- d. Internalisasi kegiatan aktualisasi pembelajaran (BDK Denpasar).

### 2. Implementasi Budaya Belajar

Implementasi budaya belajar dilaksanakan melalui *knowledge sharing* yang rutin dan terencana pada setiap unit kerja. Setiap kegiatan *knowledge sharing* didokumentasikan oleh setiap unit kerja pada *repository* yang dapat diakses seluruh pegawai. Berikut ini adalah berbagai bentuk *knowledge sharing* yang dilaksanakan di lingkungan BPPK:

- a. Setban Satu;
- b. Rabu Biru (Pusdiklat KU);
- c. Sedekah Ilmu dan Podcast (Pusdiklat AP);
- d. BroSis *Scholarship Sharing Session* (Pusdiklat PSDM);
- e. *Weekly Meeting* Dosen (PKN STAN);
- f. *One Week One Information/ OWOI* (BDK Medan);
- g. *Workshop from Ideas into Action: Mastering Content Creation* (BDK Pekanbaru);
- h. *Cross Job dan Team Learning* (BDK Palembang);

- i. One Day One Information/ ODOI (BDK Yogyakarta);
- j. Kegiatan Monica berupa *sharing* hari Senin - Kamis (BDK Denpasar).

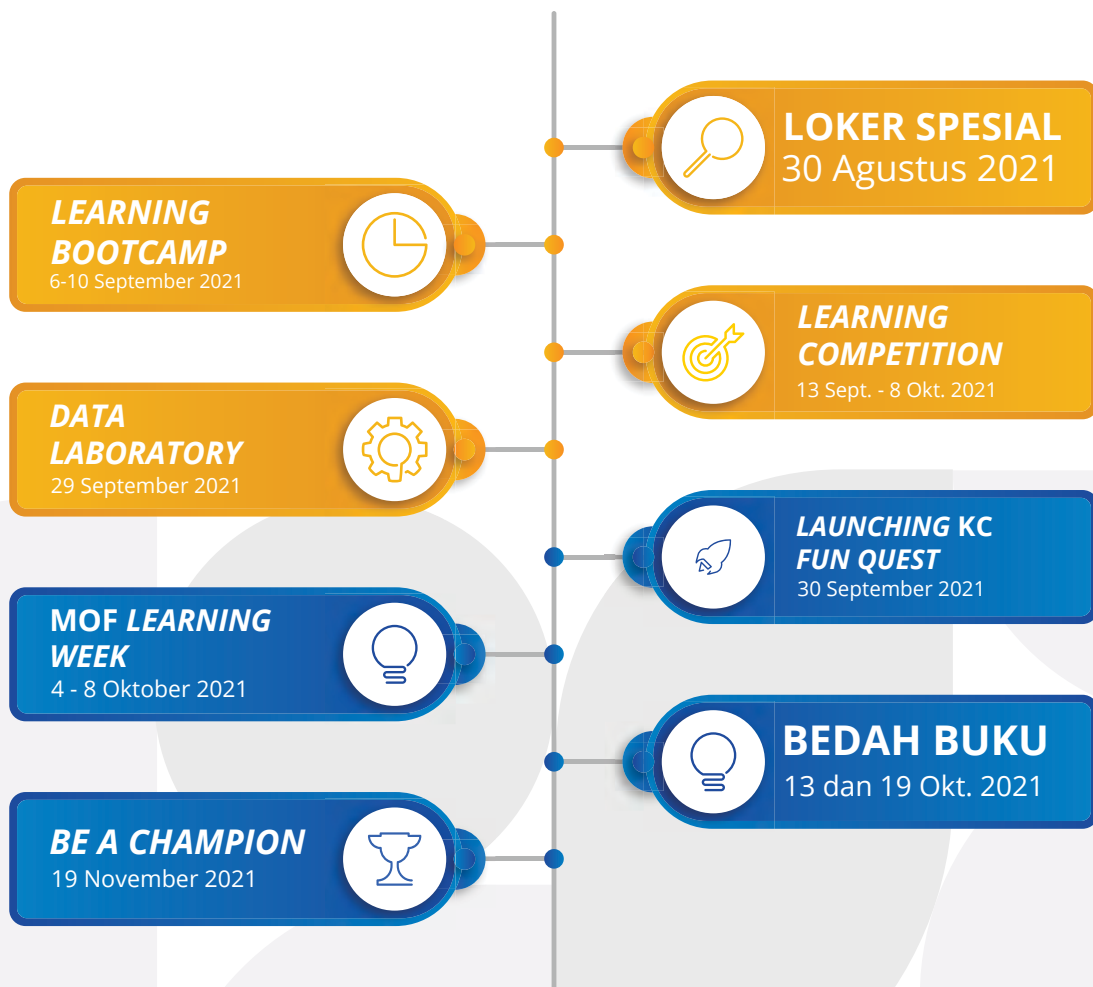
### 3. Pelaksanaan Kemenkeu Learning Festival

Dalam rangka membangun budaya belajar dan berbagi pengetahuan untuk mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai *Learning Organization* serta sekaligus juga untuk menyambut hari ulang tahun Kementerian Keuangan (Hari Oeang) yang ke-75, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan telah menyelenggarakan kegiatan Kemenkeu *Learning Festival* tahun 2021 (KLF 2021). KLF 2021 merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk:

- k. *Quarter learning with Expert* (BDK Pontianak)
- l. Kamis Belajar dan Transfer Knowledge (BDK Manado)
- a. Mewujudkan budaya belajar yang kolaboratif dengan melakukan *sharing knowledge* melalui media pembelajaran yang terkini;
- b. Mengajak seluruh elemen di lingkungan Kementerian Keuangan untuk turut serta dalam membangun organisasi pembelajar (*learning organization*); dan
- c. Memotivasi pegawai untuk berpartisipasi secara aktif dalam dokumentasi pengetahuan dan penciptaan iklim pembelajaran yang kreatif.

# KLF JOURNEY

## Timeline perjalanan KLF 2021



KLF 2021 akan diselenggarakan mulai tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan 30 Oktober 2021 yang terdiri dari rangkaian sembilan kegiatan yaitu:

**a. Learning Organization Knowledge Room (LOKeR) Spesial**

Sebuah acara dengan konsep *talkshow* yang akan diselenggarakan sebagai acara pembuka dari seluruh rangkaian kegiatan Kemenkeu *Learning Festival*. *Talkshow* dikemas dalam format acara yang *casual* dan *fun* dan dapat diikuti oleh seluruh pegawai secara daring. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak, Nufransa Wira Sakti yang merupakan sosok yang rajin berkreasi dan mendokumentasikan pengetahuan serta populer di kalangan generasi milenial Kementerian Keuangan.

**b. Learning Bootcamp: "Content Creator & Knowledge Capture"**

Merupakan kegiatan pembelajaran disertai dengan praktik yang dipandu oleh *professional coach* yang terkenal di bidangnya. Kegiatan ini merupakan bentuk pembekalan dari *Learning Competition* KLF 2021. Kegiatan terbagi menjadi 2 (dua) *camp*, yaitu *knowledge content* dan *knowledge capture*. *Output* utama dalam kegiatan *bootcamp* ini adalah konten dalam media sosial (Instagram, Tiktok, Youtube, dan Podcast) dan film pembelajaran).

**c. Learning Competition**

Merupakan kompetisi terkait pembelajaran yang dapat diikuti oleh mahasiswa PKN STAN, seluruh pegawai, dan keluarga pegawai Kementerian Keuangan. Terdapat 7 (tujuh) kompetisi yang dapat diikuti, yaitu:

- a. Lomba Tiktok terkait Pembelajaran Keuangan Negara;

- b. Podcast terkait Pemulihan Ekonomi Nasional;
- c. Film Pendek Bertema Keuangan Negara;
- d. *Microteaching* Pembelajaran;
- e. *Ice Breaking* Pembelajaran;
- f. *Game-based Learning* KC FunQuest;
- g. *Story Telling* "Ayahku/ Ibuku Pegawai Kemenkeu".

**d. Launching KC FunQuest**

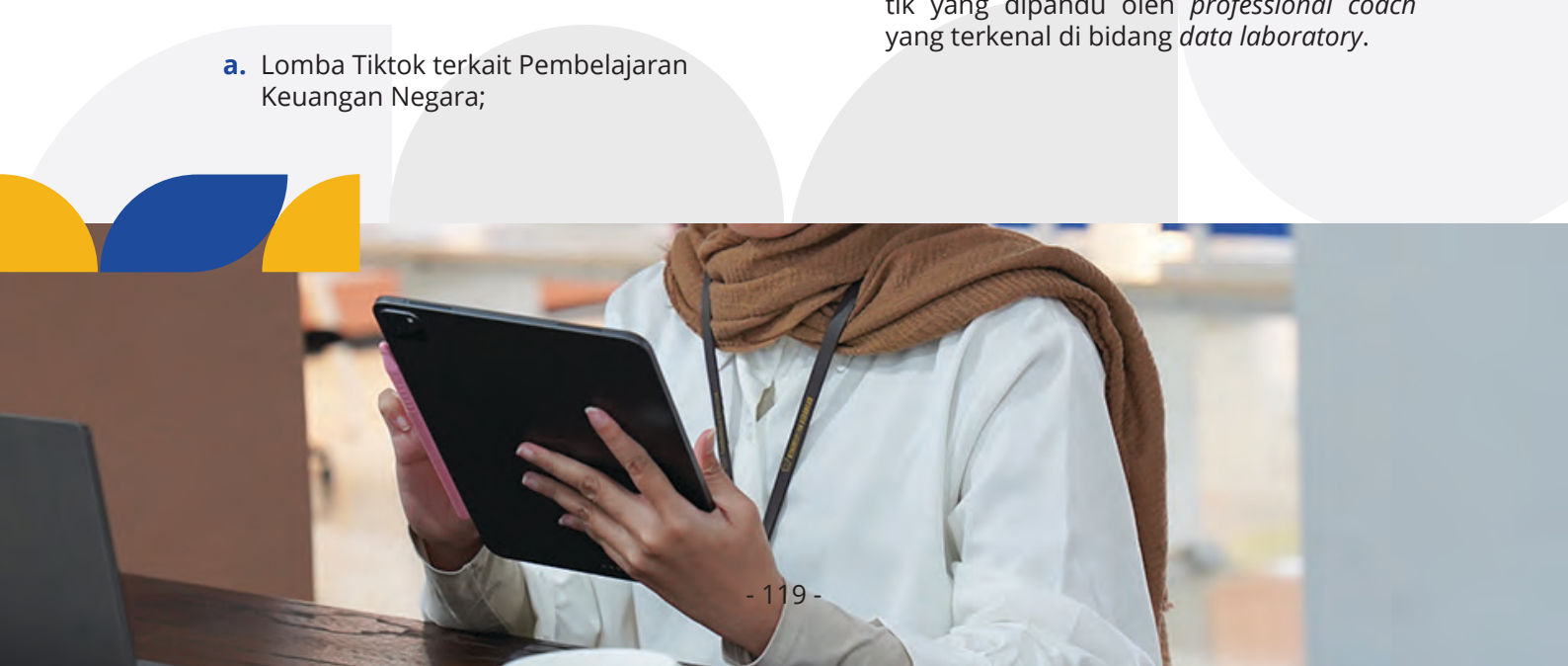
KC *FunQuest* merupakan aplikasi pembelajaran kreatif yang dilekatkan dengan Kemenkeu *Learning Center* (KLC) bagi pegawai Kementerian Keuangan. KC *FunQuest* mengadopsi pendekatan *gamification*. Dalam KC *FunQuest*, pegawai Kemenkeu dapat belajar, bermain, dan berkompetisi yang diukur dalam *leaderboard* individu maupun *leaderboard* organisasi.

**e. Bedah Buku Kementerian Keuangan**

Merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membedah buku-buku inspiratif mengenai tokoh yang berjasa di lingkungan Kementerian Keuangan dan pemikiran terkait dengan keuangan negara. Terdapat beberapa buku yang dibahas, di antaranya adalah buku "Marwanto Harjowiryo: Maestro Simfoni Perbendaharaan" dan buku "Boediarso: Jejak Panjang Perancang Anggaran".

**f. Learning Bootcamp: "Data Laboratory"**

Merupakan kegiatan pembelajaran dalam bentuk *talkshow* yang disertai dengan praktik yang dipandu oleh *professional coach* yang terkenal di bidang *data laboratory*.






### h. MoF Learning Week

Merupakan satu pekan yang diisi dengan *executive learning class* setiap harinya. MoF Learning Week menghadirkan narasumber-narasumber pakar di bidang manajemen pengetahuan dan pembelajaran berkelas internasional.

Target peserta adalah para pejabat Eselon I, II dan III di lingkungan Kementerian Keuangan. Berikut ini adalah tema dan narasumber dalam MoF Learning Week:

<b>Dan Ponterfact</b>	<b>Dr. Stewart Hase</b>	<b>Ulrich Boser</b>	<b>Martijn Rademakers</b>	<b>Lars Sudmann</b>
	<b>Day-Two</b> Unleashing the Power of Learner Agency to Maximize Org. Effectiveness (Australia)		<b>Day-Four</b> Corporate University (Netherland)	
<b>Day-One</b> The future of Learning (Canada)		<b>Day-Three</b> Learning how to learn (USA)		<b>Day-Five</b> Innovation in Learning Organization (Belgium)

### i. Pekan Film Pendek Pembelajaran

Merupakan satu pekan yang diisi dengan pemutaran film-film pendek yang telah lolos seleksi internal dan dinyatakan layak untuk dinilai oleh juri.

### j. Be a Champion

Merupakan acara puncak dari KLF untuk memberikan penghargaan kepada para pemenang *learning competition*.

## 4. Penguatan Budaya Inovasi BPPK

Pada tahun 2021, BPPK menginisiasi penguatan budaya inovasi dengan lebih sistematis dan terstruktur dalam rangka mendukung implementasi organisasi pembelajar yang lebih masif di lingkungan BPPK. Hal ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari membangkitkan *awareness* para pegawai terkait pentingnya inovasi dalam penyelesaian pekerjaan sehari-hari, *innovation contest* melalui penyelenggaraan Liga Inovasi BPPK Tahun 2021, dan pendampingan implementasi inovasi setiap unit di lingkungan BPPK oleh Sekretariat BPPK. Upaya ini mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari seluruh unit terbukti dari banyaknya inovasi yang dikembangkan dan dijalankan oleh masing-masing unit dan inovasi yang diajukan dalam rangka mengikuti Liga Inovasi BPPK Tahun 2021.

Total inovasi yang dikembangkan dan diimplementasikan di lingkungan BPPK pada tahun 2021 adalah sebanyak 93 inovasi. Angka tersebut berasal dari 69 inovasi di lingkungan unit pusat dan 24 inovasi di lingkungan unit balai diklat.

Berdasarkan jenis proses bisnisnya, inovasi ini terdiri dari 43 inovasi pada proses bisnis inti, 44 inovasi pada proses bisnis pendukung, dan 6 inovasi pada proses bisnis manajemen (daftar inovasi berdasarkan proses bisnisnya terdapat pada Lampiran). Klasifikasi tersebut berdasarkan konsep peta proses bisnis BPPK yang disusun oleh Tim PMO BPPK Tahun 2021. Sedangkan inovasi yang diajukan pada Liga Inovasi BPPK Tahun 2021 berjumlah 40 Proposal Inovasi Unit dan 36 Proposal Ide Inovasi.

Secara umum, pengembangan budaya inovasi di lingkungan BPPK sudah sangat baik. Akan tetapi, hal ini dapat lebih ditingkatkan dengan cara penguatan dukungan dari pimpinan masing-masing unit dan komitmen dari pemilik ide inovasi (*innovator*) untuk menjaga keberlangsungan inovasi yang dijalankan serta melakukan evaluasi secara terukur dan berkala untuk menilai dampak dari inovasi yang diimplementasikan. *Knowledge sharing* atas keberhasilan inovasi yang dijalankan oleh suatu unit juga diperlukan agar inovasi tersebut memberikan kemanfaatan yang lebih luas.

Pada tahun 2021, BPPK ikut serta dalam Kompetisi Inovasi Kementerian Keuangan (KIKK) Tahun 2021 dengan inovasi KLC. Dalam penilaian presentasi dan wawancara, tim panel independen memberikan penilaian dalam lembar kerja evaluasi secara individual dengan komponen berupa aspek penyajian (bobot 30%) dan aspek substansi (bobot 70%). Inovasi KLC dipaparkan oleh Sekretaris BPPK. Adapun tim panel independen KIKK 2021 terdiri dari:

- a. Prof. Eko Prasodjo (Mantan Wamen KemenpanRB 2011-2014);
- b. Dr Mulia P. Nasution (Mantan Pejabat Es.I Kemenkeu);
- c. Putri Ayuning Tyas (*News Anchor CNN Indonesia*, Moderator Debat Capres 2019).

Hasil penilaian individual kemudian dilakukan penghitungan rata-rata nilai untuk setiap inovasi untuk kemudian dilakukan pemeringkatan. Berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan oleh sekretariat, penilaian presentasi dan wawancara menghasilkan 5 (lima) proposal inovasi dengan nilai terbaik untuk kemudian dilakukan pemeringkatan final. Berdasarkan pemeringkatan final tersebut, dihasilkan urutan nilai inovasi terbaik sebagai dasar penetapan Top 5 (lima) inovasi Kementerian Keuangan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1514/KM.1/2021 tentang Penetapan Inovasi Terbaik pada Kompetisi Inovasi Kementerian Keuangan Tahun 2021, telah ditetapkan Top 25 (dua puluh lima), Top 10 (sepuluh), dan Top 5 (lima) inovasi terbaik Kementerian Keuangan di mana inovasi KLC ditetapkan menjadi peringkat pertama inovasi terbaik.

BPPK juga mengirimkan proposal inovasi KLC dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN-RB. Proposal Inovasi Kemenkeu Learning Center (KLC) terpilih untuk mewakili Kementerian Keuangan dalam KIPP bersama dengan 9 (sembilan) inovasi kelompok umum dari unit eselon I lainnya. Akan tetapi, inovasi Kementerian Keuangan yang berhasil menjadi juara dan masuk dalam TOP 45 KIPP Tahun 2021 hanya satu inovasi yaitu Inovasi AIFA (*Artificial Intelligence sebagai Financial Advisor*) dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Tahap *monitoring* dan evaluasi LO meliputi pengukuran tingkat implementasi LO yang dilakukan untuk keseluruhan komponen LO.

Pada tahun 2021 tingkat implementasi LO diukur menggunakan tiga metode pengukuran, yaitu survei, *self-assessment*, dan penilaian komite. Hasil pengukuran tingkat implementasi LO tahun 2021 yaitu sebesar 94,15, lebih tinggi dari target kinerja tahun 2021 sebesar 77. Nilai BPPK pada tiga metode pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Nilai dari metode survei (bobot 30%) adalah 89,61;
- b. Nilai dari metode *self-assessment* (bobot 30%) adalah 98,13;
- c. Nilai dari metode penilaian komite (bobot 40%) adalah 94,57.

Komponen LO dengan nilai tertinggi pada BPPK adalah komponen *feedback* dengan nilai 100,00. Kondisi ini menunjukkan bahwa BPPK telah secara optimal mendorong pejabat dan/atau pegawainya untuk memberikan *feedback* dan melaksanakan tindak lanjut atas pelaksanaan LO tahun sebelumnya.

Adapun komponen LO yang perlu mendapat perhatian pada BPPK adalah komponen *learners* dengan capaian nilai 89,57. Hal ini menggambarkan bahwa masih terdapat *room for improvement* dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan berkelanjutan di BPPK.

## 04.7.2

### **Knowledge Management**

Selain melalui implementasi *Learning Organization*, untuk dapat mewujudkan Organisasi dan SDM yang Optimal, Kementerian Keuangan juga menetapkan strategi pembangunan dan pengembangan manajemen pengetahuan (*knowledge management*). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.011/2019 tentang Manajemen Pengetahuan di Lingkungan Kementerian Keuangan, Manajemen Pengetahuan adalah upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki melalui proses identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebaran, penerapan, dan pemantauan pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi.

Identifikasi pengetahuan merupakan tahapan yang dilakukan untuk menentukan pengetahuan yang akan didokumentasikan sebagai aset intelektual. Hasil dari identifikasi pengetahuan tersebut ditindaklanjuti pada tahap dokumentasi pengetahuan. Dokumentasi pengetahuan merupakan kegiatan *knowledge capture* untuk menghasilkan aset intelektual yang dilakukan melalui metode di antaranya wawancara, pengamatan, diskusi kelompok terarah, dan komunitas belajar (*community of practices*). Setelah aset intelektual dihasilkan, perlu dilakukan katalogisasi, klasifikasi, abstraksi, dan pemberian indeks terhadap aset intelektual. Rangkaian aktivitas inilah yang disebut dengan pengorganisasian pengetahuan. Penyebarluasan pengetahuan dilakukan setelah aset intelektual melalui proses penjaminan mutu oleh Panitia Penjaminan Mutu. Penyebarluasan pengetahuan ini dilakukan melalui penyediaan aset intelektual pada laman antarmuka *software* KMS untuk dapat diakses oleh pengguna *software* KMS. Aset intelektual yang telah disebarluaskan diharapkan dapat diaplikasikan atau dimanfaatkan oleh pengguna *software* KMS untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang bersangkutan. Proses pengaplikasian atau pemanfaatan aset intelektual tersebut merupakan rangkaian aktivitas dari tahap penerapan pengetahuan. Terakhir, pemantauan pengetahuan dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara aset intelektual yang terdapat dalam *software* KMS dengan kebutuhan pengguna *software* KMS. Pemantauan ini dilakukan melalui penjangkaran opini, review, pendapat, komentar pengguna *software* KMS, dan/atau metode lain yang sejenis.

Pada tahun 2021, berbagai upaya telah dilakukan oleh BPPK untuk mendukung implementasi manajemen pengetahuan di lingkungan

Kementerian Keuangan diantaranya pengembangan *Knowledge Management System* (KMS) yaitu Kemenkeu *Learning Center* (KLC), pendokumentasian berbagai aset intelektual di bidang keuangan negara, penjaminan mutu aset intelektual, penyebarluasan aset intelektual, dan sosialisasi pemanfaatan KMS ke seluruh unit eselon I dan LNSW di lingkungan Kementerian Keuangan. Hingga akhir tahun 2021, jumlah aset intelektual yang berhasil didokumentasikan di pusat manajemen pengetahuan pada *platform* KLC telah mencapai 1.494 aset intelektual.

Untuk mengetahui pemanfaatan aset intelektual/materi pembelajaran di bidang keuangan negara, pada tahun 2021 BPPK menetapkan IKU Tingkat Pemanfaatan *Knowledge* pada *Platform* KLC. Pengukuran ini dilakukan melalui tiga aspek, yaitu efektivitas pengelolaan *Community of Practice*, *user engagement*, dan kualitas konten. Pengelolaan *Community of Practice* (CoP) diukur berdasarkan jumlah *lesson learned* dari CoP yang aktif dikelola oleh BPPK. CoP dikatakan aktif apabila memiliki setidaknya satu dokumentasi *lesson learned* yang diunggah ke KLC. Target untuk setiap Pusdiklat adalah 5 *lesson learned* dari 3 CoP aktif. *User engagement* diukur berdasarkan *bounce rate* KLC v2 dan jumlah *unique page views*. Target *unique page views* adalah 1.000 dikali jumlah WI/ dosen pada unit. Sedangkan, kualitas konten diukur berdasarkan rata-rata rating yang diberikan oleh pengunjung terhadap konten yang ada di menu pusat pengetahuan/ *knowledge center* yang telah mendapatkan penilaian/rating minimal 30 kali. Dari hasil pengukuran yang dilakukan, IKU Tingkat Pemanfaatan *Knowledge* pada *Platform* KLC memiliki capaian 116%.



## 04.8

## Survei Kepuasan Pengguna Layanan 2021

Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) bertujuan untuk mengukur sejauh mana pelayanan Kementerian Keuangan telah dapat memuaskan para pengguna layanan dan membangun kepercayaan publik. Selain itu, diperlukan proses evaluasi dari waktu ke waktu mengenai tingkat kepuasan pengguna layanan Kemenkeu pada tiap-tiap unit eselon I dan layanannya. Harapan dari pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan Kemenkeu secara teratur dan berkesinambungan diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang taktis dan strategis guna meningkatkan kinerja pelayanan dan kepuasan pengguna layanan dari waktu ke waktu.

SKPL merupakan kegiatan kerja sama antara Kementerian Keuangan dengan tim peneliti dari Universitas Padjajaran. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan secara daring (*online*) dengan metode pengambilan data *purposive sampling* dan metode analisis *American Customer Satisfaction Index*, diperoleh Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) Kementerian Keuangan untuk tahun ini sebesar 4,40, sedangkan indeks IKPL yang diperoleh BPPK sebesar 4,63 dengan jumlah responden 217 dari total 3.437 responden Kemenkeu atau sekitar 6,31% dari total responden.

Sebelumnya, IKPL BPPK pada tahun 2020 sebesar 4,41 dan pada tahun 2019 sebesar 4,73, pada tahun 2021 terdapat 3 layanan yang disurvei yaitu seleksi beasiswa, pelatihan jarak jauh, dan *e-learning*. Kota yang menjadi sampel survei adalah Jakarta, Medan, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar.

Dari tiga jenis layanan yang disurvei, berdasarkan urutan nilai IKPL tertinggi ada pada layanan seleksi beasiswa, pelatihan jarak jauh, dan pelatihan *e-learning*. Layanan seleksi beasiswa dan pelatihan jarak jauh merupakan layanan baru yang disurvei pada tahun 2021 ini.

Layanan Seleksi Beasiswa mempunyai IKPL 4,68, dengan aspek layanan yang sudah baik dan harus dipertahankan adalah waktu penyelesaian layanan, sikap pegawai, dan kemampuan dan keterampilan pegawai. Masukan layanan seleksi beasiswa antara lain penjelasan mengenai langkah-langkah atau proses yang disertai oleh kriteria pada masing-masing proses, pengumuman disampaikan tepat waktu, dan adanya transparansi penilaian dari semua tahapan.

Layanan pelatihan jarak jauh mempunyai IKPL 4,61 dengan aspek layanan yang sudah baik dan harus dipertahankan adalah kesesuaian prosedur, keterbukaan/ kemudahan akses informasi, serta akses terhadap layanan. Masukan layanan pelatihan jarak jauh antara lain perbedaan zona waktu menjadi kendala bagi penyelesaian waktu ibadah dan istirahat peserta, usulan untuk jalur komunikasi kepada pakar sehingga dapat bertanya kapanpun dibutuhkan, efektivitas pelatihan dirasa kurang karena kejenjutan peserta harus menghadap layar dalam waktu yang relatif lama sehingga lebih baik durasi hari pelatihan diperpanjang tetapi durasi waktu pelatihan dipersingkat, *website* diharapkan lebih *user friendly*, peserta tetap mengharapkan pelatihan tatap muka serta durasi pelatihan jarak jauh dapat dipersingkat.

Layanan *e-learning* mempunyai IKPL 4,61 dengan aspek layanan yang sudah baik dan harus dipertahankan adalah kesesuaian prosedur, akses terhadap layanan, dan waktu penyelesaian layanan. Masukan layanan *e-learning* antara lain adanya standarisasi mengenai tampilan materi pada situs, Semua materi agar bisa diakses tanpa ada undangan *link*, serta sistem *server* agar diperbaiki karena seringkali terkendala masalah *server* yang *down*.



# 05

## Tata Kelola Pemerintahan

### 05.1

#### Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian Internal di lingkungan BPPK dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 940/KMK.09/2017 tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern dan Pedoman Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan. Sistem pengendalian intern yang disusun oleh manajemen selaku manajemen operasional perlu dipantau untuk memastikan bahwa pengendalian berjalan sesuai rancangan yang sudah ditetapkan.

Untuk memastikan bahwa seluruh unit kerja di lingkungan BPPK mengimplementasikan pengendalian internal secara memadai, BPPK melakukan pengujian efektivitas pengendalian *intern* pada seluruh unit kerja kantor pusat di lingkungan BPPK setiap bulan yang meliputi 11 (sebelas) proses bisnis yaitu :

1. Penyelenggaraan Pengendalian Intern Tingkat Entitas;
2. Pengelolaan Kinerja (Organisasi);
3. Penerbitan dan Penyampaian Dokumen Tagihan/ Pembayaran (Honorarium Narasumber/ Tenaga Pengajar dan Perjadin);
4. Pengadaan Barang dan Jasa (Tender/ Seleksi);
5. Pengadaan Barang dan Jasa (Langsung);
6. Pendidikan Pascasarjana;
7. Kerja Sama Program Pelatihan;
8. Evaluasi Pembelajaran Level 2 (Per- siapan, Pelaksanaan, dan Penyerahan Hasil Ujian PKN STAN);

9. Evaluasi Pembelajaran Level 2 (Per- siapan, Pelaksanaan, dan Penyerahan Hasil Ujian PKN STAN);
10. Evaluasi Pembelajaran Level 2 (Hasil Pembelajaran Mahasiswa);
11. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat PKN STAN.

Berdasarkan pemantauan pada 11 (sebelas) proses bisnis tersebut, hasil pengendalian intern adalah efektif. Meskipun dinyatakan efektif, pengendalian tersebut hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai mengenai efektivitas dan efisiensi proses bisnis, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengembangan dan pelaksanaan pengendalian *intern* sepenuhnya merupakan tanggung jawab manajemen. Sistem pengendalian intern, meskipun dirancang dan dilaksanakan dengan baik, tetap memiliki keterbatasan, sehingga kemungkinan kesalahan karena kekeliruan atau ketidakberesan dapat terjadi dan tidak terdeteksi.

## 05.2

# Manajemen Risiko

Kementerian atau lembaga sering menghadapi berbagai ketidakpastian atau risiko baik berupa ancaman dan/ atau peluang yang datang dari internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuannya, dan hal ini tidak terkecuali bagi Kementerian Keuangan selaku pengelola keuangan negara. Dalam menghadapi ketidakpastian untuk mencapai tujuannya, Kementerian Keuangan perlu menerapkan manajemen risiko yang efektif dalam menghadapi risiko tersebut, sehingga dapat meminimalkan ancaman yang bisa mengganggu atau menggagalkan pencapaian tujuan dan mampu memanfaatkan peluang untuk meningkatkan pencapaian tujuan.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu juga menerapkan manajemen risiko di dalam unitnya sebagai suatu kebutuhan proses pengelolaan organisasi untuk pencapaian tujuan. BPPK di dalam pelaksanaan implementasi manajemen risiko pada tahun 2021 mendasarkan pada ketentuan KMK 577/KMK.01/ 2019 (KMK 577/ 2019) tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan. Proses manajemen risiko di BPPK sebagaimana amanat KMK 577/ 2019 d terdiri dari proses komunikasi dan konsultasi, perumusan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko, dan pemantauan dan *review*.

Dari 9 (sembilan) sasaran organisasi di BPPK pada tahun 2021, berdasarkan hasil identifikasi dan analisis di awal tahun, terdapat 10 (sepuluh) risiko yang dilakukan mitigasi dari total 22

(dua puluh dua) risiko. Sebaran dan besaran risiko BPPK di awal tahun 2021 tergambar dari peta risiko sebagaimana berikut:

Matriks Analisis Risiko			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	7	12	17	22	25
	4	Sering Terjadi	15 4 16	12 9	8 14 9 5	19	24
	3	Kadang Terjadi	3	8	10 13	18	23
	2	Jarang Terjadi	17 2 18 19	13 6	11 11	16	2 21
	1	Hampir Tidak Terjadi	20 1 21 22	14 5	10	6 15 7	3 20

Sasaran Organisasi	Risiko	Besaran Risiko*)
Manajemen pengetahuan yang berkualitas	Proses pembelajaran melalui <i>Kemenkeu Learning Center</i> tidak dapat berjalan dengan baik	21
Pendidikan tinggi vokasi dan pengelolaan beasiswa yang optimal	Tahapan program persiapan, penempatan, dan pemantauan belum mampu diimplementasikan dengan optimal	21
Pendidikan tinggi vokasi dan pengelolaan beasiswa yang optimal	PKN STAN tidak dapat menghasilkan penelitian yang berdampak bagi urusan pemerintahan di bidang Keuangan negara	20
Tata kelola dan sumber daya kementerian yang optimal	Pelaksanaan pengembangan kompetensi tidak bermanfaat untuk kinerja alumni	19

Sasaran Organisasi	Risiko	Besaran Risiko*)
Organisasi dan SDM yang Optimal	BPPK belum mampu menciptakan lingkungan kerja yang sesuai dengan harapan <i>stakeholders</i>	17
Organisasi dan SDM yang Optimal	Implementasi <i>data analytics</i> dalam pembelajaran tidak dapat dilakukan secara optimal	15
Komunikasi publik yang efektif dan sistem informasi yang andal	Pengelolaan sistem TIK dalam mendukung kelangsungan proses bisnis strategis organisasi tidak optimal	15
Pengembangan SDM terintegrasi berdampak kinerja yang optimal	Tidak terwujudnya <i>continuous improvement</i> sebagai hasil dari pembentukan budaya belajar	14
Pengembangan SDM terintegrasi berdampak kinerja yang optimal	Pembelajaran belum selaras dengan pemenuhan kebutuhan kompetensi pegawai dalam pencapaian kinerja	14
Pembelajaran berdampak tinggi	Kemenkeu <i>Learning Center</i> belum optimal dalam mendukung pembelajaran digital	13

#### \*) Besaran risiko awal tahun

Berdasarkan laporan pemantauan risiko yang telah dilakukan sampai dengan periode triwulan IV 2021, dapat dilaporkan dari upaya mitigasi yang telah dilakukan terhadap 10 (sepuluh) risiko yang harus dilakukan mitigasi, secara keseluruhan terdapat penurunan besaran risiko

untuk keseluruhan risiko, dengan level besaran risiko yang bervariasi, yaitu: 1 (satu) risiko berada pada level risiko sedang, 3 (tiga) risiko berada pada level risiko rendah, dan 6 (enam) risiko berada pada level risiko sangat rendah.

## 05.3

### Whistle Blowing System

*Whistle Blowing System* adalah aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan bagi pelapor yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pelapor tidak perlu khawatir terungkapnya identitas diri anda karena Kementerian Keuangan akan merahasiakan identitas diri pelapor sebagai *whistleblower*. Kementerian Keuangan menghargai informasi yang dilaporkan. Fokusnya adalah kepada materi informasi yang dilaporkan saja. Tata cara pelaporan ada 9 tahapan yang sudah tercantum pada *home page* [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id). Sepanjang tahun 2021, Wise Kemenkeu mendapatkan 5 (lima) aduan yang terkait dengan layanan yang diberikan oleh BPPK. Keseluruhan aduan tersebut telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 05.4

# Keterbukaan Informasi Publik

### 05.4.1

## Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi publik

Sebagai Unit Eselon I di bawah Kementerian Keuangan, BPPK dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, BPPK termasuk ke dalam kategori badan publik yang wajib menerapkan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

BPPK telah menjalankan pengelolaan dan pelayanan informasi melalui unit-unit organisasi

yang menjalankan fungsi komunikasi publik atau kehumasan yang bertanggung jawab untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi publik di lingkungan BPPK. Beberapa contoh kegiatan yang dilakukan antara lain, pencantuman informasi profil unit organisasi BPPK di setiap halaman *website unit* serta layanan informasi melalui *Contact Center* BPPK.

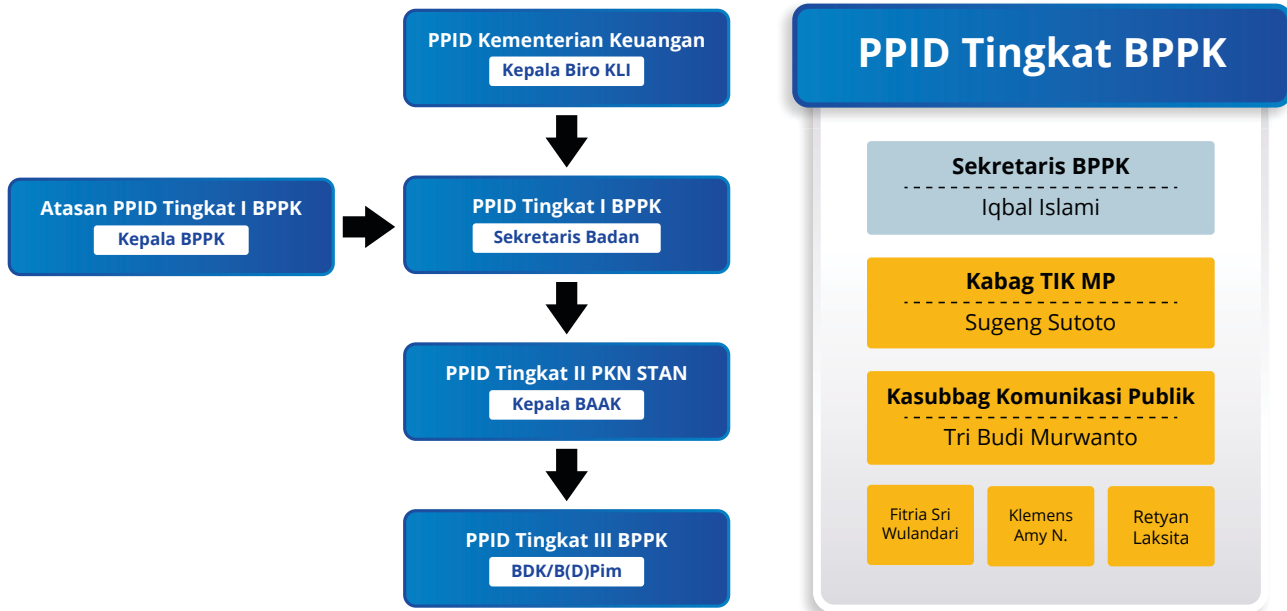
Dengan adanya keterbukaan informasi publik, diharapkan masyarakat dapat memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik, sekaligus mendorong terciptanya *clean and good governance*. Implementasi keterbukaan informasi publik sejalan dengan hak warga negara untuk mengetahui kebijakan maupun proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah.

### 05.4.2

## Struktur Perangkat PPID Tingkat I BPPK

BPPK sebagai badan publik terus berkomitmen menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan guna memenuhi kebutuhan informasi publik. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, ditetapkan bahwa BPPK merupakan bagian dari Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan dengan Sekretaris BPPK sebagai PPID Tingkat I BPPK. Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Mahasiswa, Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN sebagai PPID Tingkat II PKN STAN, serta para Kepala Balai Diklat Keuangan/ Kepemimpinan bertindak sebagai PPID Tingkat III BPPK.



### 05.4.3

## Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2021, PPID Tingkat I BPPK menerima dan memproses layanan permohonan informasi publik yang masuk melalui aplikasi *e-PPID*, *e-mail* [ppidbppk@kemenkeu.go.id](mailto:ppidbppk@kemenkeu.go.id), serta melayani dengan terbuka jika ada pemohon yang datang secara langsung. Selain itu, permintaan informasi terkait BPPK juga dilayani melalui media lain, seperti surel [bppk.hubungikami@kemenkeu.go.id](mailto:bppk.hubungikami@kemenkeu.go.id), Whatsapp *Hotline*, *Call Center* 14004, dan melalui aplikasi *Customer Relationship Management (CRM)* yang dapat diakses pada KLC dan *website* BPPK. Selain itu, PPID Tingkat I BPPK juga menerima layanan permohonan informasi publik yang diteruskan dari Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan selaku PPID Kementerian Keuangan.

Penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPPK diawali dengan menginventarisasi informasi-informasi yang berada dalam penguasaan BPPK. Setelah itu, dilakukan kategorisasi informasi, sesuai dengan yang

diatur oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian tersusunlah usulan Informasi Publik dan usulan Klasifikasi Informasi BPPK. Kedua usulan tersebut diajukan kepada PPID Kementerian Keuangan untuk dilakukan uji konsekuensinya dan ditetapkan dalam Daftar Informasi Publik Kementerian Keuangan dan Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan. BPPK juga telah mempublikasikan pada *website* BPPK data yang termasuk dalam kategori "Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala" berupa Profil BPPK, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan atau Laporan Kinerja (LAKIN) BPPK, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPPK, peraturan-peraturan dan informasi lainnya melalui *website* BPPK. Terkait sarana dan prasarana, di tahun 2021 ini BPPK telah menyediakan loket khusus pelayanan informasi di resepsionis Sekretariat BPPK, sedangkan penyediaan dan pengelolaan informasi diserahkan kepada masing-masing unit di lingkungan BPPK. Dalam seluruh layanan yang dilakukan oleh BPPK, segala biaya yang timbul dari pelayanan informasi ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun Anggaran 2021.

BPPK juga telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Perangkat Layanan PPID BPPK yang diikuti seluruh perwakilan dari tiap unit di lingkungan BPPK serta membentuk tim kerja

perangkat PPID di lingkungan BPPK. Sebagai wadah diskusi dan koordinasi para petugas layanan PPID di lingkungan BPPK, telah dibentuk grup WhatsApp yang beranggotakan seluruh petugas layanan.

Pada tahun 2021, PPID Tingkat I BPPK telah meraih penghargaan sebagai PPID informatif tingkat Kementerian Keuangan. Prestasi yang telah diraih BPPK ini semakin membangun komitmen kuat BPPK dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk terus menjadi lebih baik.

## 05.4.4

### Statistik Layanan Informasi Publik BPPK Tahun 2021

Permohonan informasi publik yang masuk melalui PPID Tingkat I BPPK pada tahun 2021 sejumlah 2.921 pemohon. Permohonan yang dapat diproses hingga selesai penyampaian pemberitahuan tertulisnya sebanyak 2.888 pemohon, sedangkan permohonan yang tidak dapat diproses lebih lanjut dikarenakan identitas belum sesuai atau permintaan informasi tidak lengkap sebanyak 33 pemohon.

#### Statistik Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Diproses Selama Tahun 2021

Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu rata-rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yang Dipenuh		Jumlah Permohonan yang Ditolak/ Tidak Diberikan	Alasan Permohonan yang Ditolak/ Tidak Diberikan		
			Sepenuhnya	Sebagian		Di-kecualikan	Belum Dikuasai/ Selesai	Lainnya
Januari	10	6,90 hari	9	-	1	1	-	-
Februari	3	9,67 hari	3	-	-	-	-	-
Maret	151	5,81 hari	151	-	-	-	-	-
April	36	6,64 hari	36	-	-	-	-	-
Mei	32	6,75 hari	27	-	5	-	1	4
Juni	28	5 hari	27	-	1	-	-	1
Juli	41	4,68 hari	41	-	-	-	-	-
Agustus	453	6,32 hari	453	-	-	-	-	-
September	1836	10,80 hari	1836	-	-	-	-	-
Oktober	274	9,64 hari	273	-	1	-	1	-
November	18	7 hari	18	-	-	-	-	-
Desember	6	6,5 hari	6	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>2888</b>	<b>7,14 hari</b>	<b>2880</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>

## Statistik Jumlah Permohonan yang Tidak Dapat Diproses Selama Tahun 2021

Bulan	Jumlah Permohonan	Alasan Tidak Diproses Lebih Lanjut
Januari	-	-
Februari	-	-
Maret	30	Identitas Belum Sesuai
April	-	-
Mei	-	-
Juni	-	-
Juli	-	-
Agustus	1	Identitas Belum Sesuai
September	-	-
Oktober	-	-
November	2	Permintaan Informasi Tidak Lengkap
Desember	-	-
<b>Total</b>	<b>33</b>	

### 05.5

## ZI WBK di Lingkungan BPPK

Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan telah dimulai sejak tahun 2016. Hingga tahun 2021, sejumlah 9 (sembilan) dari 20 (dua puluh) unit kerja di lingkungan BPPK telah berhasil mendapatkan predikat ZI WBK di tingkat nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan rincian sebagai berikut.



No	Nama Unit	Perolehan Predikat	Tahun Perolehan
1	Pusdiklat Keuangan Umum	WBK	2017
2	Pusdiklat Bea dan Cukai	WBK	2018
3	Pusdiklat KNPK	WBK	2018
4	BDK Yogyakarta	WBK	2020
5	BDK Manado	WBK	2020
6	Balai Diklat Kepemimpinan	WBK	2020
7	Sekretariat Badan	WBK	2021
8	Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	WBK	2021
9	BDK Cimahi	WBK	2021

Pada tahun 2021, Unit Kepatuhan Internal telah melakukan penilaian mandiri terhadap 8 (delapan) unit yang belum pernah diusulkan dalam penilaian ZI WBK dan 3 (tiga) unit yang akan diajukan ulang dalam penilaian ZI WBK tingkat nasional/Kemenpan-RB tahun 2022 dan 2023. Berdasarkan hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan, terdapat 1 (satu) unit pusdiklat

dan 8 (delapan) unit BDK yang berpotensi dan memenuhi kriteria untuk diusulkan sebagai unit berpredikat WBK. Namun dengan mempertimbangkan kesiapan sumber daya di Unit Kepatuhan Internal sebagai Tim Penilai Unit Eselon I, 6 (unit) akan diajukan sebagai unit berpredikat WBK pada tahun 2022, sedangkan 5 (lima) unit lainnya akan diusulkan pada tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Unit	Usulan	Tahun Diusulkan
1	Pusdiklat Keuangan Umum	Diusulkan Penilaian ZI WBBM	2022
2	Pusdiklat PSDM	Diusulkan Penilaian ZI WBK	2022
3	BDK Medan	Diusulkan Penilaian ZI WBK	2022
4	BDK Pekanbaru	Diusulkan Penilaian ZI WBK	2022
5	BDK Palembang	Diusulkan Penilaian ZI WBK	2022
6	BDK Malang	Diusulkan Penilaian ZI WBK	2022
7	BDK Denpasar	Diusulkan Penilaian ZI WBK	2022
8	Pusdiklat Bea dan Cukai	Diusulkan Penilaian ZI WBBM	2023
9	Pusdiklat KNPK	Diusulkan Penilaian ZI WBBM	2023
10	Pusdiklat Pajak	Diusulkan Penilaian ZI WBK	2023
11	PKN STAN	Diusulkan Penilaian ZI WBK	2023
12	BDK Pontianak	Diusulkan Penilaian ZI WBK	2023
13	BDK Balikpapan	Diusulkan Penilaian ZI WBK	2023
14	BDK Makassar	Diusulkan Penilaian ZI WBK	2023



# 06

## Kerja sama Internasional

Dalam rangka penguatan peran di kancah internasional, BPPK menyelenggarakan berbagai program kerja sama internasional. Kerja sama internasional dimaksud dapat berupa namun tidak terbatas pada:

1. Pelaksanaan kegiatan berdasarkan MOU/ perjanjian lain yang telah ditandatangani;
2. Keikutsertaan dalam seminar/ *workshop*/ *conference*/ *meeting* di luar negeri;
3. Penyelenggaraan kegiatan pelatihan/ seminar/ *workshop*/ *knowledge sharing* dengan melibatkan mitra luar negeri baik sebagai peserta maupun narasumber;
4. Pemberian bantuan berupa hibah dalam bentuk pembiayaan kegiatan/ asistensi/ fasilitas.

Pada tahun 2021, terdapat realisasi kegiatan kerja sama internasional, yaitu:

1. 5 (lima) kegiatan berupa pengiriman peserta untuk mengikuti *international conference*;
2. 8 (delapan) kerja sama penyelenggaraan kegiatan pelatihan/seminar/*workshop/knowledge sharing*/kuliah umum dengan melibatkan mitra luar negeri;
3. 4 (empat) kegiatan berupa keikutsertaan pegawai BPPK untuk mengikuti pembelajaran yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan luar negeri;
4. 8 (delapan) realisasi kegiatan kerja sama sebagai tindak lanjut dari MoU BPPK-Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH) Kementerian Keuangan Malaysia.

Adapun beberapa kegiatan kerja sama internasional yang telah diinisiasi pada tahun 2021 namun masih dalam proses, yaitu:

1. Tindak lanjut kerja sama sebagai implikasi penandatanganan MoU antara Kementerian Keuangan (dalam hal ini diwakili BPPK) dengan *Asian Development Bank Institute*;
2. Pemberian hibah dalam bentuk uang untuk melaksanakan kegiatan "Training on Sea Patrol and Vessel Search for Asia/ Pacific Customs Officers" dengan skema LDKPI yang diusulkan oleh BDK Pekanbaru.

Di antara berbagai kegiatan kerja sama internasional yang diselenggarakan selama tahun 2021, terdapat beberapa kegiatan strategis yang berdampak signifikan pada peningkatan kompetensi pejabat/pegawai Kementerian Keuangan, yaitu:

1. *Webinar Series: Global Development Learning Network (GDLN) Education and HRD in the Era of a New Normal*;
2. *E-Learning Financial Programming and Policies, PART 1 (FPP 1x)*;
3. *E-Learning Financial Programming and Policies, PART 2 (FPP 2x)*;
4. *Executive Workshop: The Future of Money*.

## 06.1

### **Webinar Series: Global Development Learning Network (GDLN) Education and HRD in the Era of a New Normal**

Berkerja sama dengan *Global Development Learning Network Asia Pacific c.q. KDI School*, Korea, BPPK menyelenggarakan *Webinar Series: Global Development Learning Network (GDLN) Education and HRD in the Era of a New Normal* pada periode 3 Maret s.d. 6 Mei 2021. Kegiatan ini secara khusus mempelajari pengalaman Korea Selatan dalam menghadapi pandemi *COVID-19* serta bagaimana Korea Selatan mentransformasi pengembangan SDM di era *new normal*. Rangkaian kegiatan ini diikuti oleh pejabat/pegawai yang berasal dari seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan dengan jumlah peserta adalah 36 orang. *Webinar Series* ini terdiri dari 8 sesi yang membahas topik berbeda setiap pertemuannya sebagai berikut:

1. *High Touch High Tech: Transforming Education After COVID-19*;
2. *International & National Assessments: Quality and Equity in Education in Korea*;
3. *Korea's Response to its e-Education System during the Pandemic*;
4. *Inclusive Learning Technology for Sustainable Development*;
5. *Australia's Experience and Views on Education During the COVID-19 Pandemic*;
6. *Major Challenges in Education in the Developing World Post-COVID-19*;
7. *New Challenges and Opportunities for Technical and Vocational Education and Training (TVET) in the Post-COVID-19 Era*;
8. *Digital Literacy for HRD*.

## 06.2

### ***E-Learning Financial Programming and Policies, PART 1 (FPP 1x)***

Bekerja sama dengan IMF-STI Singapura, BPPK menyelenggarakan *E-Learning Financial Programming and Policies, PART 1* (FPP 1x) pada periode 1 April s.d. 7 Mei 2021.

*E-learning* ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya bagi pegawai di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal, guna melakukan analisis terhadap perekonomian, terutama pengaruh kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap perekonomian, menggunakan kerangka *Financial Programming and Policies* (FPP) yang dikembangkan oleh *International Monetary Fund* (IMF). Setelah mengikuti *e-learning* ini peserta diharapkan mampu memahami kerangka dan hubungan antar sektor. *E-learning* ini diikuti oleh 40 orang pejabat/ pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang berasal dari BPPK, DJKN, DJPPR dan SETJEN. Topik atau materi yang disampaikan meliputi:

1. *Introduction;*
2. *Real Sector;*
3. *External Sector;*
4. *Government Sector;*
5. *Monetary & Financial Sector Accounts;*
6. *Interrelations.*

## 06.3

### ***E-Learning Financial Programming and Policies, PART 2 (FPP 3x)***

Program ini merupakan kelanjutan dari *E-Learning Financial Programming and Policies, PART 1* (FPP 1x). *E-learning* ini diselenggarakan pada periode 10 Juni s.d. 2 Juli 2021 dengan jumlah peserta sebanyak 34 orang yang berasal dari unit BKF, BPPK, DJKN, DJPPR, DJPB, ITJEN dan SETJEN. Topik atau materi yang disampaikan meliputi:

1. *Introduction;*
2. *Real Sector;*
3. *External Sector;*
4. *Government Sector;*
5. *Monetary Sector;*
6. *Consistency of Baseline;*
7. *Policies and;*
8. *Adjustment Scenario.*

## 06.4

# Executive Workshop: The Future Of Money

Bekerja sama dengan CITI Group Inc. USA, BPPK menyelenggarakan *Executive Workshop: The Future of Money* pada tanggal 21 Juni, 28 Juni, dan 30 Juni secara daring. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Keuangan, terkait dengan pengetahuan terkait perkembangan *digital currency*, mitigasi dampaknya pada sektor keuangan dan stabilitas sistem keuangan, serta pemahaman terkait model pengaturan *digital currency* guna optimalisasi manfaat *digital currency* dalam kerangka peran Kementerian Keuangan selaku regulator di bidang fiskal. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 145 peserta dari seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan.

Topik yang disampaikan pada webinar ini adalah:

1. *The Future of Money: Risk and Opportunities;*
2. *Regulatory Framework;*
3. *Role of Government, Authorities, and Central Bank.*





**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
REPUBLIK INDONESIA

Hak Cipta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan -  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Jl. Purnawarman No. 99, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia